

PERJUANGAN MOHAMMAD HATTA DALAM MENEGAKKAN
KEMERDEKAAN INDONESIA 1945 – 1949

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

M. Wariyanti

NIM : 961314018

NIRM : 960051120604120015

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2001

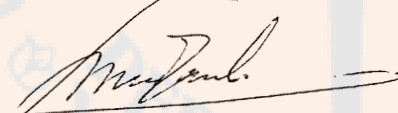
PERJUANGAN MOHAMMAD HATTA DALAM MENEGAKKAN
KEMERDEKAAN INDONESIA 1945 – 1949

Oleh :

M. Wariyanti
NIM : 96 1314 018
NIRM : 960051120604120015

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I


Drs. G. Moedjanto, M.A.

tanggal 21 Nopember 2001

Pembimbing II


Drs. A K. Wiharyanto

tanggal 21 Nopember 2001

PERJUANGAN MOHAMMAD HATTA DALAM MENEGAKKAN
KEMERDEKAAN INDONESIA 1945 – 1949

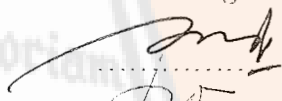
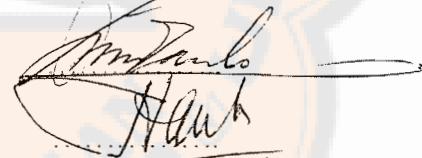
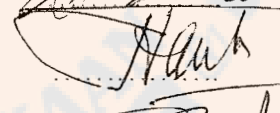
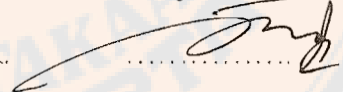
Skripsi

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

M. Wariyanti
NIM : 96 1314 018
NIRM : 960051120604120015

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 5 Desember 2001
dan telah dinyatakan memenuhi syarat.

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

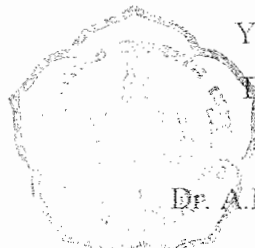
	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Sutardjo Adisusilo, J.R.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	: 1. Drs. G. Moedjanto, M.A.	
	2. Drs. A.K. Wiharyanto	
	3. Drs. Sutardjo Adisusilo, J.R.	

Yogyakarta, 5 Desember 2001
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

Dekan,

Dr. A.M. Slamet Soewandi, M.Pd.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Bapak dan Ibuku tercinta.*
- 2. Kakak-kakak dan keponakan-keponakanku
terkasih.*
- 3. Simbah Kakung, Simbah Putri (alm.), Pakfik,
Bulik dan adik-adikku.*
- 4. Teman-teman P. Sejarah Angkatan '96 :
Astie, Romanna, Sr. Vero, Ernie, Erlina,
Idha, Mindha, Dhanie, Anie, Bima, Beny,
Binex, Tanyo, Youdha.*

MOTTO

**Berusaha dan Berdoa.*

**Kesabaran tidak ditentukan dari seberapa lama kita dapat menahan tekanan dari luar, tetapi seberapa lama kita dapat menahan tekanan dari diri sendiri.*



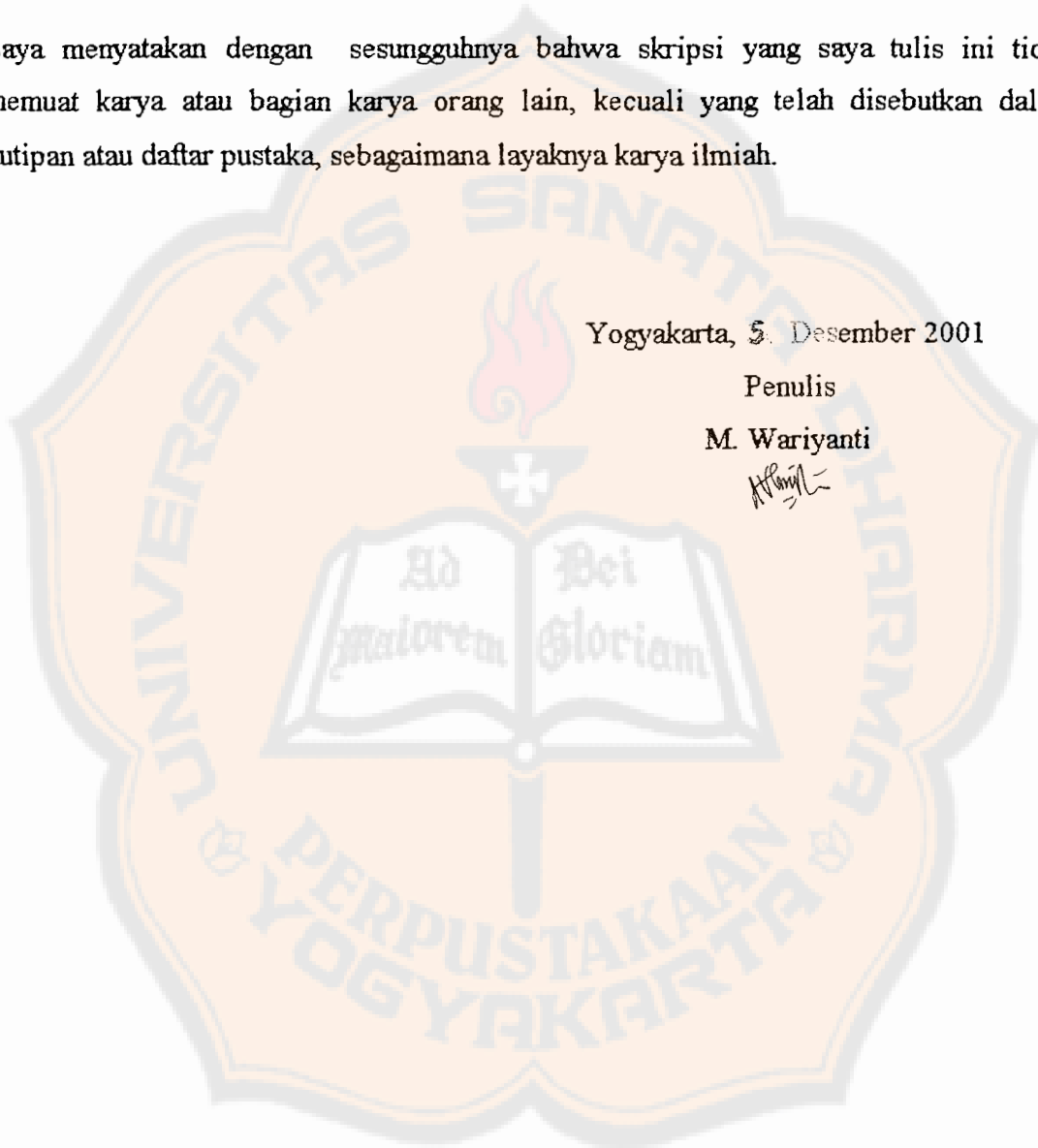
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan atau daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 5. Desember 2001

Penulis

M. Wariyanti



ABSTRAK

Perjuangan Mohammad Hatta dalam Menegakkan
Kemerdekaan Indonesia 1945 – 1949

M. Wariyanti
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan : pertama, untuk mengetahui posisi Mohammad masa 1945-1949; kedua, bentuk perjuangan Mohammad Hatta; ketiga, peranan Mohammad Hatta sekitar persetujuan Renville hingga penyerahan kedaulatan RIS. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan model deskriptif analisis.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini membuktikan bahwa peranan Hatta sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam pelaksanaan persetujuan Renville hingga penyerahan kedaulatan. Peranan Hatta dalam masa 1945-1949 antara lain dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan, pelaksanaan persetujuan Renville dan Konferensi Meja Bundar (KMB). KMB berakhir dengan penyerahan kedaulatan RIS dari Belanda. Dalam hal ini Hatta sebagai ketua delegasi RIS menerima penyerahan kedaulatan tersebut. Perjuangan Hatta tidak terlepas dari kerjasama Hatta dengan tokoh-tokoh dalam negeri maupun luar negeri. Tokoh-tokoh dalam negeri antara lain Soekarno dan Syahrir, sedangkan tokoh-tokoh luar negeri antara lain Nehru dan anggota Komisi Jasa-Jasa Baik. Peranan Hatta yang paling penting adalah dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan dan penyerahan kedaulatan.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan mengalami banyak rintangan. Akan tetapi dengan perjuangan dan usaha para pemimpin perjuangan, akhirnya bangsa Indonesia memperoleh kembali kemerdekaan dan kedaulatan tersebut. Dalam hal ini peranan Kabinet Hatta sangat penting. Dalam Kabinet Hatta, Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada awal pembentukan Kabinet Hatta, Kabinet ini mendapat tugas melaksanakan persetujuan Renville.

Pelaksanaan persetujuan Renville mengalami kegagalan. Oleh karena itu diadakan perundingan kembali antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan itu dikenal dengan perundingan Roem-Royen. Salah satu hasil persetujuan Roem-Royen adalah penyelenggaraan KMB di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan tanpa syarat, nyata dan lengkap. Dalam pelaksanaan KMB Hatta berperan sebagai ketua delegasi RIS. KMB berakhir dengan penyerahan kedaulatan kepada RIS. Penerimaan penyerahan kedaulatan diwakili oleh Hatta karena Hatta menjabat sebagai ketua delegasi RIS.

ABSTRACT

Mohammad Hatta's Struggle in Maintaining
Indonesia Independence 1945 - 1949

M. Wariyanti
Sanata Dharma University
Yogyakarta

This thesis was meant to answer three questions : firstly, to know Mohammad Hatta's position around 1945-1949; secondly, to know the form of Mohammad Hatta's struggle, and finally to know Mohammad Hatta's role around Renville agreement, 1948-1949. This thesis was done by applying library research with analysis descriptive model.

From the analysis, it was proved that Mohammad Hatta has a strong role in Indonesian independent struggle, especially in the Renville agreement until the transfer of sovereignty. Mohammad Hatta's role in the period of 1945-1949 could be seen in the proclamation of independence, Renville agreement and Round Table Conference. Round Table Conference result an agreement of transferring of sovereignty from Nederland to Federal Republic of Indonesia. In the Round Table Conference, Mohammad Hatta was the leader of Indonesian delegation to receive the transferring of sovereignty from Nederland. Hatta's struggle could not be aparted from his cooperation with some leaders both from Indonesia and foreign country. The leaders from Indonesia among others were Soekarno and Syahrir, whereas from foreign country among others were Nehru and the members of Committee of Good Offices. The most important role of Mohammad Hatta was in the moment of independence proclamation and transferring of sovereignty .

In the struggle to achieve independence and sovereignty, Indonesia due to the strong struggle and the important role. However, Indonesia could achieve the independence and the sovereignty again because of the struggle leader effort. In the case, the role of Hatta's Cabinet was very important. In the Hatta's Cabinet, Hatta was as the Prime Minister. In the beginning of the formation of Hatta's Cabinet, this cabinet had a duty to hold Renville agreement.

Renville agreement did not success. Hence, there was reconference between Indonesia and Nederland. It was called Roem-Royen conference. One of result of this conference was carrying out Round Table Conference in Den Haag to accelerate transferring of sovereignty without any compensation, obviously and completely. In the Round Table Conference, Mohammad Hatta was the leader of Federal Republic of Indonesia. He represented Indonesia in receiving sovereignty because he was the leader of Federal Republic of Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin selesai jika tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

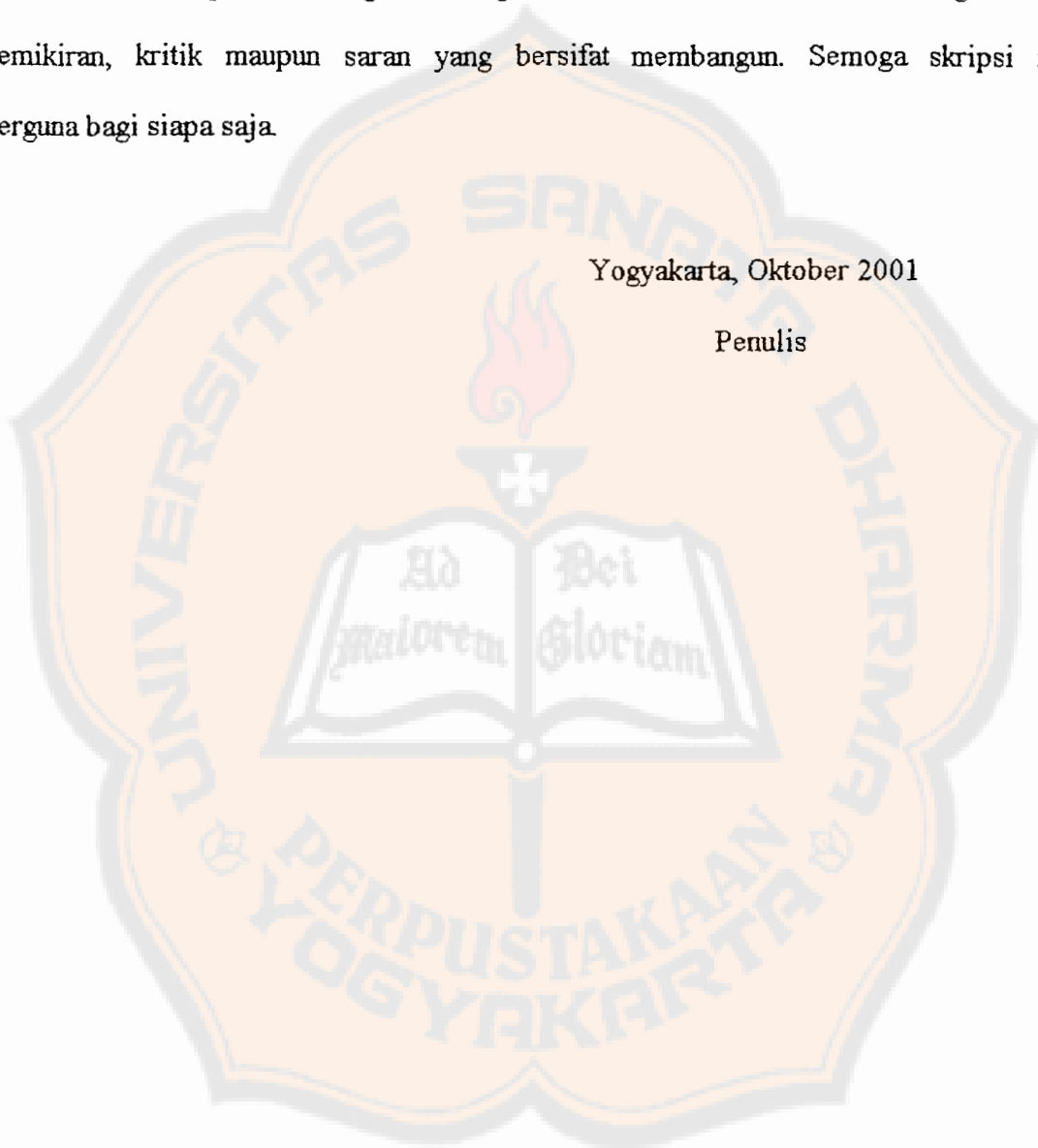
1. Kepala Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
2. Kepala Program Studi Pendidikan Sejarah.
3. Bapak Drs. G. Moedjanto M.A., selaku pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto, selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
5. Kepala Perpustakaan Wilayah Yogyakarta yang telah bersedia memberikan pelayanan dan peminjaman buku-buku yang diperlukan.
6. Staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang telah banyak memberikan pelayanan peminjaman buku-buku yang diperlukan penulis bagi penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati bersedia menerima sumbangan baik pemikiran, kritik maupun saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini berguna bagi siapa saja.

Yogyakarta, Oktober 2001

Penulis



DAFTAR ISI



	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Landasan Teori dan Pendekatan	12
F. Tinjauan Sumber.....	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II POSISI MOHAMMAD HATTA MASA 1945-1949.....	19
A. Posisi Mohammad Hatta masa 1945-1948.....	19
B. Posisi Mohammad Hatta masa 1948-1949	33
BAB III BENTUK PERJUANGAN MOHAMMAD HATTA.....	51
A. Kerjasama Hatta dengan Tokoh-Tokoh Dalam Negeri.....	51
1. Kerjasama Hatta dengan Soekarno.....	52
2. Kerjasama Hatta dengan Sutan Syahrir	62

B. Kerjasama Hatta dengan tokoh-tokoh luar negeri	67
1. Kerjasama Hatta dengan Nehru.....	67
2. Kerjasama Hatta dengan Anggota Komisi Jasa-Jasa Baik	71
BAB IV PERANAN MOHAMMAD HATTA SEKITAR PERSETUJUAN	
RENVILLE HINGGA PENYERAHAN KEDAULATAN RIS	77
A. Peranan Hatta dalam pelaksanaan Persetujuan Renville	77
B. Peranan Hatta dalam Penerimaan Penyerahan dan Pengakuan	
Kedaulatan RIS	83
BAB V SIMPULAN.....	93
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	
GLOSARRY	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mohammad Hatta merupakan salah satu tokoh, pejuang, pahlawan, pemikir, dan Bapak rakyat Indonesia. Mohammad Hatta lahir di Batuampar, Bukittinggi, Sumatra Barat, pada tanggal 12 Agustus 1902. Mohammad Hatta mula-mula bernama Mohammad Athar. Athar artinya harum. Panggilan sehari-harinya adalah Atta, yang kemudian berkembang menjadi sebuah nama baru, yaitu Hatta.¹ Sejak kecil Mohammad Hatta mempunyai sifat tertib, rajin, hemat, dan disiplin.

Mohammad Hatta masuk sekolah dasar di Bukittinggi yaitu *Europese Lagere School* (ELS) atau Sekolah Rendah Eropa tahun 1913. Tahun 1916 Mohammad Hatta melanjutkan ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) atau sekolah lanjutan setingkat SMP di Padang. Setelah lulus dari MULO, tahun 1919 Mohammad Hatta melanjutkan ke *Prins Hendrik School* (PHS) atau Sekolah Menengah Dagang di Jakarta. Pada tahun 1921 Mohammad Hatta melanjutkan ke *Nederlandsche Handels Hogeschool* di Rotterdam dan pada tahun 1932 Mohammad Hatta berhasil menyelesaikan studinya. Waktu belajar yang lama, yang disertai aktifitas politik tidak merugikan baginya. Dia memperoleh basis teori yang lebih kukuh dan peninjauan politik yang berdasarkan pengetahuan. Semuanya itu merupakan pengalaman yang berharga baginya untuk melakukan

¹Ny. Lembag Tuah, Hatta : Adik dan Kenangan, dalam *Bung Hatta Pribadinya Dalam Kenangan*, Sinar Harapan dan Universitas Indonesia : Jakarta, 1980, hlm. 5.

kewajiban terhadap tanah air dan bangsanya dikemudian hari.² Mohammad Hatta selain aktif dalam studi, juga aktif dalam organisasi politik. Organisasi yang pernah ia ikuti antara lain *Jong Sumatranen Bond* (JSB). Dalam organisasi ini ia menjadi bendahara.³ Pada masa studi di Belanda, Mohammad Hatta juga aktif dalam organisasi politik *Indische Vereniging* atau Perhimpunan Indonesia (PI). Dalam organisasi ini mula-mula Mohammad Hatta menjadi bendahara, kemudian tahun 1926 menjadi ketua. Dalam organisasi ini Mohammad Hatta berusaha menyatukan para mahasiswa yang ada di Negeri Belanda dengan maksud menyadarkan mereka secara politis untuk kemerdekaan Indonesia.

Kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh Mohammad Hatta terutama bertujuan untuk kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Belanda menganggap kegiatan-kegiatan ini membahayakan mereka. Oleh karena itu Mohammad Hatta sering ditangkap oleh pemerintah Belanda. Pada masa studi di Belanda Mohammad Hatta pernah dipenjarakan di Negeri Belanda karena perjuangannya dalam organisasi politik itu menentang penjajahan. Dia memimpin Perhimpunan Indonesia berjuang menentang imperialisme di jantung imperialisme itu sendiri di Eropa. Pada tahun 1934 – 1935 Mohammad Hatta dipenjarakan oleh pemerintah Belanda dan pada tahun 1935 – 1936 dibuang ke Boven Digul, Irian Jaya. Pada tahun 1936 – 1942 dipindahkan ke Bandaneira, Maluku dan pada bulan Februari 1942 dipindahkan ke Sukabumi. Pada tanggal 9 Maret 1942 Hatta

²Hadji Subagijo I.N., Bung Hatta Kita, dalam *Bung Hatta Mengabdikan pada Tjita-tjita Perdjongan Bangsa*, Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70 : Jakarta, 1972, hlm. 17.

³ Mohammad Hatta, *Memoir*, Tintamas Indonesia : Jakarta, 1978, hlm. 49.

dibebaskan oleh pemerintah Jepang karena pada tahun 1942 Belanda menyerah kepada Jepang.

Mohammad Hatta yang populer dengan sebutan Bung Hatta terkenal sebagai orang yang teguh dalam sikap, mempunyai prinsip dan mempunyai pendirian yang tegas. Kekerasan pendiriannya kelihatan sejak masa muda. Ketegasan pendirian Bung Hatta juga kelihatan ketika dilangsungkan perundingan antara Indonesia dengan Belanda pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Bung Hatta berpendirian, penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia sangat penting. Dengan pengakuan kedaulatan tersebut, negara-negara lain diseluruh dunia akan dapat mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dengan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan, kedudukan Indonesia sebagai negara di dunia internasional pasti menjadi lebih kuat. Hal ini juga ditegaskannya atas nama delegasi kepada pihak BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg* atau Badan Permusyawaratan Federal) kalau Indonesia bersatu termasuk BFO sendiri, pasti akan lebih kuat. Pihak BFO kemudian dapat menyetujui pendirian Bung Hatta tersebut.⁴

Pada masa penjajahan Jepang, Mohammad Hatta menjadi pemimpin PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) bersama Ir. Soekarno, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mansyur. Mereka dikenal sebagai empat serangkai. Organisasi PUTERA ini merupakan sebuah wadah untuk menggembeleng para pemuda dengan faham nasionalisme. Organisasi ini pulalah yang mengalahkan pergerakan Jepang yang dikenal dengan Gerakan Tiga A (Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia,

⁴ Yayasan Idayu, *Bung Hatta Kita*, Yayasan Idayu : Jakarta, 1980, hlm. 33 – 34.

Nippon Cahaya Asia). Gerakan Tiga A ini akhirnya lenyap karena tidak mendapat dukungan dari para pemimpin atau tokoh-tokoh RI.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Mohammad Hatta bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, dengan Soekarno sebagai Presiden.

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan atas RI, yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda Pertama. Hal ini membuat berbagai pihak melakukan reaksi. Akhirnya Komisi Tiga Negara (KTN) dapat mempertemukan wakil-wakil Belanda dan RI pada tanggal 8 Desember 1947 di sebuah Kapal AS, Renville, yang berlabuh di Tanjung Priok.⁵ Dalam pertemuan tersebut akhirnya dapat dicapai suatu persetujuan yang dikenal dengan Persetujuan Renville. Ketika diadakan Persetujuan Renville, kabinet yang berkuasa di RI adalah kabinet Amir Syarifuddin. Persetujuan Renville pada dasarnya sangat merugikan pihak RI. Hal itu dikarenakan daerah-daerah yang diduduki Belanda adalah daerah-daerah yang kaya. RI juga akan menjadi salah satu anggota Uni. Selain itu RI harus mengakui garis demarkasi ciptaan Van Mook, yang dikenal dengan Garis Demarkasi Van Mook. Pada awalnya pihak RI menolak persetujuan itu. Akan tetapi berdasarkan laporan dari berbagai panglima tentara kepada Presiden Soekarno yang menyatakan bahwa persediaan amunisi menipis, serta adanya kepastian bahwa penolakan berarti serangan baru dari pihak Belanda secara lebih hebat, dan keterangan KTN bahwa itulah maksimum yang dapat

⁵ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2*, Kanisius : Yogyakarta, 1988, hlm. 19.

dibuatnya dan tidak ada jaminan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menolong, menyebabkan pemimpin-pemimpin RI menerima Persetujuan Renville.⁶

Selain itu pemerintah memperhitungkan bahwa persetujuan yang diadakan di bawah pengawasan KTN sebagai mata dunia internasional, akan terus melibatkan PBB dalam kelanjutan perjuangan RI. Dengan demikian cepat atau lambat dunia akan menyadari bahwa aspirasi nasional yang diperjuangkan RI sesungguhnya adalah aspirasi seluruh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kalau RI menolak, maka RI dianggap kurang menghargai jasa-jasa yang diberikan DK-PBB, sedangkan kalau RI menerimanya, dunia internasional akan tetap menaruh simpati kepadanya.⁷ RI Menerima persetujuan tersebut juga dengan pertimbangan bahwa masih ada kesempatan yang lebih baik untuk membina kembali kekuatan militernya dan timbulnya simpati dunia yang makin besar karena RI bersedia menerima petunjuk-petunjuk KTN yang mewakili PBB serta selalu menunjukkan sikapnya yang cinta damai. Persetujuan Renville ditandatangani pada tanggal 17 dan 19 Januari 1948.⁸

Penerimaan Persetujuan Renville mengakibatkan terjadinya krisis kabinet. Partai Masyumi dan PNI menarik dukungan mereka terhadap Kabinet Amir, begitu juga Syahrir. Bahkan ada kritikan Kabinet Amir dituduh telah menjual RI kepada Belanda dan menjual kekayaan alam RI. Hal ini disebabkan daerah-daerah yang diduduki Belanda menurut Persetujuan Renville adalah daerah-daerah yang

⁶ Ibid, hlm. 22.

⁷ K.M.L. Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, Gunung Agung : Jakarta, 1986, hlm. 33.

⁸ Ibid, hlm. 36 dan 42.

kaya. RI akan menjadi negara bagian dari suatu Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk oleh Belanda. Negara Indonesia serikat akan turut dalam suatu uni dengan Belanda yang akan dikepalai oleh Ratu Belanda.⁹ Adanya krisis kabinet menyebabkan Amir beserta kabinetnya mengembalikan mandat kepada presiden pada tanggal 23 Januari 1948.¹⁰

Setelah Kabinet Amir mengembalikan mandat, RI merasa segera perlu suatu pemerintahan yang kuat untuk melaksanakan Persetujuan Renville. Hal ini juga disebabkan situasi yang dihadapi sangat sulit berhubungan dengan pertikaian melawan Belanda maupun hal lain dalam ketentaraan. Oleh karena itu kabinet baru perlu segera dibentuk.

Pembentukan suatu kabinet presidensiil yang bersifat nasional dan mencakup semua partai, merupakan satu-satunya jalan yang cepat untuk menciptakan pimpinan kuat yang dibutuhkan. Oleh karena itu setelah Amir mengembalikan mandat, Presiden Soekarno menunjuk Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden yang berdiri di luar partai untuk membentuk suatu kabinet presidensiil. Hatta berusaha membentuk suatu "Pemerintah Nasional" yang mengikut sertakan semua partai besar.¹¹ Kabinet yang dibentuk Hatta dikenal dengan Kabinet Hatta. Kabinet Hatta dibentuk pada tanggal 29 Januari 1948 dengan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Kabinet Hatta inilah yang akan melaksanakan Persetujuan Renville, hingga penyerahan kedaulatan RI dalam Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949.

⁹ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, LP3ES : Jakarta, 1990, hlm. 309.

¹⁰ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 23.

¹¹ George McT. Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (Terjemahan)*, UNS Press-Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 291-292.

Dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Mohammad Hatta, terlihat jelas bahwa Mohammad Hatta adalah seorang nasionalis, bahkan seorang nasionalis yang besar dan seorang patriot yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk pergerakan nasional di Indonesia.¹² Perjuangannya yang bertujuan mencapai kemerdekaan dan kedaulatan RI akhirnya dapat terwujud, walaupun mengalami berbagai hambatan dan tantangan Bung Hatta adalah seorang nasionalis, yang berjuang untuk menegakkan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia dengan suatu sikap perjuangan yang khas dan membentuk satu ciri tertentu pada semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaannya.¹³

Selama perang kemerdekaan, seluruh tenaga dan pikirannya terlibat dalam memenangkan perjuangan melawan Belanda. Dalam rangka itu, ia pernah ke India dengan menyamar sebagai *co-pilot* dengan nama samaran Abdullah. Di India, Bung Hatta berbicara dengan Nehru dan Gandhi.¹⁴

Selain itu, Bung Hatta adalah seorang pejuang revolusioner karena sejak mudanya ia telah berjuang menentang imperialisme dan kolonialisme. Hal ini dibuktikan dengan duduknya dia sebagai wakil Indonesia dalam Kongres Liga Anti Imperialisme dan Anti Kolonialisme di Berlin dari tahun 1927 – 1931. Bung Hatta juga seorang demokrat. Dalam masa sesudah kemerdekaan dia berjuang

¹² Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*, Sinar Harapan : Jakarta, 1983, hlm. 346.

¹³ Dialog, Demokrasi tidak akan lenyap dari Indonesia, dalam *Bung Hatta Kita*, Yayasan Idayu : Jakarta, 1980, hlm. 26.

¹⁴ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 306.

dengan teguh untuk menegakkan demokrasi politik dan ekonomi dalam kehidupan bangsanya.¹⁵

Kepemimpinan Bung Hatta adalah kepemimpinan otak, kepemimpinan watak dan kepemimpinan akhlak. Bung Hatta mempunyai persepsi yang teguh mengenai strategi kebangsaan. Sebagai seorang pemikir yang intelegen dan sebagai seorang intelegensia yang berfikir cermat dan akurat. Hubungan Bung Hatta dengan Bung Karno adalah hubungan kedwitunggalan kepemimpinan politik, intelek dan pengabdian yang tidak ada taranya, yang sangat dibutuhkan bangsa Indonesia dalam perjuangan untuk menjebol dan membangun, menjebol feodalisme dan kolonialisme pada masa penjajahan dan membangun kemerdekaan, harga diri, cita-cita adil dan makmur sebagai konsekuensi Proklamasi 17 Agustus 1945.¹⁶

Dalam sejarah kepemimpinan nasional, dalam sejarah nasional bangsa kita, Bung Hatta jelas adalah orang kedua dan partner Bung Karno dalam perjuangan kemerdekaan dan kepemimpinan revolusi 1945. Oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ada sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan para tokoh dan pahlawan kita, terutama Mohammad Hatta. Salah satu wujud untuk mengenang jasa-jasa Mohammad Hatta, khususnya dalam bidang pendidikan adalah didirikannya perpustakaan Hatta. Perpustakaan itu ada di Bukittinggi, Sumatra Barat dan Yogyakarta.

Bertolak dari latar belakang pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perjuangan Mohammad Hatta dalam

¹⁵ Merdeka, Bung Hatta Pemimpin Teladan, dalam *Bung Hatta Kita*, Yayasan Idayu : Jakarta, 1980, hlm. 120.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 121.

melakukan penelitian tentang perjuangan Mohammad Hatta dalam menegakkan perjuangan Indonesia 1945 – 1949. Mohammad Hatta sebagai salah satu tokoh atau pahlawan dalam perjuangan Kemerdekaan RI sangat berperan dalam mewujudkan NKRI. Salah satu hal penting yang dilakukan oleh Mohammad Hatta adalah dalam KMB di Den Haag. Mohammad Hatta sebagai ketua delegasi RI. Dari KMB ini Mohammad Hatta menerima penyerahan kedaulatan RI dari Ratu Juliana.

Selain itu belum ada tulisan secara khusus tentang perjuangan Mohammad Hatta dalam menegakkan perjuangan Indonesia 1945 – 1949, sehingga tulisan ini dapat dijadikan pertimbangan atau masukan tentang peranan Mohammad Hatta. Sumber-sumber atau data-data tentang perjuangan Mohammad Hatta dalam menegakkan perjuangan Indonesia 1945 – 1949 ini cukup banyak dan mudah diperoleh. Sumber-sumber tersebut juga sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami.

Rentang waktu antara 1945 – 1949 dipilih penulis karena pada tahun 1945 terjadi peristiwa-peristiwa penting antara lain Proklamasi Kemerdekaan. Dalam peristiwa ini Mohammad Hatta bersama Soekarno sangat berperan. Pada tahun 1948 Kabinet Hatta dibentuk. Kabinet Hatta merupakan pelaksana Persetujuan Renville. Akan tetapi banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Persetujuan Renville, baik dari pihak Belanda maupun RI. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut mengakibatkan Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua, yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda Kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Reaksi dunia atas penyerangan Belanda tersebut luar biasa. Pada

terhadap RI yang kedua kalinya. Oleh karena itu DK-PBB berusaha mengeluarkan resolusi-resolusi. Akan tetapi Belanda tidak segera melaksanakan resolusi-resolusi tersebut karena Belanda yakin RI akan hancur. Untuk membuktikan bahwa RI masih ada dan TNI masih kuat, maka pada tanggal 1 Maret 1949 RI mengadakan penyerangan terhadap Belanda. Penyerangan tersebut berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Serangan itu dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949.

Serangan Umum yang merupakan kemenangan politis tersebut mampu membuka mata dunia internasional dan membuktikan omong kosong Belanda tentang kehancuran RI. Oleh karena itu Amerika Serikat semakin tegas terhadap Belanda. Atas ketegasan Amerika Serikat itu maka pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan kembali antara RI dengan Belanda. RI diwakili oleh Mohammad Roem, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Royen. Perundingan itu dikenal dengan perundingan Roem-Royen. Salah satu hasil atau ketentuan persetujuan Roem-Royen adalah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.

Dalam KMB delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen, sedangkan delegasi RI dipimpin oleh Mohammad Hatta. KMB menghasilkan naskah-naskah persetujuan yang pada pokoknya terdiri dari dua bagian, yaitu induk persetujuan dan anak persetujuan. Ketentuan yang paling penting dari persetujuan KMB adalah Piagam Penyerahan Kedaulatan yang oleh RI diartikan Piagam Pengakuan Kedaulatan. Penyerahan atau pengakuan Kedaulatan atas RI terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam penulisan ini penulis akan menguraikan perjuangan Mohammad Hatta dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945

hingga penyerahan Kedaulatan RI. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini memilih rentang waktu antara tahun 1945-1949.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas untuk mengetahui lebih jelas tentang perjuangan Mohammad Hatta dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia 1945 – 1949. Permasalahan-permasalahan tersebut yaitu :

1. Bagaimana posisi Mohammad Hatta pada masa 1945-1948 dan masa 1948-1949 ?
2. Bagaimana bentuk perjuangan Mohammad Hatta ?
3. Apa peranan Mohammad Hatta sekitar persetujuan Renville hingga penyerahan kedaulatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan posisi Mohammad Hatta pada masa 1945-1948 dan masa 1948-1949.
2. Menjelaskan bentuk perjuangan Mohammad Hatta.
3. Menjelaskan peranan Mohammad Hatta sekitar persetujuan Renville hingga penyerahan kedaulatan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat berguna untuk menambah informasi tentang peranan Mohammad Hatta sekitar persetujuan Renville hingga penyerahan kedaulatan.
2. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan tentang peranan Mohammad Hatta.
3. Bagi mahasiswa sejarah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan tentang perjuangan Mohammad Hatta dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia.

E. Landasan Teori dan Pendekatan

Sebelum masuk pada pembahasan permasalahan, perlu dijelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep-konsep tersebut adalah Persetujuan Renville, perjuangan, kemerdekaan dan kedaulatan. Penjelasan beberapa konsep tersebut penting karena merupakan landasan berpikir dan sebagai pembatasan masalah.

Persetujuan Renville adalah persetujuan yang diadakan antara Belanda dengan RI di atas kapal AS bernama Renville. Persetujuan Renville diadakan untuk mendamaikan Belanda dengan RI yang sedang bersengketa. Persetujuan Renville diadakan di atas Kapal AS, Renville karena bebas dari kekuasaan kedua belah pihak dan kapal itu merupakan daerah atau wilayah AS sehingga dianggap netral.

Konsep perjuangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya untuk merebut sesuatu.¹⁷ Dalam hal ini perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan kedaulatan. Berjuang menurut Mohammad Hatta adalah menegakkan paham kebangsaan, dalam hubungan itu persatuan bangsa sebagai dasar perjuangan bangsa. Hal ini dimaksudkan bahwa harus ada satu semangat, satu prinsip batin dan persamaan bersama yang memungkinkan kepentingan kelompok disubkoordinasikan, bukan dilenyapkan.

Konsep kemerdekaan adalah keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah. Perjuangan yang dilakukan oleh Mohammad Hatta terutama bertujuan ke arah kemerdekaan RI. Merdeka dalam segala bidang kehidupan, tidak terikat oleh negara lain atau di bawah kekuasaan negara lain, bebas menentukan nasib sendiri dan mempunyai sistem pemerintahan sendiri atau berdaulat. Konsep Hatta tentang kemerdekaan bagi Indonesia harus menjamin partisipasi rakyat dalam pemerintahan negerinya sendiri. Kemerdekaan harus tidak melahirkan suatu bangsa yang mayoritas rakyatnya tidak memiliki kekuasaan seperti pada periode kolonial.¹⁸

Konsep kedaulatan adalah kemerdekaan suatu negara terhadap negara-negara lain. kedaulatan juga menjadi tujuan perjuangan RI, khususnya perjuangan yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Selain memperjuangkan kemerdekaan, RI juga menginginkan pemerintahan sendiri dan menentukan nasib sendiri.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik. Perjuangan yang dilakukan oleh Mohammad Hatta terutama bertujuan untuk

¹⁷ Depdikbud, *op. cit.*, hlm. 367.

¹⁸ Mavis Rose, *Indonesia merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 1991, hlm. XV.

mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Perjuangan Mohammad Hatta bukan perjuangan dengan cara bersenjata, tetapi perjuangan dengan cara diplomasi dan dalam hal ini Hatta mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh dalam negeri maupun luar negeri, untuk mencapai tujuan tersebut. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Mohammad Hatta ini berkaitan dengan bidang politik, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik.

F. Tinjauan Sumber

Sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain atau alat mekanik seperti telepon dan lain-lain mengetahui suatu peristiwa. Sumber sekunder adalah kesaksian dari kesaksian orang lain.¹⁹

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis berupa buku-buku. Buku yang dijadikan sumber terutama buku yang berjudul Memoir karangan Mohammad Hatta. Buku tersebut menguraikan secara nyata pengalaman-pengalaman Bung Hatta. Buku tersebut dijadikan sumber oleh penulis karena buku tersebut dikarang oleh Mohammad Hatta sendiri, yang mengalami sendiri peristiwa-peristiwa selama beliau terlibat dalam perjuangan kemerdekaan RI. Dengan demikian buku tersebut dapat dipercaya (*credible*). Selain itu buku yang digunakan sebagai sumber adalah buku yang berjudul Renville karangan Ide Anak Agung Gde Agung. Buku tersebut dijadikan sumber

¹⁹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah (Terjemahan Nugroho Notosusanto)*, UI Press : Jakarta, 1986, hlm. 35.

dalam penelitian ini karena Ide Anak Agung Gde Agung sendiri sebagai pengarangnya secara langsung ikut terlibat dalam Persetujuan Renville sampai KMB. Dengan demikian buku ini juga dapat dipercaya. Buku berjudul Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville oleh K.M.L Tobing juga menjadi sumber dalam penelitian ini. Buku tersebut menguraikan peristiwa-peristiwa dan proses selama Persetujuan Renville diadakan sampai KMB (penyerahan kedaulatan RI), sehingga buku ini sangat penting untuk membantu penelitian ini.

Selain sumber-sumber di atas, ada sumber pendukung dalam penelitian ini. Sumber pendukung tersebut antara lain buku yang berjudul Indonesia Abad ke-20 jilid 2 oleh G. Moedjanto. Buku tersebut antara lain menguraikan perang kemerdekaan pertama. (Agresi Militer Belanda I) sampai terbentuknya kembali NKRI. Buku yang berjudul Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia Oleh George Mc. Turnan Kahin juga dijadikan sumber pendukung dalam penelitian ini. Buku tersebut antara lain menguraikan pemerintahan Kabinet Hatta dan peranannya dalam pelaksanaan Persetujuan Renville sampai KMB (penyerahan kedaulatan RI). Buku ini merupakan disertasi Kahin yang disusun dengan terjun langsung menyaksikan revolusi Indonesia sampai pengakuan kedaulatan RI, bahkan sampai berdirinya NKRI dan terwujudnya cita-cita gerakan nasionalisme. Oleh karena itu karya George Kahin ini tidak hanya unggul sebagai karya ilmiah mengenai gerakan nasional kita yang terinci, komprehensif dan obyektif, tetapi juga merupakan kesaksian hidup dari sejarah revolusi kita. Selain itu buku yang berjudul Mohammad Hatta Biografi Politik oleh Deliar Noer dan buku Indonesia

Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta oleh Mavis Rose juga menjadi sumber pendukung dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu tulisan sejarah, seorang penulis sejarah harus menggunakan metode sejarah. Metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.²⁰ Dalam penulisan ini penulis dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dikatakan oleh Sartono Kartodirdjo, "Dalam pemilihan bahannya ahli sejarah tidak mungkin tanpa dipengaruhi oleh diri pribadinya, politik, kebangsaan, agama maupun kebudayaannya."²¹

Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam penelitian ini berdasarkan langkah-langkah dalam metode-metode analisa sejarah. Langkah-langkah yang ditempuh berdasarkan metode-metode analisa sejarah tersebut adalah sebagai berikut:²²

1. Penulisan subyek untuk diteliti.
2. Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subyek tersebut.
3. Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati tidaknya.
4. Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya.
5. Historiografi (penulisan).

²⁰ *Ibid*, hlm. 32.

²¹ Sartono Kartodirdjo, *Ungkapan-Ungkapan Filsafat Barat dan Timur*, Gramedia : Jakarta, 1986, hlm. 7

²² Louis Gottschalk, *op. cit.*, hlm. 34.

Penelitian ini menggunakan model penulisan deskriptif analitis. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan dianalisis, sehingga dapat dijadikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Cara untuk mendapatkan sumber dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan berbagai literatur yang sesuai dengan topik, yang ada di perpustakaan.

H. Sistematika Penulisan

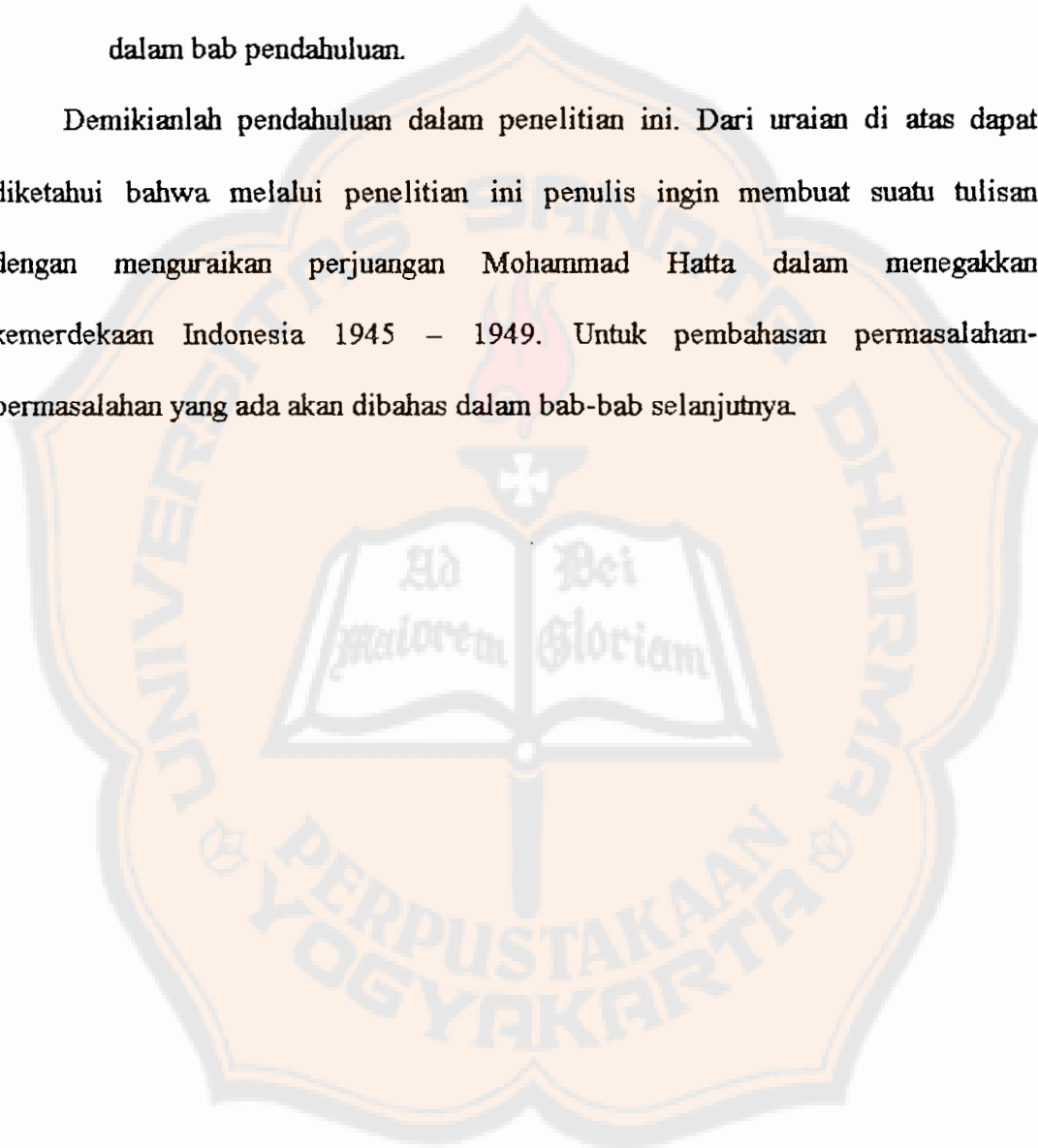
Penelitian tentang "Perjuangan Mohammad Hatta dalam menegakkan Kemerdekaan Indonesia 1945 – 1949" ini terdiri dari 5 bab:

- Bab I berupa pendahuluan, memuat latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori dan pendekatan, tinjauan sumber, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II berupa penjelasan posisi Mohammad Hatta, yang memuat posisi Mohammad Hatta pada masa 1945-1948 dan posisi Mohammad Hatta masa 1948-1949.
- Bab III berupa penjelasan bentuk perjuangan Mohammad Hatta, memuat kerjasama Mohammad Hatta dengan tokoh-tokoh RI dan tokoh-tokoh luar negeri.
- Bab IV berupa penjelasan peranan Mohammad Hatta sekitar persetujuan Renville hingga penyerahan kedaulatan, yang memuat peranan Hatta dalam pelaksanaan persetujuan Renville dan peranan Hatta dalam

penerimaan penyerahan kedaulatan RIS.

Bab V Simpulan, berisi jawaban-jawaban permasalahan-permasalahan yang ada dalam bab pendahuluan.

Demikianlah pendahuluan dalam penelitian ini. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa melalui penelitian ini penulis ingin membuat suatu tulisan dengan menguraikan perjuangan Mohammad Hatta dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia 1945 – 1949. Untuk pembahasan permasalahan-permasalahan yang ada akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.



BAB II

POSISI MOHAMMAD HATTA MASA 1945 – 1949

Peranan Mohammad Hatta terhadap Republik Indonesia sebenarnya banyak. Akan tetapi dalam penulisan ini penulis membatasi kurun waktu tentang peranan Mohammad Hatta terhadap RI. Penulis dalam hal ini akan membahas posisi Mohammad Hatta pada masa 1945–1948 dan posisi Mohammad Hatta pada masa 1948–1949. Penulis dalam bab ini akan membahas kurun waktu tersebut karena dalam kurun waktu tersebut banyak terjadi peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain: masa-masa menjelang proklamasi kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, perang kemerdekaan pertama (Agresi Militer Belanda I), perang kemerdekaan kedua (Agresi Militer Belanda II) dan penyerahan atau pengakuan kedaulatan RI dalam Konferensi Meja Bundar.

A. Posisi Mohammad Hatta Masa 1945 – 1948

Pada bagian ini akan sedikit diuraikan politik Hatta pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942–1945. Pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah pada tentara Jepang di Kalijati. Dengan demikian mulai tahun 1942, RI dikuasai oleh tentara Jepang. Dengan dikuasainya Indonesia oleh tentara Jepang, maka Indonesia mengalami kembali kekuasaan asing. Perbedaannya hanyalah bahwa penguasa RI yang baru ini berasal dari Timur, sedangkan penguasa RI yang lama yaitu Belanda berasal dari Barat. Hatta menegaskan bahwa ia menolak

RI yang lama yaitu Belanda berasal dari Barat. Hatta menegaskan bahwa ia menolak Jepang karena ia menolak pemerintahan fasis.¹

Pada masa pendudukan Jepang, Bung Hatta diajak oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk bekerjasama menghadapi perang Pasifik. Pada awalnya Hatta tidak mau mengadakan kerjasama dengan Jepang karena perang Pasifik adalah perang antara tentara Jepang dengan Belanda. Akan tetapi berdasarkan ramalannya bahwa perang Pasifik mau tidak mau akan melibatkan Indonesia dan menjadi faktor yang menentukan dalam menghancurkan kekuasaan kolonial Barat, maka Hatta kemudian masuk dalam sebuah kelompok orang Indonesia yang "siap bekerjasama dengan rezim Jepang karena mereka beranggapan bahwa tidak rasional kalau menentangnya". Hatta menyarankan kepada kaum nasionalis supaya menuntut kemerdekaan segera sejak awal pendudukan Jepang.² Selain alasan tersebut, Hatta juga mempertimbangkan bahwa jika Indonesia tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Jepang, maka keadaan rakyat Indonesia akan semakin menderita karena berhadapan dengan pemerintahan yang memang dari semula berniat mengeksploitasi negeri ini untuk maksud membantu perang mereka. Ditambah lagi pemerintahan Jepang adalah pemerintahan fasis.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hatta tidak dapat menolak ajakan kerjasama pemerintah Jepang ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942 dari Jenderal Ter Poorten kepada jenderal Hitoshi Imamura. Akan tetapi kerjasama tersebut tetap bertujuan untuk Indonesia merdeka, walaupun

¹ Mavis Rose, *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1991, hlm. 155.

² *Ibid*, hlm. 155-156.

sulit untuk melaksanakannya karena di satu pihak Hatta harus memihak Jepang tetapi di pihak lain tetap melaksanakan perjuangan Indonesia untuk satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Akan tetapi Hatta tetap memfokuskan pada perjuangan pokok yaitu Indonesia merdeka.

Hatta yakin bahwa Jepang akan kalah dalam perang pasifik. Oleh karena itu kesempatan kerjasama perlu dipergunakan untuk menyusun kekuatan rakyat. Dengan kerjasama ini ia dan para pemimpin pergerakan nasional lain dapat berusaha meringankan beban penderitaan rakyat. Selain itu ia juga menduga bahwa peperangan tidak akan sampai ke Jawa, dalam pengertian bahwa pihak Sekutu tidak perlu berperang di Jawa untuk menundukkan Jepang. Menurut Hatta akan lebih cepat jika Sekutu dengan pangkalan tertentu langsung menyerang Jepang. Dengan penyerangan Jepang ini, otomatis daerah-daerah kekuasaan Jepang akan terlepas. Oleh karena itu Hatta kemudian berturut-turut menjadi penasihat pemerintah militer Jepang (1942) dan pemimpin Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) bersama Ir. Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mansyur yang dikenal Empat Serangkai (1942 – 1943). Selain itu Hatta juga menjadi salah seorang pemimpin Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa (Jawa Hokokai, 1943 – 1945). Pada tahun 1943 – 1944 menjadi wakil ketua Dewan Pertimbangan Pusat dan pada tahun 1944 – 1945 menjadi Penasihat Departemen Perekonomian merangkap Ketua Dewan Penasihat-Penasihat.³

Perdana Menteri Jepang ketika menguasai Indonesia adalah PM. Tojo. Pada tanggal 29 April 1942 Jepang membentuk pergerakan "Tiga A" yang bertujuan untuk menghapus pengaruh-pengaruh dari Barat yang telah merusak "jiwa Timur" dan

³ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, LP3ES : Jakarta, 1990, hlm. 186.

untuk meyakinkan penduduk tentang "Asia untuk Bangsa Asia" di bawah pimpinan Jepang. Tujuan utama pergerakan ini adalah agar bangsa Indonesia membantu usaha Jepang dalam memenangkan perang dan dalam membangun Asia Timur Raya di bawah pimpinan Jepang. Tujuan ini tercermin dalam slogan "Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia" (Tiga A).⁴ Akan tetapi pergerakan ini tidak mendapat sambutan dari kalangan pemimpin utama pergerakan, sehingga akhirnya pergerakan Tiga A ini lenyap. Pada bulan Maret 1943 dibentuk PUTERA sebagai pengganti Gerakan Tiga A. PUTERA dipimpin oleh empat serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mansyur. Untuk melanjutkan tugasnya, mereka harus seringkali berpidato atau berhubungan dengan rakyat. Dalam setiap kesempatan mereka berusaha menanamkan nasionalisme (semangat dan cinta kepada tanah air) kepada setiap pemuda ataupun orang Indonesia pada umumnya. Dipropagandakan agar rakyat berjuang sampai kemenangan terakhir tercapai. Kegiatan PUTERA lebih menguntungkan pejuang kemerdekaan daripada menguntungkan Jepang. Oleh karena itu PUTERA dibubarkan Jepang pada bulan Maret 1944.

Sanyo pada tiap-tiap Departemen. Mereka dianggap sebagai wakil ketua Departemen. Jabatan itu diadakan sebagai latihan untuk kelak menjadi menteri jika Indonesia dimerdekakan. Pada bulan Mei 1945 diadakan suatu panitia dengan nama Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketua panitia itu adalah Dr. Radjiman Wedyodiningrat.⁵ Pada tanggal 7 Agustus 1945 Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketuanya Ir. Soekarno, sedangkan Mohammad Hatta menjadi wakil ketua.⁶

Perang pasifik antara tentara Belanda (sekutu) dengan tentara Jepang memasuki suasana badai dan krisis berkepanjangan. Pasukan Sekutu bergerak cepat memperoleh kembali wilayah pendudukan. Mereka diperkirakan akan segera mendarat di Jawa. Kekalahan Jepang yang tak terhindarkan, sekalipun bukannya tidak disukai, tidak akan membawa kebebasan. Hal ini hanya akan menyebabkan kembalinya pendudukan Belanda atas Indonesia. Bagi Soekarno dan Hatta secara pribadi ada unsur bahaya tambahan.⁷

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Hal ini diketahui sebagian rakyat Indonesia melalui siaran-siaran luar negeri. Oleh karena itu Soekarno sebagai ketua PPKI mendapat desakan antara lain dari Syahrir dan golongan pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi Soekarno tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut. Hal itu dikarenakan ia terikat oleh organisasi yang diketuainya, yaitu PPKI, sehingga ia tidak dapat memutuskan sendiri

⁵ Mohammad Hatta, *Memoir*, Tintarnas Indonesia : Jakarta, 1978, hlm. 432.

⁶ *Ibid*, hlm. 434.

⁷ Mavis Rose, *op.cit.*, hlm 180.

tentang masalah ini. Atas sikap Soekarno ini, para pemuda yang antara lain dipelopori oleh Sukarni memutuskan untuk bertindak sendiri mengadakan revolusi dengan menyerbu kota pendudukan Jepang dan melucuti Jepang. Oleh karena itu terjadi peristiwa Rengasdengklok. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok dengan maksud untuk meneruskan pemerintahan disana jika revolusi terjadi.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang akan mengadakan rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi hari tidak jadi melaksanakannya karena peristiwa Rengasdengklok tersebut. Oleh karena itu rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari karena ternyata pemuda tidak jadi mengadakan revolusi. Rapat itu dilaksanakan di rumah Laksana Muda Maeda. Rapat tersebut dilaksanakan untuk membicarakan teks Proklamasi. Para pemuka Indonesia yang hadir dalam perumusan teks Proklamasi berkumpul dalam dua ruangan, yaitu "ruangan makan " dan "serambi depan". Mereka yang melakukan perumusan berkumpul di ruang makan. Mereka itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo. Ir. Soekarno yang menulis teks proklamasi. Bunyi teks proklamasi tersebut terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama berbunyi "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia". Kalimat ini merupakan kalimat yang dikutip oleh Mr. Subardjo dari Piagam Jakarta yang antara lain berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan". Drs. Mohammad Hatta kemudian menyempurnakan teks Proklamasi dengan kalimat kedua yang berbunyi "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-



singkatnya".⁸ Rapat yang dilaksanakan sampai pukul 03.00 dini hari itu menghasilkan sebuah teks proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno- Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia karena merekalah yang menjadi ketua dan wakil ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Perumusan teks proklamasi tersebut juga disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni, B.M Diah dan Sudiro.⁹

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi Proklamasi Kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno di jalan Pegangsaan Timur no 56 Jakarta. Bunyi teks Proklamasi Kemerdekaan tersebut adalah sebagai berikut :

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
KEMERDEKAAN INDONESIA

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-
singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945
Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno-Hatta

Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di jalan Pegangsaan Timur no 56 Jakarta tersebut diikuti dengan penaikan bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menandai masuknya bangsa Indonesia dalam jaman baru. Sementara itu Jepang yang secara *de facto* masih berkuasa di Yogyakarta tidak mau begitu saja mengakui kemerdekaan yang telah diproklamasikan, sehingga bentrok fisik sering terjadi. Masalah pengibaran bendera,

⁸ Nugroho Notosusanto (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia jilid IV*, Depdikbud, 1975, hlm. 28.

⁹ *Ibid*, hlm. 28.

pelucutan senjata dan pengambil alihan kantor-kantor pemerintahan maupun swasta sebagai penyebabnya.¹⁰

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang. Dalam sidang tersebut diputuskan beberapa keputusan, yaitu :¹¹

1. Mengesahkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) RI.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, dengan aklamasi Soekarno dipilih menjadi presiden dan Mohammad Hatta menjadi wakil presiden. Kedua pimpinan tersebut adalah tokoh-tokoh yang memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Presiden dan Wakil Presiden ini harus merupakan Dwitunggal.
3. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Oleh karena itu mulai tanggal 18 Agustus 1945 Mohammad Hatta menjadi wakil presiden RI yang pertama. Kedudukan Hatta sebagai wakil presiden erat kaitannya dengan kedudukan Soekarno sebagai presiden.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI menganggap kerjanya selesai dan membubarkan diri. Akan tetapi sebelum membubarkan diri, PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sejak KNIP dibentuk, Republik Indonesia Merdeka berjalan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Kabinet pertama yang melaksanakan pemerintahan adalah Kabinet Syahrir. Akan tetapi sejalan dengan

¹⁰ Budiharja (Ed.), *Buku Panduan Museum Benteng Yogyakarta*, Depdikbud Direktorat Jendral Kebudayaan : Yogyakarta, 1998, hlm. 13.

¹¹ H.A. Notosoetardjo, *Dokumen-dokumen KMB*, Pustaka dan Penerbit Endang : Jakarta, 1956, hlm. 11. Lihat juga *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, hlm. 29.

pemerintahan RI merdeka, pasukan sekutu datang ke Indonesia, untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia sesuai dengan perjanjian antara Inggris dengan Belanda selama perang. Oleh karena itu ketika Inggris datang ke Indonesia, mereka diboncengi oleh pemerintahan sipil Belanda yaitu NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*). Dengan demikian Jepang dan sekutu dengan Belanda (NICA)-nya akan menjadi lawan utama bangsa Indonesia dalam usaha mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.¹²

Mohammad Hatta sebagai wakil presiden juga melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan bersama-sama dengan presiden. Ketika Presiden Soekarno sedang melaksanakan tugas yang lain, Hatta sebagai wakil presiden menjalankan tugas-tugas tersebut. Tugas-tugas tersebut antara lain : Maklumat no X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat wakil presiden tanggal 3 November 1945 tentang partai politik.¹³

Pada tanggal 28 Oktober 1945 Mohammad Hatta sebagai wakil presiden bersama Soekarno dan Mr. Amir Syarifuddin sebagai Menteri Keamanan pergi ke Surabaya menyelesaikan persengketaan antara pemuda dan TKR dengan tentara Inggris. Masalah tersebut akhirnya dapat diatasi. Pada tanggal 7 November 1945 Belanda mulai berunding secara resmi dengan pemerintahan Republik Indonesia dibawah Jendral Christison. Perundingan itu kemudian diteruskan di Negeri Belanda di Hoge Veluwe. Akan tetapi perundingan itu gagal. Pihak Belanda tidak mau

¹² Radik Utoyo Sudirjo dan Tanu Suherly, *Lima Tahun Perang Kemerdekaan 1945-1949*, Badan Penerbit ALDA : Jakarta, 1976, hlm. 24.

¹³ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 283.

mengakui kekuasaan *de facto* Republik Indonesia atas Sumatra. Menurut mereka Indonesia harus menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Oleh karena itu perundingan di Hoge Veluwe itu gagal.¹⁴

Pada tanggal 4 Januari 1946 ibukota RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Jakarta tidak aman lagi. Presiden dan wakil presiden juga pindah ke Yogyakarta. Perpindahan ibukota ke Yogyakarta tersebut praktis menjadikan kota Yogyakarta menjadi pusat perjuangan.

Pada tanggal 3 Juli 1946 terjadi *coup* yang dipelopori oleh orang-orang yang menginginkan agar Kabinet Syahrir segera dibubarkan dan diganti dengan kabinet yang baru. Mereka merasa bahwa Kabinet Syahrir sudah tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugasnya dan mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia. Orang-orang yang menginginkan dibubarkannya Kabinet Syahrir tersebut antara lain : Tan Malaka dan Mayor Jendral Soedarsono (komandan Devisi III). Peristiwa tersebut diawali dengan penculikan Perdana Menteri Syahrir pada tanggal 27 Juni 1946.

Kelompok Tan Malaka menuduh pemerintahan Syahrir mengejar kebijakan yang terlalu menguntungkan Belanda. Dalam sebuah pamflet berjudul *Moeslihat*, kelompok Tan Malaka menyatakan bahwa perjuangan bersenjata lah yang harus dianut oleh pemerintahan Syahrir dan bukan diplomasi. Kelompok tersebut membentuk Persatuan Perjuangan dengan menekankan tujuan seratus persen merdeka yang akan dicapai melalui perjuangan, termasuk menyita seluruh milik musuh.¹⁵

¹⁴ Mohammd Hatta, *op. cit.*, hlm. 478-479.

¹⁵ Mavis Rose, *op. cit.*, hlm. 223.

Pada tanggal 3 Juli 1946 tersebut para tentara dibawah pimpinan Mayjend Soedarsono berangkat ke Yogyakarta untuk bertemu presiden dengan maksud untuk menyampaikan keinginan mereka. Akan tetapi yang diperbolehkan masuk hanya Mayjend Soedarsono. Presiden Soekarno kemudian memanggil Hatta untuk membantu menghadapinya. Mayjend Soedarsono menjelaskan maksud kedatangannya kepada presiden Soekarno bahwa ia diperintah oleh Panglima Besar Jendral Soedirman untuk menyampaikan surat. Isinya agar Kabinet Syahrir dibubarkan dan diganti dengan kabinet yang baru. Akan tetapi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta tidak mempercayai surat tersebut. Hatta kemudian mencoba menghubungi panglima besar Jendral Soedirman melalui telepon. Akan tetapi yang menerimanya Jendral Urip. Jendral Urip juga tidak percaya bahwa Jendral Soedirman menulis surat itu. Hal itu menguatkan pendapat Hatta dan Presiden Soekarno bahwa PB Jendral Soedirman tidak menulis surat yang dibawa Mayjend Soedarsono. Dengan kata lain surat yang dibawa Mayjend Soedarsono itu adalah surat palsu yang dipergunakan untuk mempengaruhi presiden agar mengabulkan keinginan orang-orang yang mengadakan *coup*. Oleh karena itu Mayjend Soedarsono segera ditangkap dan akhirnya peristiwa tersebut dapat diatasi. Peristiwa itu dikenal dengan Peristiwa 3 Juli 1946.¹⁶

Pada tanggal 7 Oktober 1946 dimulai perundingan antara Belanda dengan Indonesia. Delegasi Belanda dipimpin oleh Schemerhorn dan delegasi RI dipimpin oleh PM Syahrir, sedangkan Inggris sebagai penengah diwakili oleh Lord Killearn. Pada tanggal 11 November 1946 perundingan dialihkan ke Linggajati. Linggajati

¹⁶ Mohammad Hatta, *op. cit.*, hlm. 488.

adalah nama kota peristirahatan di dekat Cirebon yang terletak di gunung Cerme. Pada tanggal 15 November 1946 dicapai persetujuan yang dikenal dengan Persetujuan Linggajati.¹⁷ Dalam isi persetujuan Linggajati banyak terdapat ketidakjelasan sehingga dalam pelaksanaannya banyak juga yang tidak sesuai dengan isi persetujuan tersebut. Oleh karena itu dari kedua belah pihak muncul keluhan-keluhan, sehingga terjadi usulan-usulan yang saling berbalasan dari kedua belah pihak. Pada tanggal 27 Juni 1947 Kabinet Syahrir jatuh dan mengembalikan mandat kepada presiden. Oleh karena itu untuk sementara presiden mengambil oper kekuasaan karena keadaan genting.

Pada tanggal 3 Juli 1947 Kabinet Nasional dibentuk dengan perdana menterinya Amir Syarifuddin sehingga dikenal dengan Kabinet Amir. Kabinet Amir inilah yang akan meneruskan pelaksanaan persetujuan Linggajati. Akan tetapi dalam pelaksanaannyapun tidak segera dicapai kesepakatan dengan pihak Belanda. RI terus berusaha menyelesaikan persoalan dengan Belanda dengan jalan damai. Akan tetapi Belanda justru menganggap RI tidak bersedia mentaati persetujuan Linggajati. Oleh karena itu pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda menyerang daerah-daerah RI baik di Jawa maupun di Sumatra dengan seluruh kekuatannya. Penyerangan ini dikenal dengan Agresi Militer Belanda I. Dengan demikian tamatlah riwayat persetujuan Linggajati.¹⁸

¹⁷ K.L.M. Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, Gunung Agung : Jakarta 1986, hlm. VIII, menyebutkan Linggarjati (dengan r) ; Di Linggarjati telah dicapai *overall agreement* politik. Dengan demikian nama Linggarjati yang oleh pihak Inggris dan Belanda diucapkan Linggajati (tanpa r), jadi sering disebut secara lisan dan tulisan. Dalam buku Ide Anak Agung Gde Agung , *Persetujuan Linggajati Prolog dan Epilog*, Yayasan Pustaka Nusantara-UNS Press, 1995, disebutkan Linggajati (tanpa r).

¹⁸ G. Moedjarto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid I*, Kanisius : Yogyakarta, 1988, hlm. 23.

Penyerangan Belanda terhadap daerah-daerah RI tersebut membuat berbagai pihak melakukan reaksi. Pada tanggal 31 Juli 1947 India dan Australia mengajukan persoalan Indonesia dengan Belanda kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB). India dan Australia merupakan negara-negara pembela utama RI. Akan tetapi wakil Belanda Mr. Van Kleffens menolak hak DK-PBB mencampuri urusan Indonesia karena hal ini merupakan urusan intern negeri Belanda. Inggris dan Amerika Serikat pada dasarnya tidak setuju dengan aksi militer Belanda tersebut. Akan tetapi mereka ragu-ragu untuk turun tangan karena mereka masih teringat oleh anggapan bahwa apa yang terjadi di Indonesia adalah urusan dalam negeri Belanda.¹⁹

Pada tanggal 25 Agustus 1947 Amerika Serikat mengajukan usul kepada DK-PBB agar dibentuk suatu *Committee of Good Offices* (Komisi Jasa-Jasa Baik) untuk membantu kedua pihak dalam menyelesaikan pertikaian mereka. Usul Amerika Serikat ini diterima DK-PBB dan dijadikan keputusan. Atas dasar keputusan DK-PBB tersebut maka Belanda memilih Belgia, sedangkan RI memilih Australia. Kedua negara yang telah dipilih tersebut kemudian memilih negara ketiga, yaitu Amerika Serikat. Komisi tersebut kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN).

Pada tanggal 8 Desember 1947 KTN akhirnya dapat mempertemukan wakil-wakil Belanda dan RI disebuah kapal Amerika Serikat, Renville yang berlabuh di Tanjungpriok. Kapal Renville dijadikan tempat untuk berunding karena di kapal tersebut merupakan tempat yang netral. Kapal Renville merupakan wilayah Amerika Serikat. Dalam perundingan itu akhirnya dapat dicapai suatu persetujuan yang dikenal dengan Persetujuan Renville.

¹⁹ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid II*, Kanisius : Yogyakarta, 1988, hlm. 16.

Persetujuan Renville pada dasarnya sangat merugikan pihak RI. Pada awalnya Perdana Menteri Amir (ketua delegasi RI), presiden dan wakil presiden, Partai Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Syahrir menolak persetujuan tersebut. Akan tetapi berdasarkan laporan dari berbagai panglima tentara kepada presiden Soekarno yang menyatakan bahwa persediaan amunisi menipis, serta adanya kepastian bahwa penolakan berarti serangan baru dari pihak Belanda secara lebih hebat dan keterangan KTN bahwa itulah maksimum yang dapat dibuatnya dan tidak ada jaminan dari DK-PBB dapat menolong, maka pemimpin-pemimpin RI menerima Persetujuan Renville.²⁰ Selain itu pemerintah memperhitungkan bahwa persetujuan yang diadakan dibawah pengawasan KTN sebagai mata dunia internasional akan terus melibatkan PBB dalam kelanjutan perjuangan RI. Dengan demikian cepat atau lambat dunia akan menyadari bahwa aspirasi nasional yang diperjuangkan RI sesungguhnya adalah aspirasi seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu kalau RI menolak maka RI dianggap kurang menghargai jasa-jasa yang diberikan Dewan Keamanan PBB, sedangkan kalau RI menerimanya, dunia internasional akan tetap menaruh simpati kepadanya.²¹ RI menerima persetujuan tersebut juga dengan pertimbangan bahwa masih ada kesempatan yang lebih baik untuk membina kembali kekuatan militernya dan timbulnya simpati dunia yang makin besar karena RI mau menerima petunjuk-petunjuk KTN yang mewakili PBB serta selalu menunjukkan

²⁰ *Ibid*, hlm. 22.

²¹ K.L.M. Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, Gunung Agung : Jakarta, 1986, hlm. 33.

sikapnya yang cinta damai. Persetujuan Renville ditandatangani pada tanggal 17 dan 19 Januari 1948.²²

B. Posisi Mohammad Hatta masa 1948-1949

Pada tahun 1947 Hatta lebih banyak berada di Sumatra. Ketika Belanda melakukan penyerangan atas RI pada tanggal 21 Juli 1947, Hatta masih berada di Sumatra. Keberadaan Hatta ke Sumatra dikarenakan pemerintahan RI merasa perlu mengirim Hatta ke Sumatra untuk meningkatkan perjuangan rakyat di Sumatra. Pulau itu kurang mempunyai sarana komunikasi dan para pemimpin yang dapat diterima oleh semua golongan.²³ Hatta berada di Sumatra selama kurang lebih tujuh bulan. Hampir seluruh daerah dikunjunginya, memberi semangat kepada rakyat dan menertibkan pemerintahan. Selain itu Hatta juga menekankan perlunya persatuan dan kesatuan. Ketika berada di Sumatra itu, Hatta juga pergi ke India untuk bertemu dengan Nehru. Dalam perjalanan ke India, Hatta menyamar sebagai *co-pilot* dengan nama samaran Abdullah.²⁴

Pada tanggal 6 Januari 1948 Hatta kembali ke Yogyakarta. Sementara itu penerimaan persetujuan Renville mengakibatkan terjadinya krisis Kabinet Amir. Partai Masyumi dan PNI menarik dukungan mereka terhadap Kabinet Amir, begitu juga Syahrir. Bahkan ada kritikan Kabinet Amir dituduh telah menjual RI kepada Belanda dan menjual kekayaan alam RI. Hal ini disebabkan daerah-daerah yang diduduki Belanda menurut persetujuan Renville adalah daerah-daerah kaya. RI akan

²² *Ibid*, hlm. 36 dan 42.

²³ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 306.

²⁴ *Ibid*.

menjadi negara bagian dari suatu Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk oleh Belanda yang akan dikepalai oleh Ratu Belanda.²⁵ Adanya krisis kabinet tersebut menyebabkan Amir beserta kabinetnya mengembalikan mandat kepada presiden pada tanggal 23 Januari 1948. Seperti halnya Syahrir yang tidak sanggup melaksanakan Persetujuan Linggajati, Amir Syarifuddin juga tidak dapat melaksanakan persetujuan Renville.

Setelah Kabinet Amir mengembalikan mandat, RI merasa segera perlu suatu pemerintahan yang kuat untuk melaksanakan persetujuan Renville. Hal ini juga disebabkan situasi yang dihadapi sangat sulit berhubungan dengan pertikaian melawan Belanda maupun hal lain dalam ketentaraan. Oleh karena itu kabinet baru perlu segera dibentuk. Pembentukan suatu kabinet presidensiil yang bersifat nasional dan mencakup semua partai merupakan satu-satunya jalan yang cepat untuk menciptakan pimpinan kuat yang dibutuhkan. Oleh karena itu setelah Amir mengembalikan mandat, Presiden Soekarno menunjuk Drs. Mohammad Hatta, sebagai wakil presiden yang berdiri diluar partai untuk membentuk suatu Kabinet Presidensiil. Kabinet presidensiil langsung bertanggungjawab kepada presiden. Akan tetapi dengan adanya hubungan yang berkembang antara Presiden dan KNIP, secara tidak langsung kabinet juga bertanggungjawab kepada KNIP serta perwakilannya, Badan Pekerja, walaupun dalam arti tidak langsung dan tidak sesegera dibanding dengan tanggung jawab suatu Kabinet Parlementer. Presiden mempunyai hak sah untuk mempertahankan Kabinet Presidensiil walaupun kabinet itu tidak lagi memperoleh dukungan mayoritas Badan Pekerja KNIP. Akan tetapi tindakan seperti

²⁵ *Ibid*, hlm. 309.

itu akan menyebabkan presiden terjerumus dalam konflik dengan KNIP jika terjadi pertikaian antar mereka. Dalam prakteknya Soekarno tidak pernah menggunakan hak sah ini dan ia lebih suka bekerja dengan kabinet yang sesuai dengan perasaan mayoritas parlementer.²⁶ Hatta membentuk suatu "Pemerintahan Nasional yang mengikutsertakan semua partai besar".²⁷ Kabinet yang dibentuk Hatta dikenal dengan Kabinet Hatta. Kabinet Hatta dibentuk pada tanggal 29 Januari 1948 dengan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri. Adapun susunan Kabinet Hatta adalah sebagai berikut:²⁸

Perdana Menteri	: Mohammad Hatta
Menteri Luar Negeri	: H. Agus Salim
Menteri Dalam Negeri	: dr. Soekiman
Menteri Pertahanan	: Mohammad Hatta
Menteri Keuangan	: Mr. A.A. Maramis
Menteri Perhubungan	: Ir. Djuanda
Menteri Penerangan	: Mohammad Natsir
Menteri Kesehatan	: dr. Leimena
Menteri Perburuhan dan Sosial	: Kusnan
Menteri Kehakiman	: Mr. Susanto Tirtoprodjo
Menteri PP dan K	: Mr. Ali Sastroamidjojo
Menteri Pekerjaan Umum	: Ir. Laoh
Menteri Kemakmuran	: Mr. Syafrudin Prawiranegara
Menteri Pembagian Makanan Rakyat	: I. J. Kasimo
Menteri Agama	: K. H. Maskur
Menteri Negara	: Sultan Hamengku Buwono IX
Menteri Pembangunan dan Pemuda	: Supeno

²⁶ George Mc.T. Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (Terjemahan)*, UNS Press-Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1983, hlm 292. Lihat juga Abu Hanifah, *Revolusi Memakan Anak Sendiri : Tragedi Amir Syarifuddin* dalam Prisma no. 8, Agustus 1977 Tahun VI, hlm. 95.

²⁷ *Ibid*, hlm. 291-292.

²⁸ Mohammad Hatta, *op. cit.*, hlm. 521.

Kabinet Hatta didominasi oleh Partai Masyumi dan PNI. Akan tetapi dalam kabinet tersebut juga ada wakil Katolik dan Kristen, PGRI dan non-partai. Program Kabinet Hatta terdiri dari 4 pasal, yaitu :²⁹

1. Melaksanakan ketentuan-ketentuan persetujuan Renville dan melanjutkan perundingan dengan Belanda dengan perantaraan KTN.
2. Mempercepat pembentukan NIS yang merdeka dan berdaulat.
3. Rasionalisasi tentara dan ekonomi RI.
4. Pembangunan kembali kerusakan-kerusakan yang disebabkan perang dan pendudukan Jepang.

Setelah Kabinet Hatta terbentuk, maka kabinet ini segera melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan Renville. Dalam melaksanakan persetujuan Renville tersebut Kabinet Hatta mulai melaksanakan ketentuan persetujuan Renville yang paling dipertentangkan, yaitu pengakuan garis demarkasi Van Mook. Pada tanggal 26 Februari 1948 Kesatuan Tentara Nasional Indonesia yang berjumlah 35.000 orang telah meninggalkan daerah-daerah di belakang garis demarkasi di Jawa Barat yang terkenal dengan istilah Kantong, menuju ke daerah RI yang bebas. Ini sebenarnya hal yang sulit bagi pemerintah RI untuk mengharuskan mereka berhijrah karena kantong-kantong itu dapat dipertahankan secara efektif oleh kesatuan-kesatuan gerilya RI. Akan tetapi karena adanya jaminan dari KTN bahwa kelak akan ada plebisit dibawah pengawasan mereka, maka mereka mau berhijrah.³⁰

²⁹ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 24.

³⁰ *Ibid.*

Dalam meneruskan perundingan dengan Belanda tentang pelaksanaan Renville, pemerintah Hatta menunjuk Mr. Mohammad Roem sebagai ketua delegasi RI.³¹ Akan tetapi dari pihak Belanda justru selalu menunda perundingan tentang pelaksanaan persetujuan Renville. Hal ini membuat RI merasa bahwa Belanda tidak bersedia melaksanakan persetujuan Renville. Oleh karena itu perundingan mengalami kemacetan. Untuk mengatasi kemacetan tersebut wakil-wakil Amerika Serikat dan Australia berusaha mencari kompromi yang realistis, yang disebut Dubois-Critchly Plan. Pada prinsipnya RI menerima Dubois-Critchly Plan, tetapi Belanda menolak. Oleh karena itu perundingan mengalami kemacetan lagi. Tindakan Belanda yang selalu menunda perundingan dan tidak segera melaksanakan persetujuan Renville semakin membuat RI menjadi pihak yang terdesak di bidang politik. Keadaan ini masih ditambah oleh Belanda yang melakukan blokade (bidang ekonomi) yang sangat bertentangan dengan persetujuan Renville. Oleh karena itu Belanda berkeyakinan bahwa kehancuran RI tidak lagi memerlukan tindakan militer.

Sementara itu setelah kabinet Hatta dibentuk, Hatta sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan berangsur-angsur mengadakan mutasi perwira dan pejabat tinggi ke Sumatra. Ia mengangkat Kolonel Hidayat sebagai pimpinan tentara di Sumatra menggantikan Mayor Jendral Suhardjo Hardjowardojo, Sujono sebagai Komandan Angkatan Udara di Sumatra, Abdul Karim sebagai pimpinan Bank Negara Indonesia di Bukittinggi, Rusli Rahim sebagai Pelaksana Bimbingan Perkoperasian dan Syafrudin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran).³² Selain itu Hatta juga

³¹ Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hlm. 54.

³² Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 305.

mengadakan rasionalisasi sesuai dengan salah satu programnya. Rasionalisasi ini dilaksanakan pada bulan Maret 1948. Program rasionalisasi dimaksudkan untuk mengadakan perbaikan dalam susunan negara dan alat negara supaya mencapai perimbangan antara pendapatan dan belanja negaranya walaupun hal ini dapat berarti untuk sementara menambah belanja, tetapi umumnya untuk efektifitas dan efisiensi.³³

Kabinet Hatta terdiri dari tokoh-tokoh Masyumi dan PNI. Amir dan partai sosialisnya tidak ikut serta. Hal itu disebabkan Hatta menolak ikut sertanya orang-orang partai sosialis, karena mereka menghendaki Amir menjadi menteri pertahanan kembali dan menghendaki tiga kursi penting lainnya. Keinginan mereka itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu mereka beroposisi terhadap Kabinet Hatta yang dicapnya sebagai Kabinet Masyumi (Islam).³⁴

Persoalan RI dengan Belanda belum selesai, tetapi Kabinet Hatta harus menghadapi persoalan baru yang datang dari dalam negeri, yaitu pemberontakan PKI tanggal 18 September 1948 di Madiun. Dalam pemberontakan tersebut PKI juga dibantu oleh militer, yaitu Divisi IV yang merupakan divisi yang dibina oleh Amir Syarifuddin ketika menjadi perdana menteri. Divisi IV bergabung dengan PKI karena terkena program rasionalisasi yang dilakukan oleh Kabinet Hatta. Oleh karena itu Amir Syarifuddin juga bergabung dengan PKI. Dengan adanya program rasionalisasi tentara itu maka Hatta selalu menjadi sasaran tuduhan bahwa dialah yang menjadi penyebab langsung terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948. Akan tetapi

³³ *Ibid*, hlm. 324.

³⁴ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 30.

pemberontakan yang dipimpin oleh Muso tersebut dapat ditumpas oleh kabinet Hatta, khususnya oleh pasukan Siliwangi.

Pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 tersebut membawa dampak bagi RI. Pemberontakan PKI Madiun melemahkan kekuatan pertahanan RI untuk melawan Belanda yang kemudian ternyata melakukan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Selain itu pemberontakan PKI Madiun telah banyak membuang tenaga dan kekuatan RI. Akan tetapi selain dampak negatif tersebut ada juga dampak positifnya, yaitu terpukulnya propaganda Belanda kalau Indonesia lepas dari Nederland maka kepulauan yang strategis dan kaya ini akan jatuh ketangan komunis. Dampak positif lainnya adalah kedudukan RI dalam perjuangan diplomasi internasional bertambah kuat karena sikap dan tindakan pemerintah RI yang dengan tegas menumpas pemberontakan PKI Madiun. Dengan demikian Amerika Serikat makin tertarik untuk membantu dan membela Indonesia.³⁵

Secara keseluruhan pemberontakan PKI Madiun meningkatkan status pemerintahan Hatta. Tentara di Jawa lebih terintegrasi setelah pemberontakan tersebut. Secara internasional pemerintahan Hatta dilihat oleh Amerika Serikat sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab dan moderat serta anti komunis. Amerika Serikat semakin yakin bahwa pemerintahan Hatta dapat merupakan benteng melawan komunis di Indonesia.³⁶

Setelah pemberontakan PKI Madiun dapat diatasi, Hatta segera pergi ke Sumatra untuk menyelesaikan perselisihan antara para komandan militer RI dan

³⁵ *Ibid*, hlm. 40.

³⁶ Mavis Rose, *op. cit.*, hlm. 259.

Belanda di Tapanuli. Perselisihan tersebut merupakan perselisihan mengenai masalah perbatasan wilayah RI dengan wilayah Belanda. Tentara Belanda ingin menguasai lebih banyak wilayah Sumatra dengan mengatasnamakan pemulihan keamanan dan ketertiban.

Ketika berada di Sumatra Barat, Hatta mulai melakukan persiapan-persiapan untuk mengalihkan pemerintahan Republik ke Bukittinggi, jika terjadi serangan lebih lanjut dari pihak Belanda di Jawa. Ia memerintahkan Menteri Kemakmuran, Syafruddin Prawiranegara, untuk tetap berada di Bukittinggi. Hatta telah mengatur dengan Nehru melalui konsul India, supaya Soekarno dan Syahrir diterbangkan ke India untuk mengangkat persoalan Republik di luar negeri dan melindungi Soekarno dari ancaman Belanda. Ia sendiri berharap dapat tetap menjalankan jabatannya sebagai perdana menteri di Bukittinggi, jika Yogyakarta dikuasai.³⁷

Penolakan Belanda terhadap Dubois-Critchly Plan menyebabkan perundingan antara Indonesia-Belanda mengalami kemacetan. Oleh karena itu pada bulan September 1948 KTN mengusahakan kembali agar perundingan dapat dibuka. Wakil Amerika Serikat yang baru, Merle Cochran mengajukan rencana penyelesaian yang dikenal sebagai rencana Cochran. Dasarnya adalah Dubois-Critchly Plan yang diubah dengan memberikan sejumlah konsesi kepada Belanda. RI kecewa karena Cochran dianggap mengorbankan sejumlah kepentingan RI, sedangkan Belanda belum puas karena belum dianggap memadai. Oleh karena itu usaha Cochran gagal.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 259-260.

³⁸ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 28.

Pada tanggal 1 November 1948 Menteri Luar Negeri Belanda, Stikker membuka perundingan langsung dengan pihak RI. Oleh karena itu Hatta dipanggil ke Jawa untuk melakukan perundingan tersebut. Akan tetapi perundingan itu tidak membawa hasil. Sebelum berangkat kembali ke Nederland pada tanggal 11 November 1948, Hatta memberikan *aide memoire* (penjelasan tambahan) tentang pendirian RI. Isi penjelasan tambahan tersebut adalah Hatta menyetujui bahwa selama periode antara menjelang dibentuknya Negara Indonesia Serikat, "kalau pemerintah federal Indonesia mengakui bahwa memang timbul situasi yang tidak aman, maka Wakil Tinggi Kerajaan akan diperbolehkan menggunakan pasukan Belanda untuk mengatasinya". Hatta mengakui bahwa pasukan bersenjata Republik sebagian akan digabungkan menjadi tentara federal dalam periode peralihan. Hanya dalam situasi daruratlah pemerintah federal akan meminta bantuan dari pasukan Belanda dan hanya dalam situasi seperti itulah, Wakil Tinggi Kerajaan akan bertanggung jawab atas seluruh pasukan.³⁹ Akan tetapi ketika Stikker kembali lagi ke Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 1948 yang disertai oleh Sassen (Menteri Urusan Seberang), Hatta menyatakan bahwa tafsiran Stikker tentang *aide memoire*-nya tidak betul. Stikker menganggap bahwa Hatta mau membiarkan pasukan Belanda memasuki wilayah manapun di Indonesia.

Pembicaraan antara RI dengan Belanda segera terputus karena terhalang oleh persoalan kekuasaan-kekuasaan Komisaris Tinggi Mahkota selama peralihan, yaitu selama Pemerintahan Federal Sementara berfungsi. Belanda menuntut agar Komisaris

³⁹ Mavis Rose, *op. cit.*, hlm. 260.

Tinggi Mahkota memiliki kekuasaan menggerakkan pasukan Nederland ke daerah-daerah yang dianggap ada gangguan keamanan dan ketertiban. Pada tanggal 13 Desember 1948 Hatta minta kepada Cochran agar perundingan dapat dibuka kembali. Ia menyatakan bahwa RI bersedia mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi Belanda harus terikat oleh beberapa pembatasan tertentu. RI juga mengakui hak veto Komisaris Tinggi Mahkota, tetapi harus ada batas-batasnya. Belanda kemudian memberikan jawaban yang ultimatif, yang menuntut agar pihak RI menyetujui usul-usulnya dalam waktu 18 jam. Bagi RI, waktu 18 jam untuk mempelajari usul dan menyusun jawaban adalah terlalu singkat. Sementara itu KTN telah mengirim kawat laporan perkembangan terakhir pada tanggal 12 Desember. Akan tetapi tidak ada jawaban karena DK-PBB baru akan bersidang lagi sesudah Natal. Hal ini sudah diperhitungkan oleh pihak Belanda. Oleh karena itu Belanda melancarkan agresinya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948.⁴⁰

Dalam penyerangan terhadap Yogyakarta tersebut tentara Belanda berhasil menawan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Syahrir (penasihat presiden) dan sejumlah menteri termasuk menteri luar negeri, Agus Salim. Akan tetapi sebelum mereka ditawan, presiden masih sempat mengirimkan radiogram berisi pemberian kekuasaan negara kepada Menteri Kemakmuran, Syafrudin Prawiranegara yang sedang mengadakan perjalanan ke Sumatra, untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Jika karena sesuatu hal Syafrudin tidak dapat

⁴⁰ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 29.

menjalankan tugas, Presiden memerintahkan Sudarsono, Palar dan Maramis yang ada di New Delhi untuk membentuk Pemerintahan Pelarian (*Exile Government*).⁴¹

Reaksi dunia atas penyerangan Belanda tersebut luar biasa. Pada umumnya dunia sangat marah atas tindakan Belanda yang melakukan penyerangan terhadap RI yang kedua kalinya. Hal ini terutama karena Belanda berani melanggar suatu persetujuan (gencatan perang) yang disponsori oleh PBB yang diwakili KTN. Oleh karena itu pada tanggal 24 Desember 1948 DK-PBB mengeluarkan resolusi yang merupakan usul kompromi yang dikemukakan oleh Amerika Serikat, Columbia, dan Suria. Resolusi tersebut berisi mendesak kedua pihak untuk menghentikan tembak-menembak dengan segera dan membebaskan Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan pemimpin-pemimpin politik lainnya yang ditawan sejak tanggal 18 Desember 1948. Akan tetapi Belanda tidak segera melaksanakan resolusi tersebut. Demikian juga terhadap resolusi yang dikeluarkan DK-PBB pada tanggal 28 Desember 1948.

Pada tanggal 23 Desember 1948 PDRI di Sumatra berhasil mengirimkan perintah kepada Wakil RI di PBB yang isinya, pemerintah RI bersedia memerintahkan penghentian tembak-menembak dan memasuki perundingan dengan Belanda atas dasar :⁴²

1. Pembebasan segera anggota-anggota pemerintahan RI yang kini ditawan Belanda.
2. Penarikan mundur tentara Belanda ke tempat kedudukan semula (sebelum tanggal 19 Desember 1948).

⁴¹ *Ibid*, hlm. 42.

⁴² *Ibid*, hlm. 45.

3. Pengakuan *de facto* dan *de jure* atas kedaulatan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatra.
4. Pembentukan pemerintahan yang seluruhnya Indonesia atas dasar demokrasi yang merdeka dan berdaulat oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan Belanda.
5. Penarikan mundur seluruh tentara Belanda dari Indonesia dengan segera setelah pembentukan pemerintahan yang sepenuhnya Indonesia. Kepentingan ekonomi Belanda akan dilindungi secara wajar.

Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta dan Natsir (Menteri Penerangan) sebelum dibawa ke Sumatra juga telah meninggalkan pesan yang berhasil di siarkan melalui RRI. Isi pesan tersebut antara lain anjuran untuk non-kooperasi dengan Belanda, bumi hangus, sabotase segala yang menguntungkan Belanda, dan sebagainya. Pesan tersebut sangat membangkitkan semangat juang rakyat dan memberi petunjuk pula tentang apa yang harus dilakukan rakyat. Pesan-pesan itu dilaksanakan oleh rakyat, tidak hanya oleh para lelaki, tetapi para wanita juga ikut berpartisipasi, misalnya mereka mengorganisasi dapur umum untuk para gerilyawan yang keluar-masuk kota.

Pada tanggal 28 Januari 1949 DK-PBB kembali mengeluarkan resolusi. Isi pokok resolusi itu adalah DK-PBB menghendaki supaya perundingan antara Indonesia-Belanda dibuka kembali dengan lebih dahulu menghentikan peperangan yang timbul akibat Aksi Militer Belanda, dan melepaskan semua tahanan politik supaya Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Akan tetapi Belanda tidak segera mau menerima resolusi tersebut. Oleh karena itu pertempuran-pertempuran yang terjadi

antara gerilyawan RI dengan tentara Belanda mencapai puncaknya pada tanggal 1 Maret 1949 yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949. Dalam penyerangan ini RI berhasil menduduki ibukota Yogyakarta selama 6 jam. Kemenangan politis dari serangan umum tersebut menyebabkan naiknya prestise bangsa Indonesia di dunia internasional. Serangan umum yang merupakan kemenangan politis tersebut mampu membuka mata dunia internasional dan membuktikan omong kosong Belanda tentang hancurnya RI.

Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut menyebabkan Amerika Serikat semakin tegas terhadap Belanda. Atas ketegasan Amerika tersebut, maka pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan kembali antara RI dengan Belanda. RI diwakili oleh Mohammad Roem, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Royen. Perundingan itu membicarakan empat masalah politik, yaitu soal pemerintahan federal, Uni Indonesia-Belanda, pemerintahan peralihan dan sidang konstituante. Perundingan tersebut berakhir pada tanggal 7 Mei 1949 dan menghasilkan beberapa ketentuan. Ketentuan persetujuan Roem-Royen tersebut adalah:⁴³

1. Pengeluaran perintah oleh pihak RI kepada kesatuan-kesatuan bersenjata RI untuk menghentikan perang gerilya, sedangkan pemerintah dan pemimpin-pemimpin RI dipulihkan kembali ke Yogyakarta.
2. Kerjasama dalam pemulihan perdamaian dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan.

⁴³ *Ibid*, hlm. 53.

3. Belanda akan menyokong RI untuk menjadi negara bagian dari RIS dengan mempunyai sepertiga suara dalam Perwakilan Federal.
4. Ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan tanpa syarat, nyata dan lengkap.

Para pemimpin RI yang ditawan di Sumatra, khususnya Mohammad Hatta mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di Yogyakarta antara RI dengan Belanda dengan seksama dan aktif dalam mengatur siasat. Oleh karena itu ketika ada berita bahwa akan diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang terkenal dengan perundingan Roem-Royen tersebut, Hatta menyetujui adanya perundingan itu. Pada dasarnya PDRI tidak menerima persetujuan Roem-Royen. Oleh karena itu setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 PDRI mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Dengan demikian tanggung jawab selanjutnya terletak pada Presiden Soekarno. Hatta secara resmi memulai kembali peranannya sebagai perdana menteri pada tanggal 13 Juli 1949, dan Kabinet Hatta mengalami *reshuffle* sebagai berikut:⁴⁴

Perdana Menteri	: Mohammad Hatta
Wakil Perdana Menteri	: Syafrudin Prawiranegara
Menteri Luar Negeri	: H. Agus Salim
Menteri Dalam Negeri	: Wongsonegoro
Menteri Pertanahan	: Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Menteri Keuangan	: Lukman Hakim
Menteri Penerangan	: Samsudin
Menteri Pekerjaan Umum	: H.R. Laoh
Menteri Kesehatan	: Surono
Menteri Perburuhan dan Sosial	: Kusnan
Menteri Kehakiman	: Susanto Tirtoprodjo
Menteri Pendidikan dan	

⁴⁴ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 353-354.

Kebudayaan	: S. Mangunsarkoro
Menteri Kemakmuran dan Urusan Makanan	: I.J. Kasimo
Menteri Agama	: K.H. Maskur
Menteri-menteri Negara	: I.J. Leimena
	Djuanda
	Sukiman

Sebelum mengikuti KMB, pada tanggal 19-22 Juli di Yogyakarta dan 31 Juli-2 Agustus di Jakarta diadakan konferensi Antar Indonesia. Dalam konferensi itu Hatta menekankan pentingnya persatuan sikap dan pendapat dalam menghadapi KMB. Konferensi di Yogyakarta menyetujui pembentukan RIS yang demokratis, dilengkapi dengan DPR dan Senat. Dalam menghadapi konferensi antar Indonesia ini, bagi Hatta yang pokok adalah menyusun suatu negara yang merdeka penuh yang bersifat demokratis. Oleh karena itu Hatta merupakan salah satu orang yang menjunjung tinggi demokrasi.

Sebelum KMB dilaksanakan ada beberapa orang yang bersikap apriori terhadap KMB. Akan tetapi menurut Hatta sikap apriori tidak dapat dipergunakan dalam suatu perundingan karena berunding berarti memperjuangkan kepentingan masing-masing. Menurut Hatta, bagi Indonesia perundingan antara lain dimaksudkan untuk mengembalikan persatuan bangsa dan wilayah yang sebagian telah diduduki Belanda. Hal ini berarti bahwa perundingan dimaksudkan untuk mengisi kemerdekaan.⁴⁵

Hatta menekankan bahwa persetujuan KMB lebih baik hasilnya daripada hasil persetujuan Linggajati dan Renville. Bahkan dengan adanya KMB RI seakan-akan sudah diakui secara *de jure* oleh dunia internasional. Dengan demikian kedudukannya lebih kuat daripada masa-masa sebelumnya. Menurut Hatta Indonesia merdeka

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 42.

jangan dilihat sebagai tujuan akhir perjuangan, tetapi syarat untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Hatta menyatakan bahwa penyerahan kedaulatan baru merupakan permulaan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Soal Irian Barat, Hatta meminta kesabaran dari penduduk di Irian. Hatta optimis dalam hal ini bahwa Irian Barat akan merdeka juga. Hatta juga mengingatkan bahwa kedaulatan yang akan diserahkan sebagai hasil KMB bersifat penuh, tidak bersyarat dan tidak dapat dibatalkan kembali.⁴⁶

KMB diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Peserta konferensi adalah para utusan dari RIS yang diketuai oleh Hatta, dari Pertemuan Musyawarah Federal (PMF) dengan Ketua Sultan Hamid, dan dari Belanda dengan Ketua Van Maarseven (Menteri Wilayah Seberang Lautan). Konferensi dipimpin oleh PM Dress dari Belanda, didampingi oleh KTN.⁴⁷ Menjelang penyerahan kedaulatan dilakukan persiapan-persiapan yang perlu, yaitu: memilih presiden RIS, membentuk pemerintah RIS dan menyusun parlemen sementara.

Pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet RIS dibentuk dan tersusun sebagai berikut:⁴⁸

Perdana Menteri	: Mohammad Hatta
Menteri Luar Negeri	: Mohammad Hatta
Menteri Pertahanan	: Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Menteri Dalam Negeri	: Anak Agung Gde Agung
Menteri Keuangan	: Syafrudin Prawiranegara
Menteri Perekonomian	: Ir. Djuanda
Menteri Perhubungan dan	

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 361.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 357.

⁴⁸ Mohammad Hatta, *op. cit.*, hlm. 556.

Pekerjaan Umum	: Ir. Laoh
Menteri Kehakiman	: Prof. Mr. Soepeno
Menteri P dan K	: dr. Abu Hanifah
Menteri Kesehatan	: dr. I. J. Leimena
Menteri Perburuhan	: Mr. Wilopo
Menteri Sosial	: Mr. Kosasih Purwanegara
Menteri Agama	: K.H. Wahid Hasyim
Menteri Penerangan	: A. Mononutu
Menteri Negara	: Sultan Hamid Aljadri II Mr. Mohammad Roem dr. Soeparno

Bagi Hatta pekerjaan dalam KMB merupakan karya monumental dalam perjuangannya sampai pada waktu itu. Puncak kerja monumental itu adalah penerimaan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Ia sendiri menerimanya di Den Haag dari Ratu Juliana. Ratu Juliana tidak dapat menyembunyikan keharuannya pada upacara Khidmat penyerahan kedaulatan yang diadakan di Istana Kerajaan di Amsterdam. Air matanya menitik, suaranya serak. Berlainan dengan sikap Hatta. Ia menyembunyikan perasaan, wajahnya tampak mencerminkan ketenangan dan suaranya datar. Ia memang bukan seorang yang melonjak kegirangan dalam bersuka, atau berlinang air mata dalam bersedih. Dalam suatu kekhidmatan upacara, yang penuh suka dan duka baik bagi bangsa maupun bagi dirinya seperti pada tanggal 27 Desember 1949 itu, ia sangat menguasai dirinya. Agaknya syukurnya yang lebih berada di depan. Ia berkata:⁴⁹

Sri Baginda,

Adalah suatu penghormatan yang besar dan suatu kegembiraan bagi saya, sebagai pemimpin delegasi Republik Indonesia Serikat, menerima kedaulatan atas nama Indonesia, berdasarkan Piagam Penyerahan Kedaulatan dan pengakuan yang tadi telah dibacakan oleh Sekretaris Delegasi Belanda. Saya menaruh harapan agar hubungan antara kedua negeri, yang oleh karena terikat dalam uni, atas dasar kesamaan martabat, kemerdekaan dan kesukarelaan

⁴⁹ Deliar Noer, op. cit., hlm. 371.

sepenuhnya, akan berkembang dalam arti akan membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan kedua negeri kita.

Demikianlah pembahasan tentang posisi Mohammad Hatta masa 1945-1949.

Pada bab selanjutnya akan dibahas tentang bentuk-bentuk perjuangan Hatta.



BAB III

BENTUK PERJUANGAN MOHAMMAD HATTA

Mohammad Hatta dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari kerjasama-kerjasama yang dilakukannya baik dengan tokoh-tokoh dalam maupun luar negeri. Hal itu dilakukannya agar mendapat dukungan perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Kerjasama dengan tokoh-tokoh luar negeri dilakukan agar Indonesia benar-benar diakui oleh dunia internasional bahwa Indonesia menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan penuh tanpa campur tangan negara lain. Selain itu supaya mereka juga mendukung dan membantu perjuangan Indonesia.

A. Kerjasama Hatta Dengan Tokoh-tokoh Dalam Negeri

Penulis dalam membahas kerjasama dengan tokoh-tokoh dalam negeri ini akan penulis batasi. Tidak semua tokoh atau pemimpin pergerakan yang bekerjasama dengan Hatta penulis bahas dalam penulisan ini. Tokoh-tokoh dalam negeri yang akan penulis bahas dalam penulisan ini adalah Soekarno dan Sutan Syahrir. Alasan penulis membahas kedua tokoh tersebut, seperti menurut Subadio yang merupakan salah seorang pemuda dalam kelompok Syahrir. Menurutnya, Soekarno, Hatta dan Syahrir adalah Tritunggal yang merupakan pemimpin yang paling efektif di Indonesia pada masa perjuangan. Syahrir menghormati integritas dan sifat kepemimpinan Hatta, sedangkan Hatta mengagumi ketajaman politik Syahrir. Keduanya mengandalkan

daya tarik massa dari Soekarno untuk memperoleh dukungan Jawa.¹ Pada masa pendudukan Jepang ketiga tokoh tersebut saling membagi tugas. Soekarno dan Hatta harus bekerja secara resmi dengan Jepang, sedangkan Syahrir sambil tetap mengadakan kontak dengan mereka akan memimpin perlawanan di bawah tanah.² Pada masa pendudukan Jepang Hatta berperan di kalangan nasionalis yang lebih tua, yang dikenal sebagai Angkatan 28. Syahrir akan menarik generasi baru pemuda radikal, yang dikenal sebagai angkatan Muda atau Angkatan 45. Antara Hatta, Syahrir bersama dengan mistik Soekarno terdapat ikatan khusus yang akan berlaku sebagai jembatan antara pemimpin tua dan muda, terutama pada saat-saat krisis. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu, pimpinan revolusi kemerdekaan berada dalam tangan ketiga pemimpin itu, yang semuanya saling mengisi, saling mendukung sehingga pimpinan revolusi merupakan Tritunggal seperti diungkapkan oleh Chairil Anwar dalam sajaknya Kerawang-Bekasi.³ Walaupun diantara ketiga tokoh tersebut sering terjadi pertentangan pendapat, tetapi ketiga tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan.

1. Kerjasama Hatta dengan Soekarno

Pertemuan Hatta dengan Soekarno terjadi pada tahun 1932. Ketika itu Hatta telah menamatkan studinya di Belanda, dan pulang ke Indonesia. Soekarno pada waktu itu baru bebas dari tahanan di Sukamiskin. Pertemuan itu terjadi di sebuah

¹ Mavis Rose, *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta*, PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 1991, hlm. 183.

² George McT. Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (Terjemahan)*, Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1983, hlm. 133.

³ Aboe Bakar Lubis, *Kilas Balik Revolusi*, Universitas Indonesia Press : Jakarta, 1992, hlm. 316

hotel di Jalan Pos Timur. Sejak itu pula antara Hatta dan Soekarno mengadakan kerjasama untuk satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Oleh karena itu kerjasama antara Hatta dengan Soekarno sudah dilakukan sebelum kedua tokoh tersebut masing-masing menjadi Wakil Presiden dan Presiden. Akan tetapi kerjasama Hatta dengan Soekarno baru sangat terlihat ketika Indonesia dikuasai oleh Jepang.

Menurut Roeslan Abdulgani antara Bung Karno dengan Bung Hatta ada dua persamaan pokok, yaitu keteguhan nasionalisme dan ketajaman analisis politik mereka. Menurut Roeslan, keduanya mempunyai konsepsi hampir sama tentang Indonesia merdeka. Pada tahun 1933 Bung Hatta menulis buku KIM (Ke Arah Indonesia Merdeka dan pada waktu yang tidak jauh berbeda, Bung Karno menulis MIM (Mencapai Indonesia Merdeka). Keduanya pada tahun 1926-1927-an sudah meramalkan sendiri-sendiri bahwa akan pecah perang Pasifik.⁴ Menurut Roeslan antara kedua tokoh tersebut ada perbedaan yaitu watak. Bung Karno adalah penggerak dan pembangkit sentimen-sentimen nasional, sedangkan Bung Hatta menjadi "guardian" yang mengisi dan memberi arah.⁵

Pada masa pendudukan Jepang, keadaan rakyat Indonesia tidak lebih baik daripada masa pendudukan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang keadaan rakyat Indonesia justru lebih menderita. Oleh karena itu bangsa Indonesia berusaha untuk melawan. Di Indonesia terdapat berbagai kekuatan sosial politik yang memperjuangkan tercapainya tujuan Indonesia merdeka. Kekuatan sosial politik yang pertama adalah golongan pangreh praja dan pegawai. Kedua, para santri dan ulama

⁴ Yayasan Idayu, *Bung Hatta Kita*, Yayasan Idayu: Jakarta, 1980, hlm. 170.

⁵ *Ibid.*

Islam. Ketiga, golongan sosialis di bawah pimpinan Syahrir. Keempat, golongan komunis di bawah pimpinan Amir Syarifuddin (seorang sosialis kiri). Kelima, golongan pemuda. Keenam, golongan pemuda Menteng yang dikenal dengan Kaigun. Ketujuh adalah golongan nasionalis non-agama di bawah pimpinan Soekarno-Hatta.

Golongan nasionalis non-agama pimpinan Soekarno-Hatta menyadari kenyataan kerasnya pengawasan Jepang. Oleh karena itu mereka bertindak atas perhitungan yang pragmatis-rasional. Ini berarti mereka harus bersedia bekerjasama dengan Jepang. Akan tetapi orang tidak dapat menyebut mereka kolaborator karena mereka tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan kerjasama dengan Jepang bukannya tanpa syarat. Mereka hanya mau bekerjasama jika perjuangan mereka tidak dirugikan. Lagipula kerjasama mereka dengan menerima jabatan instansi buatan Jepang menyebabkan mereka justru lebih mudah bergerak dan berhubungan dengan massa. Dengan bekerjasama mereka juga mempersiapkan calon-calon pemimpin Indonesia baik sipil maupun militer Indonesia Merdeka yang diperjuangkan, karena di jaman Jepang kesempatan menduduki jabatan-jabatan sipil dan memasuki Korps pimpinan tentara jauh lebih besar daripada sebelumnya.⁶ Kerjasama Hatta dan Soekarno dengan Jepang juga berdasarkan pertimbangan bahwa untuk menghadapi militer Jepang yang kejam itu rakyat perlu mempunyai pembela. Hatta dan Soekarno berusaha memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Jepang, untuk memperjuangkan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan. Dengan demikian kerjasama Hatta dan Soekarno dengan pemerintah Jepang tersebut hanyalah taktik belaka.

⁶ G. Moedjarto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid I*, Kanisius: Yogyakarta, 1988, hlm. 79.

Pada tanggal 29 April 1942 Jepang membentuk Gerakan Tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia). Akan tetapi gerakan ini tidak mendapat dukungan dari pemimpin-pemimpin pergerakan, sehingga gerakan ini lenyap. Pada bulan Maret 1943 dibentuk PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) sebagai pengganti Gerakan Tiga A. Putera dipimpin oleh Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mansyur yang dikenal Empat Serangkai. Untuk menjalankan tugasnya, mereka sering berpidato atau berhubungan dengan rakyat. Dalam setiap kesempatan mereka berusaha menanamkan nasionalisme (semangat cinta kepada bangsa dan tanah air) kepada seluruh rakyat Indonesia. Mereka juga mempropagandakan agar rakyat berjuang sampai kemenangan terakhir tercapai.

Pada bulan September 1943, dibentuk organisasi yang paling penting, yang dipelopori oleh PUTERA, yaitu PETA (Tentara Pembela Tanah Air), yang merupakan sasaran utama propaganda nasionalisme PUTERA. Anggota PETA sering disebut sukarelawan, dilatih oleh Jepang tetapi dipimpin oleh orang-orang Indonesia. PETA merupakan organisasi militer yang dibentuk untuk membantu Jepang membela Indonesia melawan invasi Sekutu. Pada pertengahan tahun 1945 PETA mengalami puncak kekuatannya dan keanggotannya mencapai 120 ribu orang bersenjata. PETA ini kelak akan menjadi tulang punggung Angkatan Perang RI. Soekarno, Hatta dan para pemimpin PUTERA lainnya bertujuan mengindoktrinasi anggota PETA terus-menerus menyangkut pandangan tentang pro-Indonesia dan hanya diluarnya saja pro-Jepang dan berorientasi anti Sekutu.⁷

⁷ George McT. Kahin, *op. cit.*, hlm. 138 – 139.

Perang Pasifik antara Jepang dengan Sekutu masih terus berlangsung. Pada akhir tahun 1944, Jepang mulai terdesak. Pada bulan Mei 1945 dibentuk Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat. Pada tanggal 7 Agustus 1945 Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan tersebut dibubarkan, dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, sedangkan wakil ketuanya Drs. Mohammad Hatta. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu para pemuda mendesak Soekarno sebagai ketua PPKI untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi Soekarno tidak dapat memenuhi keinginan para pemuda tersebut karena ia terikat oleh organisasi yang dipimpinnya. Ia tidak dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan anggota-anggota PPKI.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, PPKI mengadakan rapat yang sedianya akan diadakan tanggal 16 Agustus 1945 pagi. Akan tetapi karena ada peristiwa Rengasdengklok, maka rapat baru dapat diadakan pada malam hari. Rapat tersebut menghasilkan teks proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Dalam perumusan teks proklamasi tersebut Hatta mendiktekan bunyinya, sedangkan Soekarno menulisnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno, yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu Soekarno-Hatta sering dikenal sebagai Proklamator Kemerdekaan Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dapat diwujudkan. Hal itu tidak terlepas dari kerjasama Hatta dengan Soekarno. Hatta dan Soekarno dapat bekerjasama dan mereka dapat saling melengkapi. Soekarno sebagai seorang agitator dapat mengerahkan pengikut dan mengusahakan tercapainya suatu konsesus, bahkan dengan pihak Jepang sekalipun, sedangkan Hatta dengan cara kerjanya yang tenang dalam komite-komite memiliki kemampuan dibidang organisasi dan pengarahan. Dengan demikian kerjasama antara Soekarno dan Hatta yang lahir dari tuntunan keadaan ternyata merupakan kerjasama yang sangat menguntungkan bagi kepentingan Indonesia. Walaupun mereka punya lawan-lawan yang berbeda (Soekarno imperialisme Barat, Hatta facisme Jepang), tetapi tujuan mereka sama, yaitu kemerdekaan. Mereka dapat menyisihkan perbedaan-perbedaan itu dan dengan demikian mempersatukan mereka dengan kokoh pada saat-saat tujuan itu terancam.⁸

Tonggak sejarah cita-cita luhur rakyat Indonesia telah ditegakkan diatas bumi pertiwi dengan melalui wakil-wakilnya "Dwitunggal Soekarno-Hatta".⁹ Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat dan menghasilkan beberapa keputusan antara lain memilih presiden dan wakil presiden RI. Presiden terpilih adalah Soekarno, sedangkan wakil presidennya Mohammad Hatta. Ketika menjabat sebagai presiden dan wakil presiden ini hubungan dan kerjasama antara Hatta dengan Soekarno semakin erat. Menurut John Coast (seorang sosialis Inggris yang bekerja bagi pihak RI), Dwitunggal Soekarno dan Hatta adalah kombinasi kepemimpinan

⁸ Bernhard Dahm, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, LP₃ES : Jakarta, 1987, hlm. 317.

⁹ Yayasan Idayu, *op. cit.*, hlm. 57.

yang efektif. Ia berpendapat, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta itu adalah perpaduan yang paling membahagiakan bagi Indonesia.

Soekarno dan Hatta setelah masing-masing menjadi presiden dan wakil presiden, mereka diharapkan dapat menyatukan bakat mereka dalam rangka menghasilkan kepemimpinan mereka yang utuh dan stabil. Suatu kepemimpinan yang terdiri dari berbagai unsur yang dapat menunjukkan berbagai alur didalam masyarakat Indonesia. Dengan Soekarno yang berlaku secara orator dan kekuatan magnetik, Hatta dapat melengkapinya dengan perencanaan dan menyajikan rincian administratif. Soekarno akan mencerminkan muslim "abangan", sedangkan Hatta muslim yang lebih ortodoks. Soekarno akan memproyeksikan kecemerlangan dan sensualitas penguasa Jawa, sementara Hatta akan mengimbangnya dengan puritanisme dan ketegaran. Soekarno mewakili penguasa Jawa dengan ciri otokratis yang sentralistis, sementara Hatta akan mencerminkan kedaulatan rakyat yang disusun atas model "demokrasi asli" Dataran Tinggi Agam. Mereka bersama-sama akan merupakan simbol persatuan nasional.¹⁰

Hubungan Bung Hatta dengan Bung Karno adalah hubungan kedwitunggalan dari kepemimpinan politik, intelek dan pengabdian. Hatta menganggap dwitunggal adalah hubungan yang khas antara presiden dan wakil presiden. Hubungan ini memungkinkan Soekarno untuk pergi ke pelosok, berbicara kepada rakyat dan menumbuhkan semangat mereka, sementara Hatta menangani kerumitan detail

¹⁰ Mavis Rose, *op. cit.*, hlm. 184.

pemerintahan, pekerjaan yang paling dikuasainya.¹¹ Menurut Bung Hatta, jiwa dan praktek dwitunggal terutama berbentuk kebulatan Soekarno Hatta yang tidak tertulis dengan resmi, yaitu berupa tekad Soekarno-Hatta bahwa dalam pimpinan negara dalam revolusi dan perjuangan kemerdekaan, kebijaksanaan dan tindakan-tindakan senantiasa diambil dengan kebulatan mereka berdua. Akan tetapi, bila salah seorang diantara mereka tidak berada di Ibukota, maka tindakan salah satu akan didukung dan dijunjung oleh yang lainnya.¹² Contoh-contoh nyata tentang hal ini, antara lain :¹³

1. Sesudah proklamasi, perlu ditentukan lembaga yang bertindak selaku Badan Legislatif. Maklumat no X ditandatangani sendiri oleh Bung Hatta karena Bung Karno tidak sedang berada di Ibukota. Maklumat tersebut menyatakan bahwa Badan Pekerja KNIP diberi wewenang selaku badan Legislatif negara. Bung Karno menjunjung maklumat itu.
2. Ketika Agresi Militer Belanda I, Bung Karno menentukan sendiri kebijaksanaan dan garis-garis perundingan dan penyusunan delegasi, karena Bung Hatta sedang berada di Sumatra. Semua keputusan Bung Karno dijunjung tinggi oleh Bung Hatta.
3. Hampir semua dokumen Pemerintah Pusat RI ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta.

¹¹ *Ibid*, hlm. 156-157.

¹² Z. Yasni, *Bung Hatta Menjawab*, PT. Gunung Agung : Jakarta, 1980, hlm. 155-156.

¹³ *Ibid*, hlm. 189.

Selain itu pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuk Angkatan Perang yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Bung Karno sendiri.¹⁴ Keputusan ini juga dijunjung oleh Bung Hatta.

Akan tetapi dari hal-hal tersebut di atas yang paling penting adalah pembuatan teks proklamasi dan pelaksanaannya. Dalam pembuatan teks proklamasi, Bung Hatta yang membuat rumusannya, sedangkan Bung Karno yang menulisnya. Rumusan teks proklamasi itu juga disetujui oleh Bung Karno. Teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta.

Bung Hatta dan Bung Karno mempunyai satu kesamaan karakteristik yang kuat, yang mengikat mereka bersama, yaitu dedikasi sepenuhnya dan tak ragu-ragu bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945 mereka juga bersama-sama mengundang kecaman karena dianggap menjadi kolaborator terkemuka dan harus menangkis serangan dari kaum pemuda militan, dengan saling membela.¹⁵

Pada tanggal 28 Oktober 1945 Hatta dan Soekarno pergi ke Surabaya untuk menyelesaikan pertikaian antara TKR dan pemuda dengan tentara Inggris. Kerjasama mereka yang lain, juga nampak ketika terjadi peristiwa 3 Juli 1946.

Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan dilaksanakan oleh Kabinet Syahrir. Kabinet ini menjalankan pemerintahan selama tiga kali. Setelah Kabinet Syahrir yang ketiga, kabinet yang berkuasa adalah Kabinet Amir Syarifuddin. Pada masa Kabinet Amir ini ditandatangani persetujuan Renville antara

¹⁴ Salim Said, *Genesis of Power : General Sudirman and the Indonesia Military in Politics 1945-1949*, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1992, hlm. 25.

¹⁵ Mavis Rose, *op. cit.*, hlm. 148.

RI dengan Belanda karena Belanda ingin menguasai Indonesia kembali. Akan tetapi Kabinet Amir tidak dapat melaksanakan persetujuan tersebut, sehingga Amir mengembalikan mandat kepada presiden Soekarno. Oleh karena itu presiden Soekarno menunjuk wakil presiden Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet baru. Pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Hatta terbentuk dengan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 dibuka Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. KMB merupakan salah satu keputusan Persetujuan Roem-Royen yang diadakan karena adanya Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Hatta sebagai perdana menteri RI memimpin delegasi RI dan menunjuk Mohammad Roem sebagai wakil ketua, sedangkan Soekarno tetap berada di Indonesia, menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam negeri. Pada tanggal 27 Desember 1949 terjadi penyerahan atau pengakuan kedaulatan dari Ratu Juliana kepada Mohammad Hatta, sedangkan di Jakarta dari H.V.K. Lovink kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Pada tanggal 27 Desember 1949 itu akhirnya Indonesia mendapatkan kembali yang menjadi miliknya, yaitu kedaulatan. Ini semua tidak lepas dari kerjasama tokoh-tokoh RI, khususnya Hatta dan Soekarno. Seorang wakil Australia pada Komite Jasa Baik, yaitu Critchly, beranggapan Soekarno dan Hatta memiliki hubungan kemitraan yang unik dan saling melengkapi selama perjuangan kemerdekaan.¹⁶

¹⁶ *Bid*, hlm. 251.

Antara Hatta dan Soekarno kelihatan kerjasama yang rapi dan baik. Masing-masing berdiri di tempatnya. Masing-masing mempunyai kecakapan tersendiri dan bersangkut paut antara keduanya. Soekarno tidak dapat bekerja tanpa Hatta, sebaliknya Hatta tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Soekarno. Demikian kedua orang besar ini telah merupakan ratu adil Indonesia menurut kepercayaan lama di tanah Jawa. Soekarno pengaruhnya besar dalam masyarakat Indonesia, sedangkan Hatta kecakapannya besar dalam negara. Oleh karena itu keduanya mempunyai kedudukan yang sama dalam pandangan masyarakat.¹⁷

2. Kerjasama Hatta dengan Sutan Syahrir.

Pertemuan Hatta dan Syahrir terjadi ketika mereka belajar di negeri Belanda. Bung Hatta ketika bertemu dengan Syahrir telah menjadi ketua Perhimpunan Indonesia (PI) di negeri Belanda. Dari pertemuan-pertemuannya dengan Syahrir, ternyata ada keserasian pendapat mengenai berbagai hal dalam politik, antara lain: cita-cita pergerakan nasional, kemerdekaan bangsa dan azaz demokrasi, anti agitasi tetapi pro pendidikan untuk rakyat supaya dapat berpikir sendiri, belajar bertanggung jawab, mental kuat dan bersedia berkorban untuk cita-cita.¹⁸ Syahrir merupakan pengikut setia Hatta. Hatta dan Syahrir bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Hatta dan Syahrir merupakan teman seperjuangan sejak jaman kolonial. Dalam masa pergerakan nasional maupun dalam perjuangan membela kemerdekaan, mereka

¹⁷ St. Rais Alamsyah, *Sepuluh Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Mutiara : Djakarta, hlm. 43.

¹⁸ Ny. Siti Wahjunah Syahrir, Bung Hatta: Beberapa Catatan, dalam *Bung Hatta-pribadinya Dalam Kenangan*, Sinar Harapan dan Universitas Indonesia Press : Jakarta, 1980 hlm. 477.

mempunyai peran yang saling melengkapi. Syahrir percaya kepada kepemimpinan dan integritas Hatta dan Hatta percaya pada kemampuan berpikir dan ketajaman politik Syahrir. Pada masa pendudukan Belanda mereka sama-sama dibuang dan diasingkan oleh pemerintah Belanda.

Pada tanggal 4 Juli 1927 didirikan Partai Nasional Indonesia. Akan tetapi dalam perkembangannya partai ini dibubarkan. Oleh karena itu muncul dua partai baru, yaitu Partindo dan PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia). Partindo dipimpin oleh Sartono, yang kemudian mendapat dukungan dari Soekarno, sedangkan PNI Baru dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Syahrir. Partindo adalah partai yang setuju dengan pembubaran PNI, sedangkan PNI Baru tidak setuju dengan pembubaran PNI.

PNI Baru yang dipimpin oleh Hatta dan Syahrir ini lebih mengutamakan pendidikan ke dalam, tidak banyak gembar-gembor, memperbanyak kader dan memperluas kesadaran politik untuk rakyat. PNI Baru ini oleh Belanda dianggap berbahaya bagi keamanan dan ketertiban di tanah jajahan. Oleh karena itu pada tahun 1934 Hatta dan Syahrir ditangkap dan diasingkan ke Digul. Pada tahun 1936 mereka dipindahkan ke Bandaneira. Pada tahun 1942 mereka dipindahkan lagi ke Sukabumi.

Pada awal pendudukan Jepang, seluruh tawanan yang ditawan oleh Pemerintah Belanda dibebaskan oleh Pemerintah Jepang. Pada masa pendudukan Jepang ini Hatta terpaksa bersedia bekerjasama dengan Pemerintahan Jepang atas berbagai pertimbangan. Akan tetapi hubungan Hatta dan Syahrir untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tetap terjalin. Perjuangan mereka tetap saling melengkapi. Syahrir bekerja dengan diam-diam di bawah tanah, menggembleng semangat kaum

pemuda dan rakyat untuk kemerdekaan. Hatta sendiri yang pada lahirnya ikut bekerjasama dengan Jepang, diam-diam memberi petunjuk-petunjuk kepada Syahrir. Syahrir merupakan tangan kanan Hatta menyusun kekuatan rakyat kearah kemerdekaan.¹⁹ Dengan demikian pada masa pendudukan Jepang, Hatta dan Syahrir saling membagi tugas. Hatta berjuang di atas tanah, sedangkan Syahrir berjuang di bawah tanah.

Setelah Indonesia merdeka, Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Akan tetapi setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, Belanda ingin menguasai Indonesia kembali. Oleh karena itu terjadi persengketaan antara Belanda dengan Indonesia. Sejak itu Syahrir sebagai Perdana Menteri RI berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan Belanda. Permasalahan dengan Belanda belum selesai, tetapi di dalam negeri juga timbul persoalan dari orang-orang yang menginginkan agar Syahrir mundur dan diganti dengan kabinet yang baru. Hal ini disebabkan mereka menganggap Kabinet Syahrir sudah tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Oleh karena itu mereka mengadakan *coup*. Akan tetapi masalah itu dapat diatasi oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Presiden Soekarno bahkan memberi mandat kepada Syahrir untuk membentuk Kabinet Syahrir yang ketiga. *Coup* yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan agar Syahrir mundur tersebut dikenal dengan peristiwa 3 Juli 1946.

¹⁹ St.Rais Alamsyah, *op.cit*, hlm. 141.

Kabinet Syahrir yang ketiga ini kemudian melanjutkan kembali menyelesaikan persoalan RI dengan Belanda. Atas usul Inggris, maka RI dan Belanda bersedia mengadakan perundingan perdamaian. Syahrir sebagai Perdana Menteri RI memimpin delegasi RI dalam perundingan tersebut. Perundingan itu juga dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Perundingan itu menghasilkan suatu persetujuan yang dikenal dengan Persetujuan Linggajati. Keputusan-keputusan dalam Persetujuan Linggajati itu juga didukung oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Dalam pemerintahan RI, tiga kali Syahrir menjadi Perdana Menteri, dua kali menjadi Menteri Dalam Negeri dan tiga kali menjadi Menteri Luar Negeri. Selama itu pula menjadi ketua delegasi RI dalam perundingan antara Indonesia-Belanda.²⁰

Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama dalam negara Indonesia merdeka memperjuangkan pengakuan internasional atas kemerdekaan RI melalui perundingan yang berakhir dengan Persetujuan Linggajati sebagai tahap pertama. Bung Hatta dengan mempertaruhkannya sebagai wakil presiden dan kedudukan Soekarno sebagai presiden, berhasil mendapat persetujuan sidang pleno Komite Nasional Indonesia atas persetujuan tersebut.²¹ Hal itu disebabkan adanya pendapat yang mengatakan bahwa cara berunding atau cara berdiplomasi dengan Belanda hanya membawa kemunduran dalam perjuangan bangsa Indonesia. Selain itu Bung Hatta juga mengatakan :²²

Sesudah Persetujuan Linggajati kita mendapat pengakuan *de facto*, bahkan ada yang *de jure* seperti dari Mesir dan Afganistan. Ini semuanya dapat kita peroleh justru karena kita menandatangani Linggajati. Tanpa Linggajati perjuangan

²⁰ *Ibid*, hlm. 144.

²¹ Ny. Siti Wahjunah Syahrir, *op.cit.*, hlm. 478.

²² Aboe Bakar Lubis, *op.cit.*, hlm. 304-305.

kita akan lebih sulit. Perjuangan untuk memperoleh pengakuan internasional adalah penting sekali dan tujuan ini dapat kita peroleh lewat Linggajati. Jadi ini sebenarnya adalah kemajuan besar dan bukan kemunduran. Dari sejak mula kita sangat menginginkan agar masalah Indonesia menjadi masalah internasional, sedangkan Belanda berusaha keras untuk membuatnya sebagai masalah dalam negerinya dan ke mana-mana ia mengatakan bahwa masalah Hindia-Belanda adalah masalah Belanda-Indonesia saja. Jika kita ingin memperkuat kedudukan kita dan tidak ingin dipermainkan oleh Belanda, maka tujuan ini mesti segera kita capai. Ketika Belanda melanggar Linggajati dengan melancarkan Agresi Militer Belanda I terhadap RI, serta merta masalah Indonesia dicantumkan dalam agenda DK-PBB. Belanda tidak dapat berbuat apa-apa. Sejak itu tercapailah tujuan kita untuk menjadikan Indonesia menjadi masalah dunia. Belanda berusaha keras untuk mencegahnya, tetapi masalah Indonesia tetap diakui sebagai masalah internasional dan bukan lagi masalah Indonesia-Belanda saja. Disamping itu DK-PBB menunjuk pula KTN sebagai penengah sengketa Indonesia-Belanda itu. Ini bukanlah suatu kemajuan? Dengan demikian tidak dapat dibantah bahwa peristiwa ini sangat besar artinya bagi perjuangan Indonesia melawan Belanda. Hal ini tidak dapat dikatakan kemunduran. Ini sebenarnya adalah kemajuan besar yang tak mungkin kita peroleh begitu segera tanpa Persetujuan Linggajati.

Dalam pelaksanaan Persetujuan Linggajati banyak terjadi pelanggaran, khususnya dari pihak Belanda. Sebelum pelanggaran-pelanggaran dapat diatasi, Kabinet Syahrir mengembalikan mandat kepada presiden pada tanggal 27 Juni 1947. Syahrir walaupun sudah tidak menjadi perdana menteri tetap berperan dalam perjuangan kita. Syahrir tetap bekerjasama dengan para pemimpin perjuangan kita, antara lain Soekarno dan Hatta. Syahrir menjadi penasihat presiden, yang juga ditangkap bersama dengan Soekarno dan Hatta serta para menteri lainnya ketika Belanda melancarkan Agresi Militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948.

Sebelum mereka ditangkap, dalam memorandumnya tertanggal 5 Mei 1948 kepada wakil presiden (Perdana Menteri Hatta), Syahrir secara rinci mengajukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat posisi RI dalam menghadapi Belanda pada waktu itu, yang pada pokoknya terdiri dari dua hal, yaitu memusatkan

kekuatan dan pimpinan perjuangan di Sumatra dan memperkuat perjuangan di luar negeri. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai persiapan ke arah itu antara lain pembentukan Komisariat Pemerintah untuk Sumatra dan penempatan perwira-perwira terpilih Angkatan Perang di Sumatra. Sebelum persiapan-persiapan yang dilakukan selesai, PKI memberontak dan segera sesudah itu Belanda menyerang. Walaupun begitu tokoh-tokoh yang sudah berada di Sumatra secara mental telah siap untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan jika pada suatu waktu Belanda menyerang lagi dan pemerintah di Yogya tidak berdaya. Hal inilah yang terjadi setelah Yogya jatuh.²³

Dengan demikian nampak sekali bahwa kerjasama antara Hatta dengan Syahrir terus berlangsung selama perjuangan kemerdekaan kita. Setelah RI menerima pengakuan kedaulatan dari Belanda yang diwakili Hatta dalam KMB, hubungan Hatta dengan Syahrir tetap terjalin dengan baik.

B. Kerjasama Hatta dengan tokoh-tokoh Luar Negeri.

Kerjasama dengan tokoh-tokoh luar negeri dilakukan Hatta supaya Indonesia benar-benar diakui oleh dunia internasional bahwa Indonesia menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan penuh. Selain itu supaya mereka juga mendukung dan membantu perjuangan Indonesia. Tokoh-tokoh luar negeri yang akan penulis bahas dalam penelitian ini antara lain : Nehru dan anggota Komisi Jasa-Jasa Baik (KTN).

1. Kerjasama Hatta dengan Nehru

²³ *Ibid*, hlm. 274-275.

Nehru adalah Perdana Menteri India dan merupakan tokoh terkemuka di India. Nama lengkapnya Pandit Jawaharlal Nehru. Hatta mengenal Nehru mula-mula di Kongres Liga Kolonial untuk kemerdekaan bangsa-bangsa, pada bulan Februari 1927 di Brussel, Belgia. Nehru mewakili India dalam partai Kongres. Perkenalan itu mulanya biasa saja. Akan tetapi dengan berkali-kali berbicara masalah kolonial dan perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memerdekakan diri, mereka sampai pada pendirian yang sama, yaitu prinsip *non-cooperation* dalam perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah.²⁴

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan penyerangan terhadap RI yang dikenal dengan Agresi Militer I. Ketika itu Hatta masih berada di Sumatra. Oleh karena itu Hatta diutus Soekarno melalui seorang pilot bernama Patnaik supaya pergi ke India menemui Nehru, untuk minta bantuan senjata dalam menghadapi Belanda. Hatta kemudian pergi ke India bersama Patnaik dengan menyamar sebagai seorang *co-pilot* dengan nama samaran Abdullah. Hatta pergi ke India menemui Nehru dan menyampaikan maksud kedatangannya. Nehru yang telah ditentukan akan menjadi Perdana Menteri India menyatakan belum dapat memberi bantuan senjata, karena kekuasaan pemerintahan yang mulai diserahkan kepada India belum termasuk bidang tentara dan persenjataan. Akan tetapi Nehru akan memberi bantuan sebanyak mungkin, yaitu dibidang percaturan politik di forum internasional untuk memperkuat kedudukan Indonesia dalam konferensi-konferensi internasional, dalam pers dunia, PBB dengan segala organisasi-organisasi yang bernaung di bawahnya, dan

²⁴ Z. Yasni, *op. cit.*, hlm.274-275.

sebagainya.²⁵ Nehru juga yang mendorong DK-PBB membicarakan Agresi Belanda tersebut.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan Agresi Militernya yang kedua. Belanda sebelum menyerang Yogya, di Ibukota Republik itu ada seorang utusan resmi dari Pemerintah Burma bernama Thakin Tha Kin, yang sengaja dikirim untuk melihat perkembangan perjuangan rakyat Indonesia dan jika mungkin memberi bantuan sedapatnya. Ketika Belanda menyerang Yogya, ia berhasil keluar dari Indonesia. Thakin Tha Kin kemudian memberi laporan kepada pemerintahnya tentang Indonesia dan perkembangan terakhir. Pemerintah Burma menarik kesimpulan bahwa harus diadakan suatu konferensi internasional untuk membantu RI. Akan tetapi Burma menyadari bahwa negerinya terlalu kecil dan lemah untuk menyelenggarakan konferensi itu. Lagipula Burma sedang menghadapi keadaan dalam negeri yang gawat berhubungan dengan pemberontakan komunis. Oleh karena itu pemerintah Burma mengirim satu delegasi yang terdiri dari U Kyaw Nyein (Menteri Luar Negeri), Bo Khin Maung Gale (Menteri Pertanian), U Soe Tin (Menteri Perdagangan) dan Thakin Tha Kin (sekretaris politik) ke New Delhi untuk mengusulkan kepada PM Nehru supaya India dapat menyelenggarakan konferensi itu. Usul ini disetujui oleh Nehru, dan pada bulan Januari 1949 diadakan *Asian Conference on Indonesia*. Konferensi itu dilaksanakan dengan diketuai PM. Nehru dan dihadiri oleh sembilan belas negara, termasuk tuan rumah, Mesir, Australia dan

²⁵ *Ibid*, hlm. 151-152. Lihat juga Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 306-307.

New Zealand.²⁶ Konferensi itu mengambil keputusan yang keras, tetapi mereka harus puas dengan kompromi yang dirumuskan dalam resolusi DK PBB tanggal 28 Januari 1949 :²⁷

1. Mendesak Belanda untuk dengan segera dan sungguh-sungguh menghentikan operasi militernya dan mendesak pemerintah RI untuk memerintahkan kesatuan-kesatuan gerilya supaya segera menghentikan aksi gerilya mereka.
2. Mendesak Belanda untuk membebaskan dengan segera dan tanpa syarat Presiden dan Wakil Presiden beserta tawanan politik yang ditahan sejak 17 Desember 1948 di wilayah RI. Pengembalian pegawai-pegawai RI ke Yogya agar mereka dapat disertai tugas sesuai dengan pasal 1 di atas, dan supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dalam suasana yang benar-benar bebas.
3. Menganjurkan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar Persetujuan Linggajati dan Renville dan usul-usul Cochran; dalam perundingan itu supaya disusun rencana pembentukan Pemerintah Federal Sementara pada tanggal 15 Maret 1949, yang diberi hak menyelenggarakan urusan intern, penyelenggaraan pemilihan Majelis Konstituante paling lambat tanggal 1 Oktober 1949, dan penyerahan kedaulatan atas Indonesia kepada NIS paling lambat tanggal 1 Juli 1950.
4. Sebagai tambahan dari putusan DK, KTN diubah menjadi UNCI (*United Nations Commission for Indonesia* : Komisi PBB untuk Indonesia) dengan kekuasaan yang lebih besar dan dengan hak mengambil keputusan yang

²⁶ Aboe Bakar Lubis, *op.cit.*, hlm. 289-290.

²⁷ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid II*, Kanisius : Yogyakarta, 1988, hlm. 46-47.

mengikat atas dasar mayoritas. UNCI diberi kuasa untuk memberikan rekomendasi (anjuran) kepada DK dan pihak-pihak yang bersengketa, membantu mereka mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi DK.

Resolusi DK-PBB tersebut walaupun belum sepenuhnya memuaskan RI, tetapi sudah dapat meringankan RI. Hal itu tidak terlepas dari adanya konferensi inter-Asia tentang Indonesia yang dipimpin oleh Nehru. Nehru benar-benar merupakan sahabat Indonesia. Sesudah Agresi Militer Belanda II, Nehru juga banyak bertindak dan memperkuat semua siasat yang dilakukan oleh bangsa Indonesia.

2. Kerjasama Hatta dengan anggota Komisi Jasa-Jasa Baik

Bagi Hatta, hubungan pribadinya yang dekat dengan para anggota Komisi Jasa-Jasa Baik, terutama wakil-wakil Australia dan Amerika Serikat, akan memainkan peran penting dalam pencapaian akhir perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hatta selalu mendukung konsep tentang suatu forum dan peradilan internasional untuk melindungi kepentingan bangsa-bangsa yang lebih lemah.²⁸

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan atas RI yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda I. Banyak reaksi atas tindakan Belanda mengadakan penyerangan terhadap RI tersebut. Pada tanggal 25 Agustus 1947 Amerika Serikat mengusulkan kepada DK-PBB agar dibentuk suatu *Committee of Good Offices* (Komisi Jasa-Jasa Baik). Usul ini diterima DK-PBB dan dijadikan keputusan. Atas dasar keputusan DK-PBB tersebut maka Belanda memilih Belgia, RI memilih Australia sebagai wakilnya dan sebagai negara ketiga mereka memilih

²⁸ Mavis Rose, *op.cit.*, hlm. 233.

Amerika Serikat. Komisi ini juga dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Dalam hal ini para pemimpin Indonesia berusaha untuk bekerjasama dengan wakil mereka terutama Australia dan Amerika Serikat.

Pada awal tugasnya, Amerika Serikat mengirim Prof. Frank P. Graham sebagai anggota KTN, sedangkan Australia mengirim Richard Kirby. KTN pada awal tugasnya menghadapi tugas yang sangat sukar tetapi wewenangnya terbatas. Akan tetapi secara mengherankan dapat mencapai sukses berkat salah seorang anggotanya Prof. Frank P. Graham dari Amerika Serikat. Sukses itu juga disebabkan oleh kesediaan RI mempercayainya sepenuhnya.²⁹ RI setelah penyerangan Belanda mengalami kerugian yang besar. Oleh karena itu Belanda yakin akan sanggup menghancurkan RI. Maka Graham dengan bantuan rekannya, Kirby berusaha menjaga agar RI tidak mengalami kehancuran. Graham dan Kirby lebih bersimpati terhadap Indonesia.

Ketika persetujuan Renville berlangsung, Graham mengusulkan kepada RI supaya RI bersedia menerima persetujuan gencatan senjata dengan garis demarkasi Van Mook, 12 pasal usul Belanda yang kemudian menjadi Dasar-Dasar Politik Renville dan 6 pasal tambahan KTN. RI pada mulanya berkeberatan menerima ketiga naskah tersebut karena khawatir kalau RI akan kehilangan kekuasaannya dimasa peralihan. Atas kekhawatiran RI tersebut Graham menjamin RI dengan mengatakan "*you are what you are*" yang berarti anda adalah anda (anda seperti keadaan sekarang).

²⁹ G.Moedjanto, *op.cit.*, hlm.19.

Kedudukan RI tetap ada seperti sekarang.³⁰ Selain itu Graham juga menyakinkan RI bahwa hanya dengan penerimaan ketiga naskah persetujuan itu pemerintah Amerika Serikat melindungi RI dari setiap tindakan kekerasan Belanda. Jika RI menerimanya Amerika Serikat juga akan menggunakan segala pengaruhnya agar ketentuan plebisit yang besar akan terselenggara di bawah pengawasan PBB.³¹ Dengan adanya jaminan itu maka RI menerima ketiga naskah tersebut. Para pemimpin RI berkeyakinan bahwa plebisit yang bebas akan menghasilkan kemenangan bagi RI. Ucapan Graham "you are what you are" tersebut menjengkelkan delegasi Belanda dan sejak itu Belanda tidak mempercayai Graham lagi. Graham meninggalkan Indonesia setelah persetujuan Renville ditandatangani.³² Demikian juga wakil Australia, Richard Kirby.

Setelah persetujuan Renville ditandatangani, Kabinet Amir mengembalikan mandat dan diganti dengan kabinet Hatta. Sementara itu perundingan dengan Belanda mengenai pelaksanaan persetujuan Renville dilanjutkan kembali. Amerika Serikat mengirimkan wakilnya sebagai anggota Komisi Jasa-jasa baik, yaitu Court Dubois, sedangkan Australia mengirimkan Critchly. Dubois merupakan pengganti Graham, sedangkan Critchly pengganti Kirby. Perundingan RI dengan Belanda mengenai pelaksanaan persetujuan Renville mengalami kemacetan. Untuk mengatasi hal itu, wakil-wakil Amerika Serikat dan Australia berusaha mencari kompromi yang realistis yang disebut Dubois-Critchly Plan. Pada prinsipnya RI Menerima Dubois-Critchly Plan. Akan tetapi Belanda menolaknya, bahkan Belanda menuduh Amerika

³⁰ *Ibid*, hlm. 21.

³¹ *Ibid*, hlm. 22. Lihat juga A.H. Nasution, *Sedjarah Perdjuaangan Nasional di bidang Bersendjata*, Firma Mega Bookstore : Djakarta, 1966, hlm. 114.

³² Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*, Sinar Harapan : Jakarta, 1983, hlm. 349.

Serikat dan Australia bertindak melampaui wewenangnya. Akhirnya perundingan mengalami kemacetan kembali. Dubois dan Critchly yang berusaha untuk mengatasi persoalan Indonesia secara menyeluruh akhirnya mengalami kegagalan.

Amerika Serikat kemudian mengirimkan anggotanya untuk Komisi Jasa-Jasa Baik, yaitu Merle Cochran. Cochran menggantikan Dubois sebagai wakil pemerintah Amerika Serikat dalam komisi dan kemudian di dalam komisi PBB untuk Indonesia. Cochran dalam hubungan dengan kedua pihak sangat obyektif dan berpegang pada aturan tata tertib yang berlaku bagi perundingan. Adanya perundingan yang macet, pada bulan september 1948 KTN mengusahakan agar perundingan dapat dibuka. Cochran mengajukan rencana penyelesaian yang dikenal sebagai rencana Cochran. Dasarnya adalah Dubois Critchly plan yang diubah dengan memberikan sejumlah konsesi kepada Belanda. RI kecewa karena Cochran dianggap mengorbankan sejumlah kepentingan RI, sedangkan Belanda belum puas karena dianggap belum memadai. Oleh karena itu usaha Cochran gagal.³³

Pada tanggal 13 September 1948, Hatta minta kepada Cochran supaya perundingan dapat dibuka kembali. Cochran menyetujui permintaan Hatta tersebut. Akan tetapi usaha untuk membuka perundingan itu dibalas oleh Belanda dengan suatu ultimatum dan tidak memberi kesempatan kepada Hatta untuk menjawabnya. Akibatnya aksi militer Belanda kedua dilancarkan.³⁴

Reaksi dunia atas aksi militer Belanda kedua tersebut luar biasa. Atas tindakan Belanda tersebut PBB mengeluarkan resolusi-resolusi. Resolusi yang paling

³³ G.Moedjanto, *op.cit*, hlm. 289-290.

³⁴ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit*, hlm 349.



menentukan adalah resolusi tertanggal 28 Januari 1949. Akan tetapi pihak Belanda tidak segera mau menerima resolusi tersebut karena ia yakin RI benar-benar akan hancur. Oleh karena itu RI berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa RI masih ada dan TNI masih kuat. Atas prakarsa Sri sultan HB IX, maka RI melancarkan serangan umum secara besar-besaran terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta. Serangan itu dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949.

Dalam penyerangan itu kota Yogya dapat diduduki RI selama 6 jam. Dengan keberhasilan ini maka dunia mengetahui kalau Belanda bohong. Serangan umum itu juga dapat mempengaruhi pandangan dunia khususnya DK-PBB. Oleh karena itu Amerika Serikat sikapnya menjadi semakin tegas terhadap Belanda. Atas ketegasan Amerika Serikat itu maka pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan yang dikenal dengan perundingan Roem-Royen. Perundingan itu menghasilkan beberapa ketentuan persetujuan Roem-Royen. Atas desakan Cochran maka RI bersedia menerimanya. Cochran menjanjikan bantuan ekonomi Amerika Serikat untuk RI sesudah penyerahan kedaulatan.

Merle Cochran telah berusaha untuk dapat memberikan peranannya yang positif bagi penyelesaian perang di Indonesia. Menginsyafi bahwa selalu terdapat dua posisi yang bertentangan, yaitu sikap Indonesia dan Belanda, maka Cochran memperlihatkan bahwa dia selalu ingin bertindak netral dan tidak memihak.³⁵ Hatta juga selalu berusaha menerima usul-usul Cochran dalam menyelesaikan masalah dengan Belanda. Cochran juga selalu siap dengan usul-usul baru dalam perundingan-

³⁵ Basuki Suwarno, *Hubungan Indonesia-Belanda Periode 1945-1950*, PT.Setia Acnees: Jakarta, 1999, hlm. 380.

perundingan, jika perundingan kurang berjalan lancar. Cochran juga mengusulkan supaya Indonesia tidak dibebani hutang yang sangat besar setelah penyerahan kedaulatan. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil.

Dalam pembicaraannya dengan seorang pejabat Kementrian Luar Negeri Belanda bernama Hirschfeld, Cochran mengatakan bahwa bangsa Indonesia, yaitu yang ditangani selama ini, mempunyai keinginan serius untuk mengembalikan ketertiban di Indonesia dan ia menyatakan kekagumannya pada tindakan Hatta, yang telah menghancurkan pemberontakan komunis.³⁶ Hasil peran yang dimainkan oleh Cochran dapat kita ketahui, karena dia telah dapat menyebabkan KMB berhasil baik, perang berakhir dan terjadi pengakuan kedaulatan terhadap RI, kecuali Irian Barat yang waktu itu masih harus kita perjuangkan.³⁷ Selain itu atas kegigihan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Bung Hatta dan peran UNCI dengan Cochran sebagai ketua dalam KMB, beban hutang bagi Indonesia akhirnya tidak terlampau berat.

Demikianlah pembahasan tentang bentuk-bentuk perjuangan Mohammad Hatta. Untuk bab selanjutnya adalah tentang peranan Mohammad Hatta sekitar persetujuan Renville hingga penyerahan kedaulatan.

³⁶ *Ibid*, hlm. 377.

³⁷ *Ibid*, hlm. 380.

BAB IV

PERANAN MOHAMMAD HATTA SEKITAR

PERSETUJUAN RENVILLE HINGGA PENYERAHAN KEDAULATAN

A. Peranan Hatta dalam pelaksanaan Persetujuan Renville

Persetujuan Renville diadakan di Kapal Amerika Serikat, Renville pada tanggal 8 Desember 1947, dan ditandatangani pada tanggal 17 dan 19 Januari 1948. Kabinet yang berkuasa di RI pada waktu itu adalah Kabinet Amir. Akan tetapi Kabinet Amir tidak dapat melaksanakan hasil-hasil persetujuan Renville. Oleh karena itu pada tanggal 23 Januari 1948 Kabinet Amir mengembalikan mandat kepada presiden. Presiden Soekarno segera menunjuk Mohammad Hatta (sebagai wakil presiden) untuk membentuk kabinet baru.

Pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Hatta dibentuk, dengan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Kabinet Hatta inilah yang melaksanakan persetujuan Renville. Dengan demikian Kabinet Hatta adalah pelaksana persetujuan Renville. Ada pun susunan Kabinet Hatta adalah sebagai berikut :¹

Perdana Menteri	: Mohammad Hatta
Menteri Luar Negeri	: H. Agus Salim
Menteri Dalam Negeri	: dr. Soekiman
Menteri Pertahanan	: Mohammad Hatta
Menteri Keuangan	: Mr. A.A. Maramis
Menteri Perhubungan	: Ir. Djuanda
Menteri Penerangan	: Mohammad Natsir
Menteri Kesehatan	: dr. Leimena
Menteri Perburuhan dan Sosial	: Kusnan
Menteri Kehakiman	: Mr. Susanto Tirtoprodjo
Menteri PP dan K	: Mr. Ali Sastroamidjojo
Menteri Pekerjaan Umum	: Ir. Laoh

¹ Mohammad Hatta, *Memoir*, Tintarnas Indonesia : Jakarta, 1978, hlm. 521.

Menteri Kemakmuran	: Mr. Syafrudin Prawiranegara
Menteri Pembagian Makanan Rakyat	: I.J. Kasimo
Menteri Agama	: K.H. Maskur
Menteri Negara	: Sri Sultan HB IX
Menteri Pembangunan dan Pemuda	: Supeno

Program Kabinet Hatta terdiri dari 4 pasal, yaitu :²

1. Melaksanakan ketentuan-ketentuan persetujuan Renville dan melanjutkan perundingan dengan Belanda dengan perantara KTN.
2. Mempercepat pembentukan NIS yang merdeka dan berdaulat.
3. Rasionalisasi tentara dan ekonomi RI.
4. Pembangunan kembali kerusakan-kerusakan yang disebabkan perang dan pendudukan Jepang.

Setelah Kabinet Hatta terbentuk, maka kabinet ini segera melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan Renville. Dalam melaksanakan persetujuan Renville tersebut Kabinet Hatta mulai melaksanakan ketentuan persetujuan Renville yang sangat dipertentangkan, yaitu pengakuan garis demarkasi Van Mook. Pada tanggal 26 Februari 1948 Kesatuan Tentara Nasional Indonesia yang berjumlah 35.000 orang telah meninggalkan daerah-daerah di belakang garis demarkasi di Jawa Barat yang dikenal dengan istilah Kantong, menuju ke daerah RI yang bebas. Ini sebenarnya hal yang sulit bagi Pemerintah RI untuk mengharuskan mereka berhijrah karena kantong-kantong itu dapat dipertahankan secara efektif oleh kesatuan-kesatuan gerilya RI. Akan tetapi karena adanya jaminan dari KTN bahwa kelak akan ada plebisit di bawah pengawasan mereka, maka mereka mau berhijrah.³

² G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2*, Kanisius : Yogyakarta, hlm. 24.

³ *Ibid.*

Dalam meneruskan perundingan dengan Belanda tentang pelaksanaan Renville, pemerintah Hatta menunjuk Mr. Mohammad Roem sebagai Ketua delegasi RI. Akan tetapi dari pihak Belanda justru selalu menunda perundingan tentang pelaksanaan persetujuan Renville. Oleh karena itu perundingan mengalami kemacetan. Untuk mengatasi kemacetan tersebut wakil-wakil Amerika Serikat dan Australia berusaha mencari kompromi yang realistis, yang disebut Dubois-Critchly Plan. Pada prinsipnya RI menerima Dubois-Critchly Plan, tetapi Belanda menolak.

Penolakan Belanda terhadap Dubois-Critchly Plan menyebabkan perundingan antara Indonesia-Belanda mengalami kemacetan. Oleh karena itu pada bulan September 1948 KTN mengusahakan kembali agar perundingan dapat dibuka. Wakil Amerika Serikat yang baru, Merle Cochran mengajukan rencana penyelesaian yang dikenal sebagai rencana Cochran. Dasarnya adalah Dubois-Critchly Plan yang diubah dengan memberikan sejumlah konsesi kepada Belanda. RI kecewa karena Cochran dianggap mengorbankan sejumlah kepentingan RI, sedangkan Belanda belum puas karena belum dianggap memadai. Oleh karena itu usaha Cochran gagal.⁴

Persoalan RI dengan Belanda belum selesai, tetapi Kabinet Hatta harus menghadapi persoalan baru yang datang dari dalam negeri, yaitu pemberontakan PKI tanggal 18 September 1948 di Madiun. Akan tetapi pemberontakan itu dapat ditumpas oleh Kabinet Hatta, khususnya oleh pasukan Siliwangi.

Setelah pemberontakan PKI Madiun dapat diatasi, Hatta segera pergi ke Sumatra untuk menyelesaikan perselisihan antara para komandan militer RI dan Belanda di Tapanuli. Perselisihan tersebut merupakan perselisihan mengenai masalah

⁴ *Ibid.*

perbatasan wilayah RI dengan wilayah Belanda. Tentara Belanda ingin menguasai lebih banyak wilayah Sumatra dengan mengatasnamakan pemulihan keamanan dan ketertiban.

Ketika berada di Sumatra Barat, Hatta mulai melakukan persiapan-persiapan untuk mengalihkan pemerintahan Republik ke Bukittinggi, jika terjadi serangan lebih lanjut dari pihak Belanda di Jawa. Ia memerintahkan menteri kemakmuran, Syafrudin Prawiranegara untuk tetap berada di Bukittinggi. Hatta telah mengatur dengan Nehru melalui konsul India, supaya Soekarno dan Syahrir diterbangkan ke India untuk mengangkat persoalan Republik di luar negeri dan melindungi Soekarno dari ancaman Belanda. Ia sendiri berharap dapat tetap menjalankan jabatannya sebagai perdana menteri di Bukittinggi, jika Yogyakarta dikuasai.⁵

Pada tanggal 1 November 1948 Menteri Luar Negeri Belanda, Stikker membuka perundingan langsung dengan pihak RI. Akan tetapi perundingan itu tidak membawa hasil. Sebelum berangkat kembali ke Nederland pada tanggal 11 November 1948, Hatta memberikan *aide memoire* (penjelasan tambahan) tentang pendirian RI. Isi penjelasan tambahan tersebut adalah Hatta menyetujui bahwa selama periode antara menjelang dibentuknya Negara Indonesia Serikat, “kalau pemerintah federal Indonesia mengakui bahwa memang timbul situasi yang tidak aman, maka Wakil Tinggi Kerajaan akan diperbolehkan menggunakan pasukan Belanda untuk mengatasinya”. Hatta mengakui bahwa pasukan bersenjata Republik sebagian akan digabungkan menjadi tentara federal dalam periode peralihan. Hanya dalam situasi

⁵ Mavis Rose, *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta*, PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 1991, hlm. 259-260.

daruratlah pemerintah federal akan minta bantuan dari pasukan Belanda dan hanya dalam situasi seperti itulah, Wakil Tinggi Kerajaan akan bertanggung jawab atas seluruh pasukan.⁶ Akan tetapi ketika Stikker kembali lagi ke Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 1948 yang disertai oleh Sassen (Menteri Urusan Seberang), Hatta menyatakan bahwa tafsiran Stikker tentang *aide memoire*-nya tidak betul. Stikker menganggap bahwa Hatta mau membiarkan pasukan Belanda memasuki wilayah manapun di Indonesia.

Pembicaraan antara RI dengan Belanda terputus karena terhalang oleh persoalan kekuasaan-kekuasaan Komisaris Tinggi Mahkota selama peralihan, yaitu selama Pemerintah Federal Sementara berfungsi. Belanda menuntut agar Komisaris Tinggi Mahkota memiliki kekuasaan menggerakkan pasukan Nederland ke daerah-daerah yang dianggap ada gangguan keamanan dan ketertiban. Pada tanggal 13 Desember 1948 Hatta minta kepada Cochran agar perundingan dapat dibuka kembali. Ia menyatakan bahwa RI bersedia mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi Belanda harus terikat oleh beberapa pembatasan tertentu. RI juga mengakui hak veto Komisaris Tinggi Mahkota, tetapi harus ada batas-batasnya. Belanda kemudian memberikan jawaban yang ultimatif, yang menuntut agar pihak RI menyetujui usul-usulnya dalam waktu 18 jam. Bagi RI, waktu 18 jam untuk mempelajari usul dan menyusun jawaban adalah terlalu singkat. Sementara itu KTN telah mengirim kawat laporan perkembangan terakhir pada tanggal 12 Desember. Akan tetapi tidak ada jawaban karena DK-PBB baru akan bersidang lagi sesudah Natal. Hal ini sudah diperhitungkan oleh pihak Belanda. Oleh karena itu Belanda

⁶ *Ibid*, hlm. 260.

melancarkan agresinya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948.⁷ Dengan demikian tamat pulalah riwayat persetujuan Renville.

Dalam agresinya yang kedua ini Belanda berhasil menawan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Sutan Syahrir (penasihat presiden) dan sejumlah menteri termasuk menteri luar negeri, Agus Salim. Akan tetapi sebelum mereka ditawan, presiden masih sempat mengirimkan radiogram berisi pemberian kekuasaan negara kepada Menteri Kemakmuran, Syafrudin Prawiranegara yang sedang mengadakan perjalanan ke Sumatra, untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Jika karena sesuatu hal Syafrudin tidak dapat menjalankan tugas, Presiden memerintahkan Soedarsoso, Palar dan Maramis yang ada di New Delhi untuk membentuk Pemerintahan Pelarian (*Exile Government*).⁸

Pada tanggal 23 Desember 1948 PDRI di Sumatra berhasil mengirimkan perintah kepada wakil RI di PBB yang isinya, pemerintah RI bersedia memerintahkan penghentian tembak-menembak dan memasuki perundingan dengan Belanda atas dasar :⁹

1. Pembebasan segera anggota-anggota pemerintahan RI yang kini ditawan Belanda.
2. Penarikan mundur tentara Belanda ke tempat kedudukan semula (sebelum tanggal 19 Desember 1948).
3. Pengakuan *de facto* dan *de jure* atas kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra.

⁷ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 29.

⁸ *Ibid*, hlm. 42.

⁹ *Ibid*, hlm. 43.

4. Pembentukan pemerintahan yang seluruhnya Indonesia atas dasar demokrasi yang merdeka dan berdaulat oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan Belanda.
5. Penarikan mundur seluruh tentara Belanda dari Indonesia setelah pembentukan pemerintahan yang sepenuhnya Indonesia. Kepentingan Indonesia akan dilindungi secara wajar.

Pada tanggal 28 Januari 1949 DK-PBB mengeluarkan resolusi, yang isi pokoknya adalah DK-PBB menghendaki supaya perundingan antara Indonesia-Belanda dibuka kembali dengan lebih dahulu menghentikan peperangan yang timbul akibat Aksi Militer Belanda, dan melepaskan semua tahanan politik. Akan tetapi Belanda tidak segera bersedia menerima resolusi tersebut. Oleh karena itu pertempuran-pertempuran antara gerilyawan RI dengan tentara Belanda masih terus terjadi.

B. Peranan Hatta dalam penerimaan penyerahan kedaulatan RI

Pada tanggal 1 Maret 1949, atas inisiatif Sri Sultan Hamengku Buwono IX, RI mengadakan serangan terhadap Belanda. Serangan itu dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949. Dalam penyerangan ini RI berhasil menduduki ibukota Yogyakarta selama 6 jam. Serangan Umum ini merupakan kemenangan politis yang menyebabkan naiknya prestise bangsa Indonesia di dunia internasional. Oleh karena itu Amerika Serikat semakin tegas terhadap Belanda. Atas ketegasan Amerika Serikat tersebut maka pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan kembali antara RI dengan Belanda. RI diwakili oleh Mohammad Roem, sedangkan Belanda diwakili

oleh Van Royen. Pada tanggal 7 Mei 1949 dicapai persetujuan Roem-Royen. Ketentuan-ketentuan persetujuan Roem-Royen adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Pengeluaran perintah oleh pihak RI kepada kesatuan-kesatuan bersenjata RI untuk menghentikan perang gerilya, sedangkan pemerintah dan pemimpin-pemimpin RI dipulihkan kembali ke Yogyakarta.
2. Kerjasama dalam pemulihan perdamaian dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
3. Belanda akan menyokong RI untuk menjadi negara bagian dari RIS dengan mempunyai sepertiga suara dalam Perwakilan Federal.
4. Ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan tanpa syarat, nyata dan lengkap.

Setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 PDRI mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Dengan demikian tanggung jawab selanjutnya terletak pada Presiden Soekarno, dan Hatta secara resmi memulai kembali peranannya sebagai perdana menteri.

Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949. Peserta konferensi adalah para utusan dari RI yang diketuai oleh Hatta, dari Pertemuan Musyawarah Federal (PMF) dengan ketua Sultan Hamid, dan dari Belanda dengan ketua Van Maarseven (Menteri Wilayah Seberang Lautan). Konferensi dipimpin oleh PM Dress dari Belanda, didampingi oleh KTN.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm. 53.

¹¹ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, LP3ES : Jakarta, 1990, hlm. 357.

Menjelang penyerahan kedaulatan, dilakukan persiapan-persiapan yang perlu, yaitu membentuk pemerintah RIS, memilih presiden RIS dan menyusun parlemen sementara. Hal itu dilakukan karena penyerahan kedaulatan dilaksanakan jika RI menjadi negara bagian dari RIS.

Hatta menekankan bahwa persetujuan KMB lebih baik hasilnya daripada hasil persetujuan Linggajati dan Renville. Bahkan dengan adanya KMB RI seakan-akan sudah diakui secara *de jure* oleh dunia internasional. Soal Irian Barat, Hatta meminta kesabaran dari penduduk di Irian. Hatta optimis dalam hal ini bahwa Irian Barat akan merdeka juga. Hatta juga mengingatkan bahwa kedaulatan yang akan diserahkan sebagai hasil KMB bersifat penuh, tidak bersyarat dan tidak dapat dibatalkan kembali.¹²

Pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet RIS dibentuk dan tersusun sebagai berikut:¹³

Perdana Menteri	: Mohammad Hatta
Menteri Luar Negeri	: Mohammad Hatta
Menteri Pertahanan	: Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Menteri Dalam Negeri	: Anak Agung Gde Agung
Menteri Keuangan	: Syafrudin Prawiranegara
Menteri Perekonomian	: Ir. Djuanda
Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum	: Ir. Laoh
Menteri Kehakiman	: Prof. Mr. Soepeno
Menteri P dan K	: dr. Abu Hanifah
Menteri Kesehatan	: dr. I. J. Leimena
enteri Perburuhan	: Mr. Wilopo
Menteri Sosial	: Mr. Kosasih Purwanegara
Menteri Agama	: K.H. Wahid Hasyim
Menteri Penerangan	: A. Mononutu
Menteri Negara	: Sultan Hamid Alkadri II

¹² *Ibid*, hlm. 361.

¹³ Mohammad Hatta, *op. cit.*, hlm. 556.

Mr. Mohammad Roem
dr. Soeparno

Bagi Hatta pekerjaan dalam KMB merupakan karya monumental dalam perjuangannya sampai pada waktu itu. Puncak kerja monumental itu adalah penerimaan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal 27 Desember 1949 itu Hatta sebagai ketua delegasi RIS dalam KMB menerima penyerahan dan pengakuan kedaulatan RIS dari Ratu Juliana.

Peranan Hatta yang lain adalah Proklamasi 17 Agustus 1945. Hatta bersama Soekarno merupakan proklamator kemerdekaan RI. Kedua hal tersebut, yaitu penerimaan penyerahan kedaulatan dan Proklamasi Kemerdekaan 19 Agustus 1945 merupakan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu juga dirasakan oleh Bung Hatta sebagai peristiwa yang sangat penting. Ketika ditanya mengenai pengalaman Bung Hatta yang paling mengesankan Bung Hatta menjawab bahwa hal yang paling memberi kebahagiaan baginya adalah ikut memproklamasikan Indonesia merdeka dan ikut melaksanakan KMB.¹⁴

Setelah penyerahan dan pengakuan kedaulatan diserahkan kepada RIS, maka RIS benar-benar menjadi negara yang merdeka. Begitu menjabat dalam Republik Indonesia serikat (RIS), Hatta dan kawan-kawannya mulai mengkonsolidasi dan menertibkan situasi keresahan revolusioner, mereorganisasi tentara dan pamong praja, memperkuat pengawasan dan peraturan, dan melangkah maju dengan tugas-tugas praktis administratif dan ekonomis dalam negeri. Dengan demikian perjuangan yang dilakukan oleh Hatta mempunyai dampak positif. Ada juga dampak negatif

¹⁴ Solichin Salam, Mengenal Bung Hatta dari Dekat, dalam *Bung Hatta-Pribadinya Dalam Kenangan*, Sinar Harapan dan UI Press : Jakarta, 1980, hlm. 599.

yang merupakan akibat dari agresi Belanda, antara lain korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit akibat dari agresi Belanda tersebut (bidang ekonomi). Akan tetapi perjuangan Hatta dan tokoh-tokoh pejuang lainnya lebih banyak berdampak positif bagi kehidupan kita. Dampak positif tersebut terwujud dalam keberhasilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer. Perjuangan Hatta yang berakhir dengan kemerdekaan bagi RIS tersebut juga berdampak bagi negara lain (Luar negeri).

Dampak bagi kehidupan dalam negeri dalam bidang politik, penyerahan kedaulatan dan pengakuan menjadikan RIS menjadi negara yang merdeka. Seluruh negara bagian yang tergabung dalam RIS menjadi negara yang merdeka kecuali Irian Barat atau Irian Jaya yang masih harus terus diperjuangkan. Dengan kemerdekaan RIS ini, secara hukum pemerintah RIS berhak penuh untuk memilih sistem ketataprajaan dan tertib ketatanegaraannya sendiri, karena hal ini merupakan suatu urusan dalam negeri. Bila ia hendak menggantikan federalisme dengan unitarisme, maka tidak ada negara lain atau kekuasaan apapun yang dapat mencegahnya. Oleh karena itu pada bulan April 1950 diadakanlah persiapan-persiapan untuk kembali ke sistem unitarisme, karena kebanyakan golongan politik di daerah-daerah bagian menghendakinya.¹⁵

Politik luar negeri yang diterapkan di Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif merupakan ide Mohammad Hatta. Politik bebas aktif merupakan politik yang tegas menuju perdamaian dunia yang kekal. Politik

¹⁵ Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*, Sinar Harapan : Jakarta, 1983, hlm. 334. Lihat juga Herbert Feith, *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, hlm. 11.

tersebut juga merupakan kesadaran bangsa untuk mempertahankan Indonesia sebagai suatu negara nasional, yang ingin bersahabat dengan segala bangsa, atas dasar saling menghargai. Atas cita-cita tersebut RI ingin mencapai PBB menjadi pusat organisasi perdamaian dunia dan persaudaraan segala bangsa.¹⁶

Dalam bidang ekonomi, RIS mempunyai hak penuh untuk mengatur hubungan dagang dengan luar negeri dan menjual hasil-hasilnya. Selain itu modal Indonesia diberi kesempatan untuk turut serta dalam perusahaan-perusahaan Belanda yang telah lama ada.¹⁷

Indonesia setelah merdeka secara penuh, maka segera melaksanakan tujuan selanjutnya, yaitu kesejahteraan hidup dan kemakmuran rakyat. Dalam bidang perekonomian, Indonesia segera melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yaitu pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Hubungan buruh dan majikan seperti dalam masyarakat kapitalis tidak akan ada lagi. Antara pimpinan dan buruh harus sama-sama bekerja, saling menghargai, saling mencintai seperti sekeluarga. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak sedapat-dapatnya menjadi perusahaan negara, bukan kepunyaan pribadi dan hasil perusahaan itu harus digunakan untuk menjamin kemakmuran dan keperluan rakyat seluruhnya. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

¹⁶ Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan Jilid IV*, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia : Jakarta-Amsterdam-Surabaya, 1954, hlm. 278.

¹⁷ Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*, Sinar Harapan : Jakarta, 1983, hlm. 38.

kemakmuran rakyat. Dasar kekuasaan negara di sini adalah kewajiban memperbesar kemakmuran rakyat.¹⁸

Bumi Indonesia yang subur dan kaya banyak menghasilkan bahan-bahan yang berguna bagi ekonomi internasional. Dunia kekurangan bahan makanan, kekurangan bahan mentah untuk produksi. Dalam hal itu RI dapat sanggup memberi sumbangan. Setelah Indonesia merdeka, maka Indonesia dapat menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh negara-negara lain tersebut. Dengan demikian kedudukan RI sangat penting bagi persekutuan ekonomi internasional. Selain itu penduduk RI banyak yang merupakan tenaga produktif yang tidak dapat diabaikan. Selain sebagai tenaga produktif, mereka juga menyatakan suatu tenaga pembeli yang tidak sedikit, yang besar artinya bagi produksi dunia.¹⁹

Dalam bidang sosial-budaya, pemerintah RIS setelah menerima penyerahan dan pengakuan kedaulatan, Pemerintah RIS menerima semua pegawai sipil Pemerintah Belanda yang bekerja di Indonesia pada saat penyerahan kedaulatan. Selama masa dua tahun setelah penyerahan kedaulatan, Pemerintah RIS tidak akan mengadakan peraturan-peraturan yang merugikan pegawai yang berkebangsaan Belanda tersebut.²⁰

Selain itu RIS juga segera melaksanakan ketentuan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini dimaksudkan untuk menjamin dan meningkatkan taraf hidup bagi buruh. Selain itu pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan pengajaran bagi rakyat Indonesia.

¹⁸ Mohammad Hatta, *op. cit.*, hlm. 38.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 248.

²⁰ Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 314.

Dalam bidang militer, penarikan kembali angkatan perang Belanda dari Indonesia menyebabkan tentara-tentara RI menempati kembali wilayah-wilayah RI yang telah diduduki oleh tentara Belanda. Dengan demikian tentara RI mulai dapat menjalankan fungsinya kembali. Selain itu juga dicapai kesepakatan akan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia (APRIS) dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai inti, pembubaran angkatan bersenjata kolonial Belanda (KNIL) dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam APRIS, adanya suatu misi militer Belanda di Indonesia untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota pasukan-pasukan Belanda ke negeri Belanda.

Dampak bagi kehidupan luar negeri dalam bidang politik, RIS setelah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, dan kemudian mendapat pengakuan baik secara *de facto* maupun *de jure* dari dunia internasional, maka negara lain mulai mengadakan pertukaran duta atau duta besar dengan RIS.²¹

Hubungan politik antara Belanda dengan RIS tetap berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KMB. Akan tetapi hubungan ini menjadi agak keruh ketika RIS akan menggantikan federalisme dengan unitarisme atau sistem federal ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena hal ini menurut Belanda merupakan suatu pelanggaran terhadap janji-janji dan iktikad baik.

Dalam bidang ekonomi, negara-negara lain khususnya negara-negara di Asia Tenggara mulai menanamkan modalnya di negara RIS. Selain itu mereka juga mengimpor barang-barang atau bahan-bahan yang mereka butuhkan dari negara RIS.

²¹ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 59.

Hubungan ekonomi Belanda dengan RIS juga telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KMB. Sesuai dengan persetujuan Konperensi Meja Bundar, pemerintah Hatta memberikan perlindungan sepenuhnya kepada modal Belanda di Indonesia, kepada perusahaan-perusahaan besar Belanda yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, perdagangan besar, perbankan, perkapalan dan penerbangan.²² Sesuai dengan persetujuan bahwa semua penanaman modal Belanda dan asing di Indonesia harus tunduk kepada Undang-undang RIS.²³ Belanda maupun Indonesia juga mempunyai hak penuh untuk mengatur hubungan dagang dengan luar negeri dan menjual hasil-hasilnya.

Dalam bidang sosial-budaya, negara-negara lain mulai mengadakan hubungan kebudayaan dengan RIS. Hubungan Belanda dengan RIS dicapai kesepakatan bahwa hubungan-hubungan itu akan bersifat universal tanpa dibatasi apapun, dan diarahkan kepada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.²⁴ Dalam hubungan ini, bantuan di bidang kebudayaan, pendidikan dan karya ilmiah akan saling diberikan, termasuk soal penukaran guru-guru besar, para ahli dan guru-guru. Selain itu beasiswa-beasiswa juga akan disediakan. Untuk para ilmuwan dari Belanda dan Indonesia secara timbal balik akan diberi kemungkinan untuk melakukan penyelidikan di daerah pihak yang lain.²⁵ Selain hubungan-hubungan tersebut, benda-benda yang mempunyai nilai budaya yang sangat penting dan besar, yang dimiliki pemerintah Belanda dan Hindia-Belanda, kecuali karena penyerahan hak milik yang

²² Herbert Feith, *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1995, hlm. 11.

²³ Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 310.

²⁴ *Ibid*, hlm. 315.

²⁵ *Ibid*, hlm. 312.

sah dan menurut hukum, akan dikembalikan oleh Belanda kepada RIS.²⁶ Dengan demikian tidak ada permasalahan lagi antara Belanda dengan RIS dalam hal ini.

Demikianlah pembahasan tentang peranan Mohammad Hatta sekitar persetujuan Renville hingga penyerahan kedaulatan. Bab selanjutnya berupa simpulan yang merupakan jawaban-jawaban permasalahan-permasalahan yang ada.

²⁶ *Ibid*, hlm. 312-314.

BAB V

SIMPULAN*

Mohammad Hatta merupakan salah satu tokoh, pejuang, pahlawan, pemikir dan Bapak rakyat Indonesia. Selain itu beliau juga merupakan proklamator dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Mohammad Hatta yang terkenal dengan sebutan Bung Hatta sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada sekarang ini tidak lepas dari perjuangan-perjuangan Bung Hatta bersama dengan tokoh-tokoh perjuangan kita yang lain. Dari uraian dalam bab II, III dan IV dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Peranan Mohammad Hatta terlihat jelas antara lain dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1949. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 Hatta diangkat menjadi wakil presiden RI yang pertama. Ketika terjadi peristiwa 3 Juli 1946, Hatta ikut menyelesaikan persoalan tersebut. Pada tanggal 20 Mei 1947 Hatta pergi ke Sumatra. Ketika berada di Sumatra, Hatta pergi ke India atas perintah Soekarno dengan maksud minta bantuan senjata kepada Nehru dalam menghadapi Belanda. Dalam perjalanan ke India Hatta

* Istilah ini dapat dijumpai dalam buku *Pengantar Ilmu Sejarah* oleh Kuntowijoyo hlm. 104. Lihat juga *Dari Kesimpulan ke Simpulan* oleh G. Moedjarito dalam *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 28 Oktober 2000, hlm. 8.

Januari 1948 Kabinet Amir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Oleh karena itu Presiden Soekarno menunjuk Hatta (sebagai wakil presiden) untuk membentuk kabinet baru. Pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Hatta dibentuk dengan Hatta sebagai Perdana Menteri. Kabinet Amir mengembalikan mandat setelah diadakan persetujuan Renville. Dengan demikian Kabinet Hatta merupakan pelaksana persetujuan Renville. Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Dalam penyerangan ini Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Syahrir (penasihat presiden) dan beberapa menteri berhasil ditawan oleh Belanda. Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan Roem-Royen, dan pada tanggal 7 Mei 1949 dicapai persetujuan Roem-Royen. Salah satu ketentuan dalam persetujuan Roem-Royen ialah melaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan tanpa syarat, nyata dan lengkap. KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949. Dalam KMB ini Hatta sebagai ketua delegasi RI. Pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet RIS dibentuk dengan Hatta sebagai Perdana Menteri. Pada tanggal 27 Desember 1949 Hatta menerima penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari Ratu Juliana.

2. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Hatta tidak terlepas dari kerjasamanya dengan tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan kita, antara lain Soekarno dan Syahrir. Soekarno, Hatta dan Syahrir adalah Tritunggal yang

merupakan pemimpin yang paling efektif di Indonesia pada masa perjuangan. Pada masa pendudukan Jepang ketiga tokoh tersebut saling membagi tugas. Soekarno dan Hatta harus bekerja secara resmi dengan Jepang, sedangkan Syahrir sambil tetap mengadakan kontak dengan mereka memimpin perlawanan di bawah tanah. Pada masa revolusi kemerdekaan, pimpinan revolusi berada di tangan ketiga tokoh tersebut. Mereka saling mengisi dan saling mendukung. Walaupun diantara ketiga tokoh tersebut sering terjadi pertentangan pendapat, tetapi ketiga tokoh tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia.

3. Peranan Hatta dalam perjuangan kemerdekaan sangat banyak. Akan tetapi peranan Hatta yang paling penting adalah memproklamasikan kemerdekaan RI bersama Soekarno dan menerima penyerahan kedaulatan dan pengakuan kedaulatan RIS dari Ratu Juliana. Perjuangan Hatta dengan tokoh-tokoh RI yang berakhir dengan kemerdekaan tersebut mempunyai dampak baik bagi kehidupan RIS sendiri maupun bagi kehidupan luar negeri atau negara lain. Dampak tersebut berupa dampak positif. Ada juga dampak negatif, tetapi merupakan akibat agresi Belanda, antara lain korban jiwa yang banyak jumlahnya dan RI harus menanggung hutang-hutang akibat agresi Belanda tersebut. Akan tetapi perjuangan Hatta dan tokoh-tokoh pejuang lainnya lebih banyak berdampak positif. Dampak positif tersebut terwujud dalam

keberhasilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan militer.

Demikianlah pembahasan penelitian tentang perjuangan Mohammad Hatta dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia 1945 – 1949.



DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, St. Rais, *Sepuluh Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Mutiara : Jakarta, 1952.
- Budiharja (Ed.), *Buku Panduan Museum Benteng Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan : Yogyakarta, 1998.
- Dahm, Bernhard, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, LP3ES : Jakarta, 1987.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 1990.
- Feith, Herbert, *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1995.
- Hatta, Mohammad, *Kumpulan Karangan Jilid IV*, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia : Jakarta, Amsterdam, Surabaya, 1945.
- _____, *Memoir*, Tintamas Indonesia : Jakarta, 1987.
- Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*, Sinar Harapan : Jakarta, 1983.
- Iwa Kusuma Sumantri, *Sejarah Revolusi Indonesia Jilid II*, Djakarta, 1965.
- Kahin, George McT., *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (terjm.)*, Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Kartodirdjo, Sartono, *Ungkapan-Ungkapan Filsafat Barat dan Timur*, Gramedia : Jakarta, 1986.
- Lubis, Aboe Bakar, *Kilas Balik Revolusi*, Universitas Indonesia Press : Jakarta, 1990.
- Moedjanto, G., *Indonesia Abad ke-20 Jilid I dan II*, Kanisius : Yogyakarta, 1988.
- Nasution, A.H., *Sedjarah Perdjjuangan Nasional Dibidang Bersendjata*, Mega Bookstore : Djakarta, 1966.

- Noer, Deliar, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, LP3ES : Jakarta, 1990.
- Notosusanto, Nugroho (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Depdikbud, 1975.
- Notosutardjo, H.A., *Dokumen-Dokumen KMB*, Pustaka dan Penerbit Endang Jakarta, 1956.
- Rose, Mavis, *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 1991.
- Said, Salim, *Genesis of Power : General Sudirman and the Indonesia Military in Politics 1945-1949*, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1992.
- Sudirjo, Radik Utoyo, *Lima Tahun Perang Kemerdekaan 1945-1949*, Badan Penerbit ALDA : Jakarta, 1976.
- Sumanang, dkk, *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjjoangan Bangsa*, Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70 : Jakarta, 1972.
- Suwarno, Basuki, *Hubungan Indonesia Belanda Periode 1945-1950*, PT Setia Acness: Jakarta, 1980.
- Swasono, Meutia Farida, *Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan*, Sinar Harapan-Universitas Indonesia : Jakarta, 1980.
- Tobing, K.L.M., *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, Gunung Agung : Jakarta, 1986.
- Yasni, Z., *Bung Hatta Menjawab*, Gunung Agung : Jakarta, 1980.
- Yayasan Idayu, *Bung Hatta Kita*, Yayasan Idayu : Jakarta, 1980
- Prisma, no. 8 Agustus 1977 tahun VI.

LAMPIRAN





Sumber : St. Rais Alamsyah, *Sepuluh Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Mutiara : Jakarta, 1952, hlm. 26.

Naskah Persetujuan Renville

- A. Perjanjian Gencatan perang yang disetujui oleh Indonesia dan Belanda, dan ditandatangani pada sidang keempat di atas kapal "Renville" pada tanggal 17 Januari 1948

Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia dan seterusnya dinamai pihak-pihak, telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Dengan segera, setelah perjanjian ini ditandatangani, kedua belah pihak akan mengeluarkan perintah menghentikan tembak-menembak dalam tempo 48 jam. Perintah ini akan berlaku atas pasukan-pasukan kedua belah pihak, pada sebelah tempat masing-masing yang telah diterangkan dalam pengumuman dari Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 29 Agustus 1947; garis-garis tersebut dinamakan garis *statusquo* dan di daerah-daerah termaktub dalam ayat yang berikut;
2. Dalam instansi (tingkatan) pertama dan untuk sementara akan diadakan daerah-daerah (*zones*) sesuai dengan garis *statusquo*; sebagai kebiasaan daerah-daerah ini melingkungi garis-garis *statusquo* pada sebelah pihak, garis dari pihak Belanda yang terkemuka dan pada pihak lain, garis dari pihak Republik yang paling depan, sedang lebarnya sesuatu daerah (*zone*) harus sama;
3. Mengadakan daerah-daerah yang tidak diduduki oleh militer (*gedemilitariseerd*) sekali-kali tidak menyangkut hak dari kedua belah pihak menurut resolusi dari Dewan Keamanan pada tanggal 1, 25 dan 26 Agustus dan tanggal 1 Nopember 1947;
4. Setelah yang tertulis di atas diterima oleh kedua belah pihak, maka Komisi akan menyerahkan pembantu-pembantu militernya kepada kedua belah pihak, sedang pembantu-pembantu tersebut akan menerima petunjuk-petunjuk (*instructies*) dan menerima pertanggungjawaban untuk menentukan, apakah penyelidikan atas sesuatu insiden diperlukan oleh pembesar-pembesar dari satu atau kedua pihak;
5. Sambil menunggu keputusan dalam soal politik, tanggung jawab atas tertib-tenteram dan keselamatan jiwa dan harta benda penduduk dalam daerah-daerah yang dikosongkan (*gedemilitariseerd*) akan dipegang oleh polisi sipil dari kedua belah pihak. Polisi untuk sementara waktu, memakai tenaga personil militer sebagai polisi sipil dengan perjanjian, bahwa kekuasaan polisi di bawah kontrol sipil.
Pembantu-pembantu militer dari Komisi setiap waktu bersedia memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan menyerahkan tenaganya, bila dianggap perlu. Di antaranya mereka itu mesti:
 - a. mendapat bantuan dari opsir-opsir polisi, yang ditempatkan oleh salah satu pihak dalam tempat-tempat yang tidak diduduki lagi oleh militer untuk menemani mereka itu dalam menyelenggarakan kewajiban mereka. Opsir-opsir polisi dari satu pihak tidak dibenarkan berada di daerah pihak lainnya, kecuali bersama-sama dengan pembantu militer Komisi dan opsir polisi dari pihak lain;
 - b. menambah kerja sama antara kedua belah pihak polisi;
6. Perdagangan dan lalu lintas antara daerah-daerah diusahakan supaya lebih maju dan meningkat pada hal-hal yang perlu, maka kedua belah pihak akan mengadakan perjanjian di bawah pengawasan Komisi dan wakil-wakilnya, bilamana hal ini dirasa perlu;



7. Perjanjian ini juga memuat hal-hal sebagai tertulis di bawah ini, yang mana dasar-dasarnya telah disetujui oleh kedua belah pihak:
 - a. Dilarang mengadakan *sabotase*, menakut-nakuti (intimidasi), pembalasan dendam dan lain-lain tindakan yang serupa terhadap orang-orang dan harta benda, baikpun perusahaan atau barang-barang dari apa saja dan dari tiap-tiap orang dan memakai alat-alat apa saja, supaya mencapai maksud tersebut;
 - b. Tidak akan mengadakan siaran-siaran radio atau propaganda-propaganda yang lain untuk menentang atau mengacaukan tentara dan rakyat;
 - c. Siaran-siaran radio dan lain-lain untuk maksud memberi tahu kepada tentara dan rakyat tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menepati pasal-pasal yang tersebut dalam sub a dan b;
 - d. Memberikan segala kesempatan untuk penyelidikan oleh pembantu-pembantu militer dan sipil, yang diperbantukan pada Komisi Tiga Negara;
 - e. Penghentian dengan segera penyiaran-penyiaran pengumuman harian tentang gerakan-gerakan atau macam pemberitahuan tentang gerakan-gerakan ketentaraan, kecuali jika sebelumnya telah disetujui dengan tulisan oleh kedua pihak, tidak termasuk penyiaran-penyiaran minggu dari daftar orang-orang (dengan menyebutkan nama, nomor, kenyataan dan alamat rumah), yang tewas atau meninggal karena luka-luka yang didapatnya dalam menjalankan kewajiban?
 - f. Penerimaan atas pembebasan tawanan-tawanan dari kedua pihak dan pemulaian perundingan tentang sesuatu pengwujudan yang secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya, pembebasan mana dalam asasnya akan berlaku dengan tidak mengingat pada jumlah tawanan kedua pihak;
8. Bahwa, setelah menerima hal tersebut tadi, pembantu-pembantu militer Komisi itu akan segera mengadakan penyelidikan untuk menentukan apakah atau di mana, terutama di Jawa Barat, kesatuan-kesatuan tentara Republik mengadakan perlawanan di belakang kedudukan terdepan dari Tentara Belanda yang sekarang. Jika penyelidikan itu membuktikan adanya kesatuan-kesatuan yang semacam itu, maka kesatuan-kesatuan itu secepat mungkin, tapi bagaimanapun juga dalam waktu 21 hari, akan mengundurkan diri secara yang disebutkan dalam pasal berikut;
9. Bahwa seluruh kekuatan tentara dari kedua pihak masing-masing dalam sesuatu daerah, yang diterima sebagai daerah yang didemiliterisasi, atau dalam sesuatu daerah di sebelah daerah yang didemiliterisasi dari pihak yang lain, akan mengundurkan diri, di bawah

pengawasan pembantu militer Komisi itu dan dengan membawa senjatanya dan keperluan bertempur, dengan tenang menuju daerah yang didemiliterisasi. Kedua pihak berjanji akan melancarkan pengungsian kekuatan tentaranya masing-masing dengan cepat dan tenang;

10. Persetujuan ini dipandang masih mengikat selama waktu empat belas (14) hari dan selalu dengan sendirinya diperpanjang dengan empat belas (14) hari, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan pada KTN dan pada pihak yang lain, yang berpendapat, bahwa peraturan-peraturan gencatan senjata tidak ditaati oleh pihak yang lain dan oleh karenanya persetujuan itu hendaknya diakhiri pada akhir waktu empat belas hari yang berlangsung.

Renville, 17 Januari 1948.

B. 12 Dasar Persetujuan Politik Renville.

Pokok-pokok yang merupakan dasar-dasar yang sudah disetujui delegasi pemerintah Belanda dengan delegasi pemerintah Republik Indonesia untuk perundingan-perundingan politik pada sidang keempat yang diadakan Komisi Tiga Negara pada tanggal 17 Januari 1948.

Komisi Tiga Negara telah diberitahukan oleh kedua delegasi, bahwa pemerintah masing-masing telah menerima pokok-pokok perjanjian penghentian permusuhan yang sudah ditandatangani dan merupakan dasar untuk perundingan politik buat selanjutnya, ialah sebagai berikut:

1. Bantuan dari Komisi Tiga Negara akan diteruskan untuk melaksanakan dan mengadakan perjanjian untuk menyelesaikan pertikaian politik di pulau-pulau Jawa, Sumatera dan Madura, berdasarkan prinsip naskah perjanjian "Linggarjati";
2. Telah sewajarnya, bahwa kedua pihak tidak berhak menghalangi pergerakan-pergerakan rakyat untuk mengemukakan suaranya dengan leluasa dan merdeka, yang sesuai dengan perjanjian Linggarjati. Juga telah disetujui, bahwa kedua pihak akan memberi jaminan tentang adanya kemerdekaan bersidang dan berkumpul, kemerdekaan mengeluarkan suara dan pendapatnya dan kemerdekaan dalam penyiaran (publikasi), asal jaminan ini tidak dianggap meliputi juga propaganda untuk menjalankan kekerasan dan pembalasan (*repressailles*);
3. Telah sewajarnya, bahwa keputusan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan pamong praja di daerah-daerah

- hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sepenuhnya dan suka-rela dari penduduk di daerah-daerah itu pada suatu saat, setelah dapat dijamin keamanan dan ketenteraman dan tidak adanya lagi paksaan kepada rakyat;
4. Bahwa dalam mengadakan suatu perjanjian politik dilakukan pula persiapan-persiapan untuk lambat-laun mengurangi jumlah kekuatan tenteranya masing-masing;
 5. Bahwa, setelah dilakukan penandatanganan perjanjian penghentian permusuhan dan sebaik dapat dilaksanakan perjanjian itu, maka kegiatan dalam lapangan ekonomi, perdagangan, perhubungan dan pengangkutan akan diperbaiki dengan segera, dengan bekerja bersama-sama di mana harus diperhatikan kepentingan-kepentingan semua bagian lain di Indonesia ;
 6. Bahwa akan diadakan plebisit sesudah waktu yang tidak kurang dari enam bulan dan tidak lebih dari satu tahun, setelah ditandatangani perjanjian, dalam waktu mana dapat terjadi tukar-menukar pikiran, dan pertimbangan tentang soal-soal yang penting secara merdeka dan dengan tidak ada paksaan. Dalam waktu itu, dapat diadakan pemilihan umum secara merdeka, agar rakyat Indonesia dapat menentukan kedudukannya sendiri di lapangan politik dalam hubungan dengan Negara Indonesia Serikat;
 7. Bahwa suatu dewan yang akan menetapkan undang-undang dasar (konstitusi) akan dipilih secara demokratis untuk menetapkan suatu undang-undang dasar buat Negara Indonesia Serikat;
 8. Telah didapat persetujuan, bahwa, setelah ditandatanganinya perjanjian, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, jika salah satu dari kedua pihak meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadakan suatu badan buat melakukan pengawasan sampai saat diserahkannya kedaulatan pemerintah Belanda kepada pemerintah Negara Indonesia Serikat, maka pihak yang kedua akan menimbangnya dengan sungguh-sungguh. Dasar-dasar seperti di bawah ini diambil dari naskah perjanjian "Linggarjati";
 9. Kemerdekaan bebas buat bangsa Indonesia seluruhnya;
 10. Bekerja bersama antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia;
 11. Satu negara berdasarkan federasi yang berdaulat, dan dengan suatu undang-undang dasar yang timbulnya melalui jalan-jalan demokrasi;
 12. Suatu Uni (persatuan) dari Negara Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda dan bagian-bagiannya yang lain, di bawah turunan raja Belanda.

Renville, 17 Januari 1948.

- C. 6 Dasar Tambahan dari Komisi Tiga Negara untuk Pembukaan Perundingan Politik antara delegasi Republik Indonesia dengan delegasi Kerajaan Belanda, tanggal 17 Januari 1948 dan disetujui tanggal 19 Januari 1948.

Komisi Tiga Negara berpendapat, bahwa keterangan dasar di bawah ini antara lain akan dipergunakan sebagai dasar perundingan untuk penyelesaian politik, yaitu sebagai berikut:

1. Kedaulatan atas Hindia Belanda seluruhnya ada dan akan tetap berada di tangan Kerajaan Belanda sampai waktu yang ditetapkan. Kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan ini kepada Negara Indonesia Serikat. Sebelum masa peralihan demikian itu habis temponya, Kerajaan Belanda dapat menyerahkan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah federal sementara yang dibentuk dari daerah-daerah yang nantinya akan merupakan Negara Indonesia Serikat. Jika sudah terbentuk, Negara Indonesia Serikat akan merupakan negara yang berdaulat dan merdeka berkedudukan sejajar dengan Kerajaan Belanda dalam Uni Belanda Indonesia, dikepalai oleh Turunan Raja Belanda. Hal status Republik Indonesia adalah sebagai negara yang bergabung dalam Negara Indonesia Serikat;
2. Dalam pemerintah federal sementara, sebelum diadakan perubahan dalam undang-undang Negara Indonesia Serikat, kepada negara-negara bagian akan diberikan perwakilan yang adil;
3. Sebelum Komisi Tiga Negara dibubarkan, tiap-tiap pihak boleh meminta supaya pekerjaan komisi diteruskan, yaitu guna membantu menyelesaikan perselisihan berkenaan dengan penyelesaian politik, yang mungkin terbit selama masa peralihan. Pihak yang lainnya tidak boleh berkeberatan atas permintaan demikian itu; permintaan tersebut harus diajukan oleh pemerintah Belanda kepada Dewan Keamanan;
4. Dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan tapi tidak lebih dari satu tahun sesudah persetujuan ini ditandatangani, maka di daerah-daerah di Jawa, Sumatera dan Madura akan diadakan pemungutan suara (plebisit) untuk menentukan apakah rakyat di daerah-daerah tersebut akan turut dalam Republik Indonesia atau masuk bagian yang lain di dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat. Plebisit ini diadakan di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara, jika kedua pihak dapat persetujuan dalam artikel 3 yang menentukan, supaya Komisi Tiga Negara memberikan bantuan dalam soal tersebut. Kemungkinan tetap terbuka jika kedua pihak dapat persetujuan

- akan menggunakan cara lain dari pemungutan suara untuk menyatakan kehendak rakyat di daerah-daerah itu;
5. Sesudah ditetapkan batas-batas negara-negara bagian yang dimaksud itu, maka akan diadakan rapat pembentukan undang-undang dasar menurut cara demokrasi, untuk menetapkan konstitusi buat Negara Indonesia Serikat. Wakil-wakil dari negara-negara bagian akan mewakili seluruh rakyat;
 6. Jika ada negara bagian memutuskan tidak akan turut serta menandatangani konstitusi tersebut sesuai dengan pasal 3 dan 4 dalam persetujuan Linggarjati, kedua pihak tidak akan keberatan diadakan perundingan untuk menetapkan perhubungan istimewa dengan Negara Indonesia Serikat.

Renville, 19 Januari 1948.

Semua dokumen persetujuan ditandatangani:

Untuk Pemerintah Kerajaan
Belanda,
Abdulkadir Wijoyoatmojo
Ketua Delegasi

Untuk Pemerintah Republik
Indonesia,
Amir Syarifuddin
Ketua Delegasi

Wakil-wakil Komisi Tiga Negara dari
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa:
Ketua: Mr. Justice Richard
C. Kirby (Australia)
Wakil-wakil:
Mr. Paul van Zeeland (Belgia)
Dr. Frank P. Graham (Amerika Serikat)
Sekretaris: Mr. T.G. Narayanan

INDUK PERSETUDJUAN

Delegasi-delegasi :

1. Pemerintah Republik Indonesia,
2. Pertemuan untuk Bermusjawaratan Federaal (Bijeenkomst voor Federaal Overleg),
3. Keradjaan Nederland,

menimbang bahwa mereka telah bersidang dalam Konperensi Medja Bundar supaya selekas mungkin ditjapai perdamaian jang baik dan kekal dalam pertikaian Indonesia dengan djalan memperoleh persetujuan antara peserta-peserta tentang tjara bagaimana akan diserahkan kedaulatan jang sesungguhnya-sungguhja, sempurnz dan tiada bersjarat kepada Republik Indonesia Serikat sesuai dengan asas-asas Renville ; menimbang bahwa mereka telah mentjapai tudjuan itu dalam kerdja-sama jang baik ; menimbang bahwa Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia dalam peristiwa itu telah memberikan bantuan jang berharga ;

telah memutuskan sebagai berikut :

- I. Sekalian hasil Konperensi Medja Bundar termaktublah dalam rantjangan-rantjangan persetujuan dan surat-surat ; segala dokumen itu dilampirkan pada resolusi ini ;

II. A. Rantjangan-rantjangan persetujuan sebagai berikut :

1. Rantjangan Piagam penjerahan kedaulatan ;
2. Rantjangan Statut-Uni, termasuk pula lampiran dan persetujuan-persetudjuan khusus tentang pokok-pokok jang terpenting hal kerdja-sama dikemudian hari ;
3. Rantjangan persetujuan Perpindahan, termasuk persetujuan-persetudjuan khusus berisi peraturan pokok-pokok jang perlu diurus sebagai akibat penjerahan kedaulatan.

B. Tentang beberapa soal jang tersendiri, Delegasi-delegasi telah saling mempermaklumkan masing-masing pendirian dengan surat-menjurat.

III. Dokumen-dokumen jang disebut pada A dan B disusun dalam bahasa Indonesia dan Belanda.

Kedua naskah itu mempunyai kekuatan jang sama.

Adalah pula dibuat naskah resmi berbahasa Inggeris ; naskah itulah

jang akan menentukan djikalau ada terdapat perbedaan arti antara naskah Indonesia dan naskah Belanda.

IV. Penerimaan resolusi ini oleh daerah-daerah jang berhimpun dalam Republik Indonesia Serikat dipihak jang satu dan oleh Keradjaan Nederland dipihak jang lain akan dipandang ratifikasi dokumen-dokumen jang dilampirkan pada resolusi ini. Ratifikasi oleh salah satu pihak tidak akan mempunyai kekuatan, djika salah satu dari pihak jang lain tidak meratifikasi resolusi ini.

V. Persetujuan-persetujuan jang disebut pada II akan mulai berlaku pada saat penyerahan kedaulatan ; penyerahan itu akan dilangsungkan dengan segala upatjara pada sidang di Amsterdam, selambatlambatnja pada tanggal 30 Desember 1949.

VI. Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia atau suatu badan Perserikatan Bangsa-bangsa jang lain akan mengawasi di Indonesia penepatan segala persetujuan tertjapai dalam Konperensi Medja Bundar.

Delegasi Pemerintah Republik
Indonesia,

MOHAMMAD HATTA,
Ketua.

Delegasi Pertemuan untuk
Permusjawaratan Federal
(Bijeenkomst voor Federaal
Overleg).

HAMID,
Ketua.

Delegasi Keradjaan Nederland,
J. H. VAN MAARSEVEEN,
Ketua,

Ketua Konperensi Medja
Bundar,
W. DREES.

Sekretaris-Umum
Konperensi Medja Bundar,
M. J. PRINSEN.

Komisi Perserikatan Bangsa-
bangsa untuk Indonesia,
R. HERREMANS,
Ketua-minggu.

H. MERLE COCHRAN,
Anggota.

TH. K. CRITCHLEY,
Anggota.

J. A. ROMANOS,
Sekertaris I.

PIDATO DRS. MOH. HATTA.

Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Pembukaan K.M.B.

KITA sekarang berkumpul didalam Konperensi Medja Bundar jang segera akan melangsungkan persidangannya, karena kita yakin, bahwa dengan ini akan dapat tertjapai udjudnja kedaulatan jang penuh tiada bersjarat bagi negara Indonesia.

Selama ini kita selalu berunding dan bertenpur silih berganti. Tiada sesuatu jang membatasi segalanya ini kita bertenpur dan berunding dengan tiada berhentinja, dengan tiada sampai kebatas jang tertentu.

Pengalaman² pahit diwaktu jang sudah-sudah menundjukkan, bahwa djalan satu²nja untuk menyelesaikan masalah Indonesia hanjalah penjerahan kedaulatan dengan segera pada bangsa Indonesia. Sedjarah perundingan jang sudah² menundjukkan, bahwa pokok kesulitan terletak pada soal² kedaulatan. Kedaulatan Belanda di Indonesia berdsarkan sedjarah.

Tetapi pada tanggal 17 Agustus 1945, hari proklamasi, hari menjtetusnja revolusi di Indonesia adalah suatu pernjaatan daripada gerakan perdjuaan bangsa Indonesia seluruhnja. Dan sesudah itu, perdjuaan bangsa Indonesia djalirkan dalam satu saluran jang tertentu, karena sesudah ini bangsa Indonesia telah menjatakan diri sebagai bangsa jang merdeka, berdaulat. Sesudah hari ini pulalah, bangsa Indonesia bertindak keluar atas nama negaranya jang diwujudkan disini dalam Republiknja.

Rakjat Republik merasa berdaulat, karena mereka mempunyai pemerintahan sendiri, tentara sendiri, uang sendiri dan last but not least politik luar negeri sendiri.

Benar atau tidak, diakui atau tidak, rakjat Republik menganggap dirinja berdaulat. Apalagi setelah pengakuan de facto dari Republik Indonesia oleh negara² besar.

Timbul pertengkaran dan persengketaan jang diachiri dengan persetudjuan Linggardjati. Tetapi ini kandas. Dan sesudah sekian lamanya bertenpur dan berunding lagi, timbul lagi satu persetudjuan Renville jang djuga tidak memberikan kata putusan jang terachir. Karena persetudjuan Linggardjati inilah, jang terpaksa tidak dapat hidup lama sebagai satu persetudjuan, Republik tampil kemuka didepan forum internasional.

Semua persetudjuan jang sekian kali telah ditanda tangani itu kandas, karena selalu dibatasi dalam pemetjahan soal sekitar penjerahan kedaulatan dalam prakteknja. Dan dalam hal ini masa peralihan selalu mendjadi pertengkaran jang tidak mentjapai udjungnja. Karena Belanda selalu berpendapat, bahwa pada masa peralihan ini, segala kedaulatan masih penuh berada ditangan Belanda, sedang dari pihak Indonesia mengemukakan konsepsinja bahwa dalam masa peralihan hendaknja diberikan tjorak jang tegas sebagai lajaknja suatu negara merdeka. Dengan ini akan diberikan satu tanggungdjawab jang penuh kepada pemerintah sementara.

Sekali lagi kembali kita menghadapi medja perundingan. Republik sedia berkorban turut sebagai satu negara jang telah berdaulat penuh mendjadi satu negara bagian, terutama dalam penjerahan kekuasaan Angkatan Perang dan perwakilan Luar Negeri jang akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat nanti. Pada masa peralihan memang dalam theorie Belanda masih memegang kedaulatan, tetapi dalam prakteknja, kedaulatan penuh ada ditangan Pemerintah Sementara. Dengan konsepsi daripada bangsa Indonesia inilah akan diadakan nanti pembagian tanggungdjawab jang hingga kini dipegang oleh Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia kepada pemerintah interim.

Tetapi karena konsepsi Republik ini rupanja tidak dapat disetujui oleh Belanda timbullah persengketaan, hingga dua kali terdjadi pertempuran antara Belanda dengan Republik. Memang masa interim sukar dilalui. Maka satu2nja djalan jang dapat melaluinja ini ialah penjerahan kedaulatan dengan segera tiada bersjarat, jang bagi kalangan Belanda dalam masa2 akhir2 ini telah mendjadi anggapan suatu konsekwensi jang tidak dapat dielakkan. Dan dengan demikian, hendaknja RTC dilangsungkan dalam masa jang se-singkat2nja.

Telah njata kepada kita semua, bahwa persengketaan jang ada antara Republik dan Belanda merupakan suatu soal psychologie jang mempunyai pangkalnja pada sedjarah kolonial, dan jang makin mendjadi2 karena psychologie conflict selama 4 tahun. Itulah sebabnja, maka tiap2 penundaan penjerahaan kedaulatan setelah diadakannya suatu persetudjuan, oleh bangsa Indonesia dirasakan sebagai siasat politik untuk mempertahankan kekuasaan kolonial di Indonesia dan akibatnja ketjurigaan pada maksud2 Belanda bertambah besar. Memang, atas dasar tjuriga tidak akan bisa didapatkan kerdja sama jang baik ; maka hendaknja hilangkan rasa tjuriga ini, jang hendaknja disampingi dengan saling mengerti dan dengan demikian penjerahan kedaulatan jang tiada bersjarat akan mendjadi suatu kenjataan jang tidak dapat dibantah.

Sebenarnja penjerahan kedaulatan itu tidak boleh dikatakan dengan tiada bersjarat sama sekali.

Kita mengetahui Pemerintah Belanda minta djaminan bahwa kedaulatan harus diserahkan pada suatu pemerintah federal Indonesia,

dan bahwa antara RIS dan Keradjaan Belanda akan dibentuk suatu Uni menurut dasar-dasar Renville.

Oleh karena Republik dan BFO menjetudjui sifat federal dari negara Indonesia, demikian pula tentang hubungan unie, dengan sjarat² yang tidak membatasi kedaulatan daripada kedua belah pihak, dari kedua anggauta unie, maka ini tak dirasakan sebagai sesuatu yang membatasi kedaulatan. Bentuk federasi telah disetudjui oleh Republik sedjak masa Linggardjati dulu. Hal ini dinjatakan lagi dalam Konferensi Inter Indonesia. Dalam unie kedua pihak mempunyai hak yang sama, associatie bebas dengan tidak membatasi kedaulatan masing-masing anggauta unie. Bentuk gambaran superstaat yang pada masa yang lalu menjadi bajangan bagi kebanyakan golongan Belanda, mempunyai pengaruh psychologie rakyat Indonesia. Karena dengan gambaran superstaat ini, rakyat menganggap Belanda akan menutupi maksudnya dengan mempergunakan sebagai tabir maksud²nya tersebut. Tetapi sjukurlah, kini anggapan kalangan Belanda tentang bajangan superstaat ini sudah tidak lagi ada. Unie hendaknya merupakan suatu associatie-bebas, tidak kaku, yang akan melantjarkan kerdja sama antara Indonesia dengan Belanda. Unie hendaknya tidak kaku dan masing² anggauta sama-sama merdeka, karena kalau tidak demikian, tiap² ikatan akan putus dengan sendirinya. Associatie bebas ini diperlukan, buat lantjarnya kerdja sama dimasa yang lama, dan dengan tegas saja njatakan bahwa tidak dapat disetudjui bilamana unie yang kaku yang akan dikemukakan. Dengan bentuk unie ini, hendaknya rakyat dan masyarakat Belanda mempunyai pandangan djauh dalam menentukan langkah² lebih lanjut.

Banyak dari kalangan masyarakat Belanda, terutama kalangan kapitalis yang merasa khawatir kalau² sesudah berdirinya RIS nanti, akan terantjam penanaman modalnya di Indonesia. Mereka takut, sebagaimana yang mereka bayangkan sebagai akibat konflik psychologie, yang menimbulkan pertentangan sendjata, hingga alat-alat banyak dihantjurkan: dengan demikian dunia kurang mendapatkan bahan yang perlu yang terdapat di Indonesia. Maka alangkah baiknya kalau dapat dengan didapatkan persetujuan tentang penjerahan yang penuh, dan tidak bersjarat.

Tetapi tidak perlu kita mengoreksi masa yang sudah². Apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur. Kedjadian dan djalan sedjarah telah mendapat hukum psychologienja sendiri.

Sebetulnya ketakutan yang ada dalam kalangan segolongan bangsa Belanda ini tidak beralasan. Karena dalam Manifest Politik Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 Nopember 1945 dengan tegas dinjatakan, bahwa milik dan kepentingan asing akan dijamin seperlunya. Bagian ini ialah sebagai berikut bunjinja :

„Kita mengetahui bahwa kedudukan negeri kita meletakkan suatu tanggungjawab yang besar dibahu kita terhadap keluarga dunia. Kita tidak membentji bangsa Belanda. Malahan kita mengetahui dan mengerti benar, bahwa untuk keperluan negeri dan bangsa kita didalam beberapa tahun yang akan datang ini kita akan memerlukan pertolongan bangsa asing didalam pembangunan negeri kita berupa kaum teknik, dan kaum terpeladjar, pun djuga kapital asing. Didalam memenuhi keperluan itu kita tidak akan menghindarkan kenjataan bahwa orang yang berbahasa Belanda, jaitu orang Belanda, mungkin akan lebih banyak dipergunakan, oleh karena mereka telah ada disini dan lebih biasa akan keadaan disini. Sehingga pelaksanaan kemerdekaan kita itu belum perlu berarti kerugian besar untuk pihak Belanda, djika diukur dengan uang atau djiwa, akan tetapi tentu sekali perubahan yang sebesar-besarnya didalam kedudukan politiknya.

Kita yakin bahwa tanah kita yang kaya raya ini djika diusahakan dengan sesungguhnya untuk meninggikan deradjat penghidupan bangsa kita serta dunia umumnya akan masih banyak benar memberi ruangan untuk tenaga dari seluruh dunia, terutama dari Amerika Serikat, Australia dan Philipina, untuk turut dalam pembangunan negara dan bangsa kita.

Akan tetapi sekalian itu hanya akan dapat dimulai djikalau pertentangan kedaulatan antara Belanda dan kita dapat selesai dengan pengakuan hak kita untuk menentukan nasib kita sendiri, jaitu dengan pengakuan negara dan pemerintahan yang telah kita pilih. Bukan sadja kita dan barangkali pihak Belanda, berkepentingan dengan lekas terlaksananya hal ini, akan tetapi seluruh dunia yang menunggu² sumbangan tanah serta bangsa Indonesia terhadap kekurangan yang ada didunia sekarang.

Dengan pengakuan kemerdekaan kita, kita akan menanggung segala yang patut kita tanggung menurut kedudukan kita. Segala hutang Hindia Belanda sebelum penjerahan Djepang yang patut menjadi tanggungan kita, kita akui hutang kita.

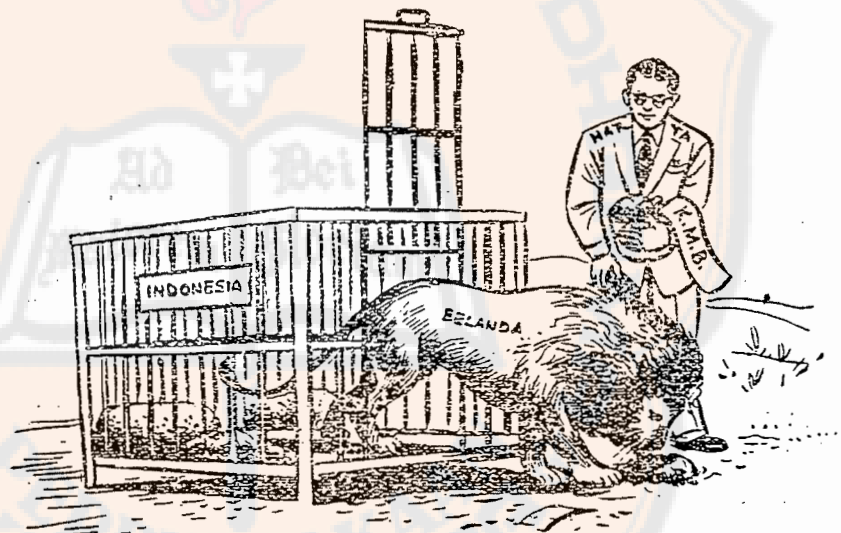
Segala milik bangsa asing selain daripada yang diperlukan oleh negara kita untuk diusahakan oleh negara sendiri, dikembalikan pada yang berhak, serta yang diambil oleh negara akan dibayar kerugiannya dengan se-adil²nja.

Hendaknya kini orang Belanda pandai melihat kemuka, melihat masa depan, setjara dinamis, dan saja tegaskan disini, bahwa ini tidak akan merugikan kedudukan Belanda malahan akan lebih menguntungkan. Pembangunan yang akan segera dilangsungkan di Indonesia akan berimbangan djuga dengan pembangunan yang diselenggarakan dinegeri Belanda sendiri.

Sudah barang tentu, dalam suasana baru nanti Pemerintah akan mendjalankan politik kemakmuran rakyat. Indonesia tidak akan lagi menjadi penanaman modal asing yang akan merugikan tingkat hidup bangsa Indonesia. Penanaman modal asing akan diatur sedemikian rupa hingga tidak akan merugikan tingkat hidup rakyat di Indonesia. Indonesia tidak lagi akan menjadi suatu inland kolonie. Indonesia akan menjadi makmur dan tidak akan merugikan negara manapun, malahan akan menguntungkan, terutama Belanda sendiri.

Memang, penjerahan kedaulatan, penjerahan hutang piutang serta hak kewadajiban akan menjadi atjara terpenting daripada konferensi. Memang, banyak seluk beluknya soal² ini, tetapi tidak boleh hendaknya karena ini konferensi kita panjang²kan.

Hendaknya dalam Konferensi ini kita rundingkan soal-soal yang pokok-pokok dan prinsipil saja, sedang detail dan pelaksanaannya dapat nanti diselenggarakan oleh Pemerintah Sementara daripada Republik Indonesia Serikat.



Konperensi hendaknja djangan diperpanjang waktunja lebih dari waktu psychologisch jang mendjadi batas²nja.

Satu Djanuari 1949 telah lama liwat, tidak lagi dapat kita kenangkan kembali apa jang seharusnya terdjadi pada saat tersebut. Tetapi dengan mengingat semua perhitungan jang ada sekarang, hendaknja sebelum fadjar menjingsing ditahun 1950, Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat telah berdiri.

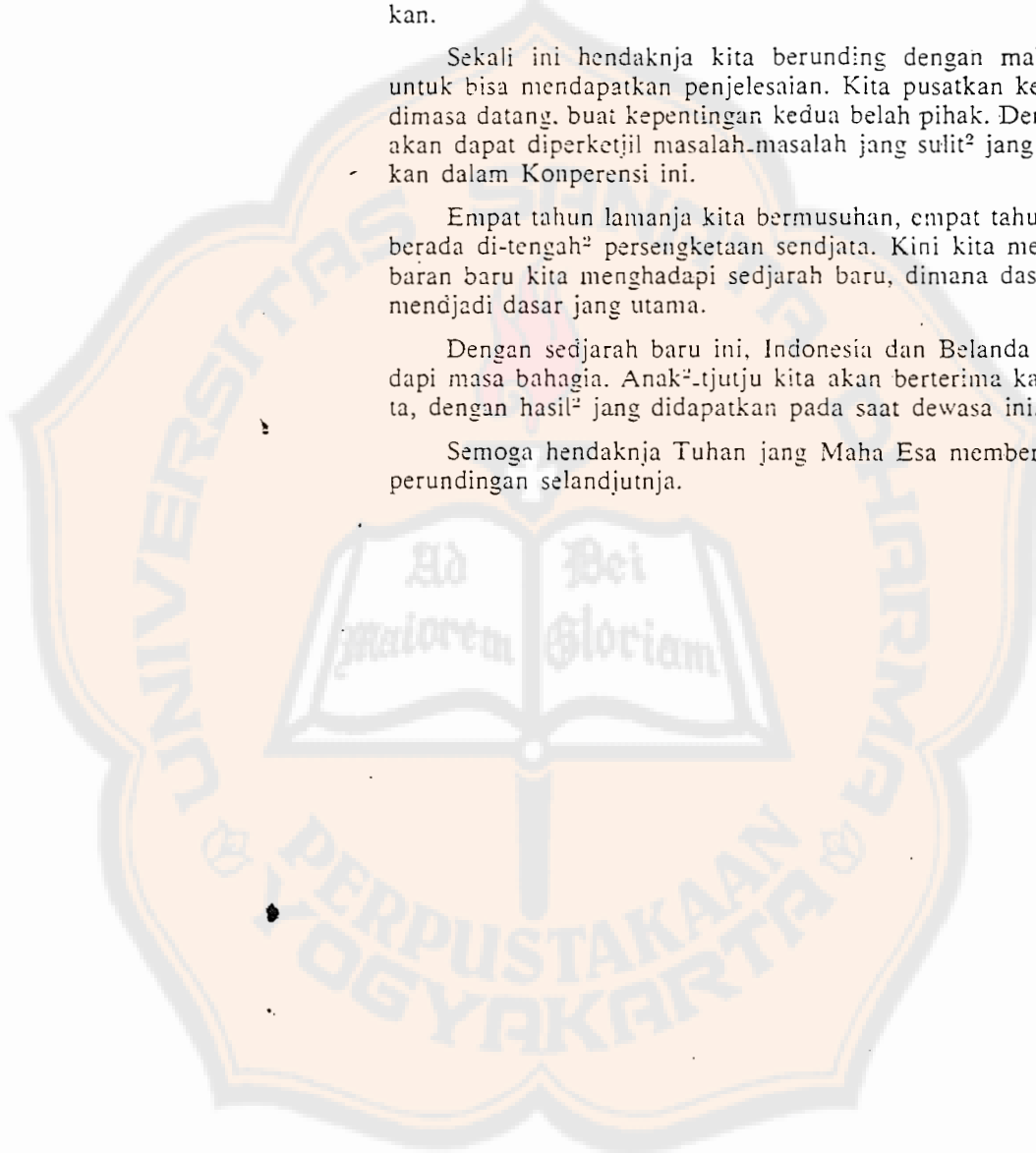
Tuntutan daripada psychologi masa ini hendaknja djangan diabaikan.

Sekali ini hendaknja kita berunding dengan maksud sungguh² untuk bisa mendapatkan penyelesaian. Kita pusatkan kepentingan kita dimasa datang. buat kepentingan kedua belah pihak. Dengan demikian, akan dapat diperketjil masalah-masalah jang sulit² jang baru dipetjahkan dalam Konperensi ini.

Empat tahun lamanja kita bermusuhan, empat tahun lamanja kita berada di-tengah² persengketaan sendjata. Kini kita menghadapi lembaran baru kita menghadapi sedjarah baru, dimana dasar damai akan mendjadi dasar jang utama.

Dengan sedjarah baru ini, Indonesia dan Belanda akan menghadapi masa bahagia. Anak²-tjutju kita akan berterima kasih kepada kita, dengan hasil² jang didapatkan pada saat dewasa ini.

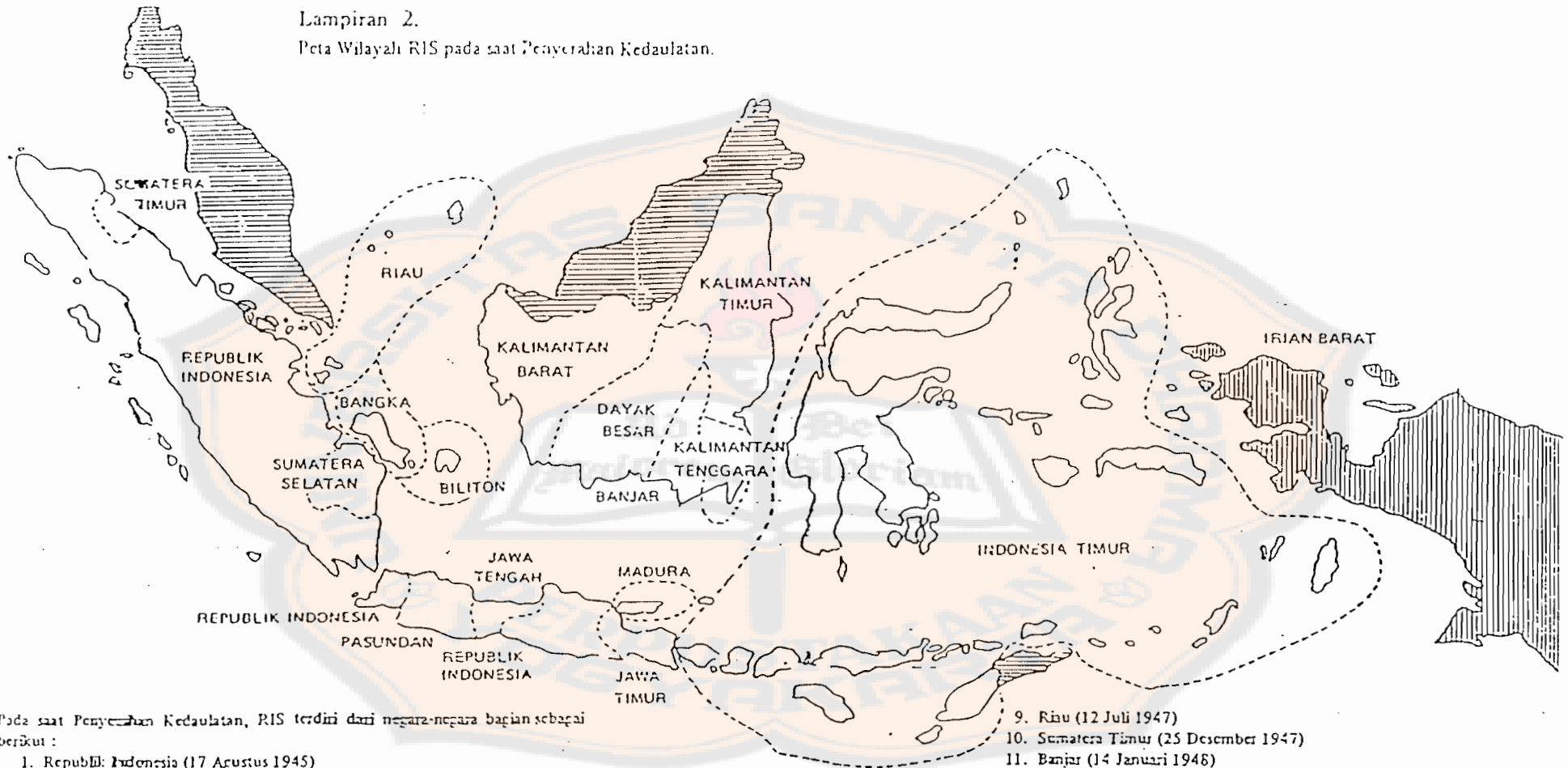
Semoga hendaknja Tuhan jang Maha Esa memberkahi djalannja perundingan selandjutnja.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 2.

Peta Wilayah RIS pada saat Penyerahan Kedaulatan.

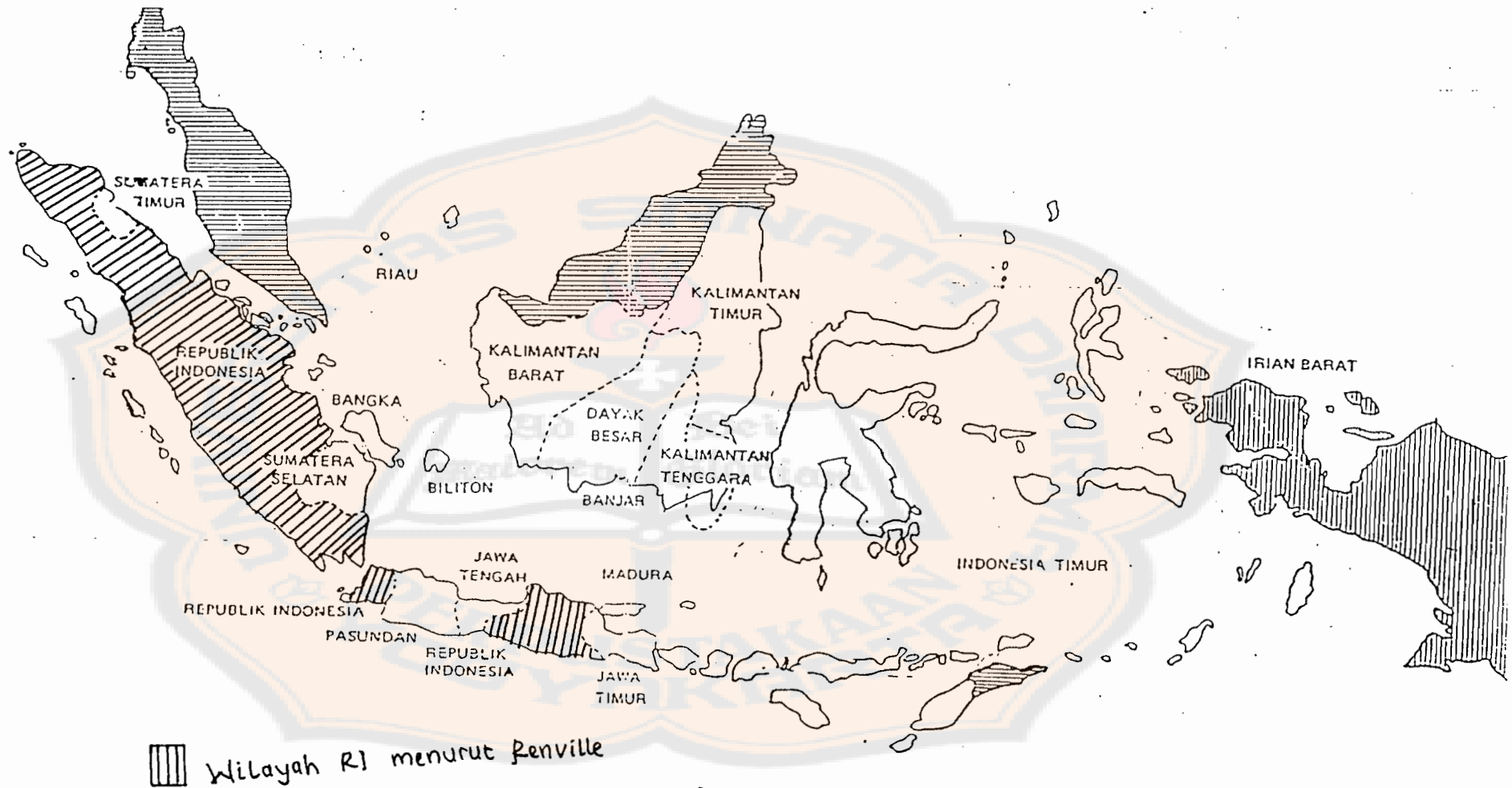


Pada saat Penyerahan Kedaulatan, RIS terdiri dari negara-negara bagian sebagai berikut :

1. Republik Indonesia (17 Agustus 1945)
2. Dayak Besar (7 Desember 1946)
3. Indonesia Timur (24 Desember 1946)
4. Kalimantan Tenggara (8 Januari 1947)
5. Kalimantan Timur (12 April 1947)
6. Kalimantan Barat (12 Mei 1947)
7. Bangka (12 Juli 1947)
8. Biliton (12 Juli 1947)

9. Riau (12 Juli 1947)
10. Sumatera Timur (25 Desember 1947)
11. Banjar (14 Januari 1948)
12. Madura (20 Februari 1948)
13. Pasundan (24 April 1948)
14. Sumatera Selatan (30 Agustus 1948)
15. Jawa Timur (26 November 1948)
16. Jawa Tengah (23 Februari 1949)

Di samping itu terdapat pula wilayah/distrik federal Jakarta yang dibentuk pada 11 Agustus 1948.



GLOSSARY

BFO : Bijeenkomst voor Federal Overleg (Badan Permusyawaratan Federal)

ELS : Europese Lagere School (Sekolah Rendah Eropa)

JSB : Jong Sumatranen Bond. Salah satu organisasi pemuda di Sumatra.

KTN : Komisi Tiga Negara. Pada awalnya bernama Komisi Jasa-Jasa Baik
(Committee of Good Offices)

MULO : Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (Sekolah Lanjutan Setingkat SMP)

NHH : Nederlandsche Handels Hogeschool

NICA : Netherlands Indies Civil Administration. Pemerintahan sipil Belanda yang
membonceng Inggris ketika datang ke Indonesia.

PHS : Prins Hendrik School (Sekolah Menengah Dagang)

PI : Perhimpunan Indonesia (Indonesische Vereniging)

UNCI : United Nations Commission for Indonesia (Komisi PBB untuk Indonesia)
UNCI merupakan perubahan KTN dengan kekuasaan yang lebih besar.

Aide Memoire : penjelasan tambahan.

Reshuffle kabinet : perombakan / pergantian kabinet.

Garis Van Mook : garis yang menghubungkan pucuk-pucuk terdepan pasukan
Belanda yang menyerbu ke daerah-daerah RI dalam aksi militer Belanda
pertama.

Exile Government : Pemerintahan Pelarian.

